

Masa Penawaran Awal	:	6 - 12 April 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	4 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	26 April 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	27 April - 2 Mei 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	28 April 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	2 Mei 2023	Pasar Tunai	:	30 April 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham	:	3 Mei 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 November 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	4 Mei 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 Mei 2025
			Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	2 Mei 2025

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KING TIRE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT King Tire Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak dalam bidang Industri Ban Luar dan Ban Dalam

Kantor Pusat
Jl. Raya Serang KM. 68
Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang – Banten 42185
Tel.: 62-254 402675
Fax : 62-254 400268
Website : www.kingland.co.id
Email : corsec@kingland.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp75.600.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 6 November 2023 sampai dengan 2 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia
Penjamin Emisi Efek

[akan ditentukan kemudian]

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2023

PT King Tire Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 001/SPUPS/KTI/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 2 Maret 2023 melalui surat S-01995/BEI.PP3/03-2023, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. PERNYATAAN UTANG	14
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VI. FAKTOR RISIKO.....	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	59
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	60
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	60
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	65
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	68
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN	77
5. HARTA KEKAYAAN	118
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	122
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	122
8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	123
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	126
10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	132
11. SUMBER DAYA MANUSIA	134
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	137
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	138
14. KETERANGAN MENGENAI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	139
IX. EKUITAS	160
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	162
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	164
XII. PERPAJAKAN	166
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	168
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	171
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	180
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	189
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	190
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	217

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
"BNRI"	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"Grup Perseroan"	: Berarti Perseroan dan PT United Kingland.
"Harga Penawaran"	: Berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah).
"Hari Bursa"	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KSEI"	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

	Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Konfirmasi Tertulis"	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	: Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
"Masa Penawaran"	: Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"Masyarakat"	: Berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Sekunder"	: Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Efek” : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan Nomor VIII.G.12” : Berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan Nomor IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan Nomor IX.J.1” : Berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-144/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 196 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 80 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 56 tanggal

7 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pembaharuannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS" : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 197 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 81 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 57 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh dan antara PT Adimitra Jasa Korpora dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pembaharuannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW" : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 199 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 83 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pembaharuannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW" : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 198 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 82 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pembaharuannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- "Pernyataan Pendaftaran" : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

"Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan UUPM, yaitu: pernyataan OJK yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
"Perseroan"	: Berarti PT King Tire Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Serang, Banten, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No.17 Tahun 2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.E.2.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

“POJK No. 35 Tahun 2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“POJK No. 41 Tahun 2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
“POJK No. 42 Tahun 2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
“POJK No. 55 Tahun 2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
“POJK No. 56 Tahun 2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
“SEOJK No. 20/2022”	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran Saham Baru, Penjamin Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“PSAK”	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

"Saham"	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
"Saham Yang Ditawarkan"	: Berarti Saham Baru atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal pencatatan.
"Surat Kolektif Saham"	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"Tanggal Pembayaran"	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek
"Tanggal Pencatatan"	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	: Berarti tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"UUPM"	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
"UUPT"	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.
"Waran"	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

- KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 143 Tahun 2022").

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

- KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan pertama kali mulai beroperasi pada Agustus 2010 dan didirikan pada 2 Agustus 2010 di Jakarta berdasarkan Akta No. 01 tahun 2010 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-42191.AH.01.01.TAHUN 2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 ("Akta No. 01" atau "Akta Pendirian").

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Perseroan dan Perusahaan Anak selanjutnya disebut Grup Perseroan bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya Grup Perseroan memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 Grup Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan didirikannya Perseroan untuk memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk Perseroan ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor dan sepeda di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan *Quality Management System* SNI ISO 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Visi Perseroan yaitu menjadi pemain aktif dalam industri ban luar dan ban dalam dengan memberikan nilai-nilai tambah untuk kehidupan manusia melalui dedikasi yang tinggi.

Grup Perseroan dalam memproduksi ban selalu memegang teguh komitmennya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dengan mengikuti aturan dari lembaga-lembaga sertifikasi ban yang ada di Indonesia dan Internasional, serta memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang terjamin, aman serta kompetitif.

Saat ini Grup Perseroan memiliki 4 produk ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk, dan 28 produk ban luar untuk sepeda dan sepeda motor. Kingland adalah salah satu merek manufaktur di Indonesia sejak tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang, Banten, Jawa Barat Indonesia.

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

- **PROSPEK USAHA PERSEROAN**

Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok dan logistik, hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian, Perseroan mampu menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama masa-masa tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam menanggulangi pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku.

Bila dilihat berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor untuk jenis sepeda motor dari tahun ke tahun terbilang cukup stabil. Pada tahun 2018, secara total jumlah kendaraan bermotor adalah 126.508.776 unit yang kontribusi terbesarnya diberikan oleh jenis sepeda motor sebesar 106.657.952 unit. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan pada total jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan dengan jumlah 133.617.012 unit, dengan kontribusi kenaikan terbesar diberikan oleh sepeda motor. Kemudian, pada tahun 2020, dimana dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh jenis kendaraan bermotor tetap mengalami kenaikan di tahun tersebut namun perubahan kenaikannya menurun dari pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor secara total mengalami kenaikan dari sebesar 133.617.012 unit di tahun 2019 menjadi 136.137.451 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dimana mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6% dari sebelumnya jumlah kendaraan bermotor sebanyak 136.137.451 pada tahun 2020, menjadi 143.797.227 pada tahun 2021.

Jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 121.209.304 unit, jumlah tersebut meningkat sebesar 5,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 115.023.039 pada tahun 2020. Jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 meningkat 6,44% menjadi 106.657.952, tahun 2019 meningkat 5,73% menjadi 112.771.136 dan tahun 2020 meningkat 2% menjadi 115.023.039.

Perseroan berkeyakinan bahwa dalam kondisi dengan adanya pandemi COVID-19, perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Bagi Perseroan, pada tahun-tahun yang akan datang, merupakan peluang yang arus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tren pemulihan yang dimulai sejak tahun 2021 dan 2022, industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan, sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Penjelasan atas prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

- KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen)
- c. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah)
- d. Harga Penawaran : Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah)
- e. Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya Rp75.600.000.000,-(tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah)
- f. Masa Penawaran Umum : 27 April - 2 Mei 2023
- g. Tanggal Pencatatan : 4 Mei 2023

- RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No.143 tanggal 14 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Perdana Saham			Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95	554.340.000	27.717.000.000	15,94
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	20,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000		1.521.980.000	76.099.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63	1.100.000.000	55.000.000.000	28,74
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24	1.121.180.000	56.059.000.000	29,29
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	15,94	554.340.000	27.717.000.000	14,48
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,07	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	700.000.000	35.000.000.000	20,13	700.000.000	35.000.000.000	18,29
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	350.000.000	17.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00	3.828.020.000	191.401.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.521.980.000	76.099.000.000		1.171.980.000	58.599.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi oleh David Kurniawan, CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik : 1023 pada tanggal 28 Februari 2023. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini wajar tanpa modifikasi oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 30 November 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ^{*)}	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Aset	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752
Jumlah Liabilitas	190.814.759.012	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
Jumlah Ekuitas	190.032.055.333	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662

^{*) Tidak Diaudit}

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	451.766.989.508	343.086.415.802	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554
Beban Pokok Penjualan	(379.295.646.000)	(299.890.518.139)	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(249.419.704.415)	(234.358.529.800)
Laba Kotor	72.471.343.508	43.195.897.663	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182	38.985.779.754
Laba Usaha	29.228.493.016	16.609.582.982	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761	18.483.966.945
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	26.145.777.539	16.678.461.753	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan	20.393.706.480	16.678.461.755	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842	8.419.489.388
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	(2.467.112.102)	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	2.034.861.103	216.371.665
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	19.535.368.490	14.211.349.652	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	-	-	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan bersih	31,68%	26,00%	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	26,48%	24,94%	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	67,77%	33,91%	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	74,13%	77,30%	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	20,84%	131,77%	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	30,50%	308,72%	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	21,28%	12,61%	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	31,91%	14,90%	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	12,20%	10,73%	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis							
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	16,04%	12,59%	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	6,40%	4,84%	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	4,46%	4,86%	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	4,29%	4,32%	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	19,03%	13,76%	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	38,14%	25,50%	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	10,19%	8,76%	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	6,87%	5,31%	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	13,76%	9,85%	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	10,67%	8,39%	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	5,29%	4,53%	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan							
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,49x	1,43x	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,00x	0,85x	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,50x	0,46x	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
Interest coverage ratio	9,14x	3,89x	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
Debt Service coverage ratio	4,06x	2,88x	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

¹⁾ Tidak diaudit

- **FAKTOR RISIKO**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha

B. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

1. Risiko Atas Perubahan Teknologi
2. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Risiko Bahan Baku dan Pemasok
4. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi
5. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

C. Risiko Umum

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domesik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Atas Ketentuan Negara Lain
4. Risiko Hukum

D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko Harga Saham Dapat Berfluktuasi
2. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham di Bursa
3. Risiko Pembagian Dividen
4. Risiko Aksi Korporasi

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

- **KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2023 (*audited*), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Kisaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp75.600.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 6 November 2023 sampai dengan 2 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).



PT King Tire Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Industri Ban Luar dan Ban Dalam

Kantor Pusat

Jl. Raya Serang, KM.68

Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin

Kabupaten Serang – Banten 42185

Tel.: 62-254 402675

Fax : 62-254 400268

Website : www.kingland.co.id

Email : corsec@kingland.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.143 tanggal 14 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95	554.340.000	27.717.000.000	15,94
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	20,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000		1.521.980.000	76.099.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000		5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	31,63	1.100.000.000	55.000.000.000	28,74
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	32,24	1.121.180.000	56.059.000.000	29,29
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	15,94	554.340.000	27.717.000.000	14,48
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,07	2.500.000	125.000.000	0,07
Masyarakat	700.000.000	35.000.000.000	20,13	700.000.000	35.000.000.000	18,29
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	350.000.000	17.500.000.000	9,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.478.020.000	173.901.000.000	100,00	3.828.020.000	191.401.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.521.980.000	76.099.000.000		1.171.980.000	58.599.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 198 tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 82 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

1. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh emiten sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau 12,60% (dua belas koma enam nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sebanyak-banyaknya Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
3. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
4. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
5. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor

penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 2 Mei 2022 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
2. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah dalam bentuk *scripless*.

1. Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.
2. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran, yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 6 November 2023 sampai dengan 2 Mei 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I
 - b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkan Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan, Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**")
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Untuk keperluan Penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
9. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I berikut

pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukan penyesuaian tersebut. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri I.

12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang BIP, Jakarta
Atas nama: PT King Tire Indonesia
No. Rek.: 081 000 7338

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga awal Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham per Waran Seri I. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaan saja, dengan perhitungan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

(ii) Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT):

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar

Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961
opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I, adalah saham yang telah disetor penuh yang merupakan bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Penerbitan Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 10 Penerbitan Waran Seri I.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Penerbitan Waran seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jangka waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua

puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Kingland Investindo Nusantara sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham;
2. Harris Muliawan sebanyak 1.121.180.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu) lembar saham;
3. Indra Muliawan sebanyak 554.340.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu) lembar saham;
4. Hardi Muliawan sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 3.478.020.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya sebesar 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar 12,06% (dua belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017"), PT Kingland Investindo Nusantara, Harris Muliawan, Indra Muliawan dan Hardi Muliawan telah menyatakan untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif yang disebabkan oleh peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham Perseroan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 143 Tahun 2022 telah menetapkan Harris Muliawan sebagai pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2023, Pengendali Perseroan, Bapak Harris Muliawan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dan ditempatkan dalam instrumen keuangan wajib dilakukan atas nama Perseroan. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dilarang untuk dijadikan jaminan utang.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar [•]% ([•] persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar [•]%,
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar [•]%,
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar [•]%,
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar [•]% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar [•]%, biaya jasa konsultan hukum [•]%, dan biaya jasa notaris sebesar [•]%,
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar [•]% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.

6. Biaya lain-lain sebesar [•]% yang terdiri dari:
Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK [•]%, Biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar [•]%, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar [•]%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp213.586.031.701,- yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp196.847.770.374,- dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp16.738.261.327,- yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 28 Februari 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, anggota Allinial Global berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	26.760.134.481
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114
Utang pajak	745.513.567
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279
Uang jaminan	38.000.000.000
Liabilitas jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	821.426.392
Utang bank	734.031.228
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	8.308.786.034
Utang bank	-
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701

LIABILITAS JANGKA PENDEK

UTANG BANK JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.924.380.313
Citibank N.A Indonesia	58.700.950.000
Jumlah	109.625.330.313

UTANG USAHA

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
<u>Pihak berelasi :</u>	-
PT Lingga Djaja	
<u>Pihak Ketiga :</u>	
PT Luhai Industrial	8.541.034.582
PT Sari Sarana Kimiatama	3.016.755.796
PT Pilar Bersama Maju	1.550.170.999
PT Pemindo	1.097.039.473
PT Primajaya Eratama	871.559.844
PT Murni Kusuma Jaya	66.885.825
PT Harta Perindo Sejahtera	-
CV Gracia Rubber Industri	-
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	11.616.687.962
Jumlah	26.760.134.481

UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
Freder Trading, Co., Ltd.	12.543.005.538
<u>Yuan China</u>	
Xiamen Sheg Jeng Maqchinery, Co., Ltd.	526.725.576
<u>Rupiah</u>	
Lain-lain (dibawah Rp300.000.000)	15.540.000
Jumlah	13.085.271.114

UTANG PAJAK

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	37.203.207
Pasal 15	1.006.500
Pasal 21	28.248.385
Pasal 22	15.651.600
Pasal 23	14.577.428
Pasal 25	42.061.112
Pasal 29	
Tahun berjalan	14.999.997
Tahun 2018	50.364.250
Pajak Pertambahan Nilai	-
Sub-Jumlah	204.112.479
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	30.161.058
Pasal 15	275.880

Pasal 21	16.077.601
Pasal 22	14.193.150
Pasal 23	5.566.521
Pasal 25	41.797.570
Pasal 29	
Tahun berjalan	12.557.955
Tahun 2018	36.109.000
Pajak Pertambahan Nilai	384.662.353
Sub-Jumlah	541.401.088
Jumlah	745.513.567

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam Rupiah)

	30 September 2022
Biaya gaji	4.437.488.399
Jasa profesional	1.640.000.000
Bunga	998.574.940
Jumlah	7.076.063.279

UANG JAMINAN

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan atas pesanan produk dari Grup sebesar Rp 38.000.000.000.

LIABILITAS SEWA – JANGKA PENDEK

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	30 September 2022
Liabilitas sewa	9.130.212.426
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	821.426.392
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.308.786.034

LIABILITAS JANGKA PANJANG

UTANG BANK JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah)

	30 September 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	734.031.228
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	734.031.228
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Muh Imam Basuki Dan Rekan dengan

laporan bertanggal 17 November 2022 dan 20 Juni 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

30 September 2022	
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat diskonto	7.53% per tahun
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Beban jasa kini	460.490.871
Beban bunga	492.011.930
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
Jumlah	952.502.801
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(649.658.118)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	8.822.158.006
Beban tahun berjalan	952.502.801
Pembayaran imbalan kerja	(935.510.759)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(649.658.118)
Saldo akhir	8.189.491.930

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)			
Keterangan	30 September 2022		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(673.269.485)	775.780.808
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	729.304.406	(647.304.386)

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN

SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK TERDAPAT KONTIJENSI YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian oleh David Kurniawan, CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik : 1023 pada tanggal 28 Februari 2023. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini wajar tanpa modifikasian oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Laporan keuangan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November 2022 ¹⁾	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	4.487.757.834	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	600.092.814	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	90.684.917.834	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	-	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	763.361.430	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	142.426.144.491	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	34.554.027	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	21.622.960.826	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	8.663.987.636	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	271.313.776.892	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	1.320.226.512	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	100.444.711.001	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.869.998	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.304.169.942	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	109.533.977.453	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka - pendek	114.544.966.032	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha					
Pihak berelasi	-	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	25.251.681.748	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.533.092.544	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	1.109.003.067	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	3.755.564.913	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	15.200.000.000	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka					

Keterangan	30 November 2022 ¹⁾	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Liabilitas sewa	9.130.212.426	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	-	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	182.524.520.730	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Liabilitas sewa	-	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	100.746.352	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	8.290.238.282	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	190.814.759.012	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependangali	-	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.008.147)	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	39.060.445.297	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	19.248.874.553	-	-	-	-
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	-	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	-	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Jumlah	180.122.656.760	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.910.338.573	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	190.032.055.333	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	380.847.754.345	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

¹⁾ Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	451.766.989.508	343.086.415.802	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554
BEBAN POJOK PEJUALAN	(379.295.646.000)	(299.890.518.139)	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(249.419.704.415)	(234.358.529.800)
LABA KOTOR	72.471.343.508	43.195.897.663	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182	38.985.779.754
Beban penjualan	(20.407.437.807)	(18.022.614.496)	(17.530.816.355)	(13.335.282.640)	(19.694.362.612)	(16.962.459.063)	(9.265.368.370)
Beban umum dan administrasi	(17.856.323.045)	(7.546.549.212)	(13.649.469.165)	(10.244.162.100)	(14.989.755.689)	(13.991.965.630)	(11.472.960.102)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(4.979.089.640)	(1.017.150.973)	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	(841.135.728)	236.515.663
LABA USAHA	29.228.493.016	16.609.582.982	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761	18.483.966.945
Pendapatan keuangan	25.476.854	68.878.772	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Beban keuangan	(3.108.192.330)	-	(3.346.695.668)	(3.647.272.021)	(4.427.224.355)	(4.826.904.909)	(7.194.418.266)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	26.145.777.539	16.678.461.753	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(5.752.071.059)	-	(4.797.086.360)	(3.424.707.660)	(3.967.495.180)	(2.436.342.259)	(3.002.811.500)
Tanggunghan	-	-	(34.970.486)	(569.848.055)	(571.280.933)	(29.379.446)	71.858.152
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(5.752.071.059)	-	(4.832.056.8456)	(3.994.555.715)	(4.538.776.113)	(2.465.721.705)	(2.930.953.348)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN	20.393.706.480	16.678.461.755	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842	8.419.489.388
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	(2.467.112.102)	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	2.034.861.103	216.371.665
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	19.535.368.490	14.211.349.652	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan			649.658.118	1.071.050.426	680.078.241	(1.165.307.293)	(3.966.426.966)
Beban komprehensif Pajak penghasilan terkait	(175.958.835)	623.405.054	-	-	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	19.359.409.655	14.834.754.706	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	-	-	11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	5.321.816.866	7.646.012.772
Kepentingan non-pengendali	-	-	242.788.426	409.898.193	898.999.217	480.443.873	557.104.951
JUMLAH	-	-	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	-	-	11.755.450.835	10.137.800.945	10.828.904.789	4.947.800.665	5.621.115.839
Kepentingan non-Pengendali	-	-	44.182.052	143.594.632	118.251.022	(54.479.615)	(511.811.149)
JUMLAH	-	-	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	-	-	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56

¹⁾ Tidak Diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember		
	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022	2021 ¹⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan	453.309.545.786	363.361.193.318	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(418.202.136.684)	(344.065.507.667)	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	-	-	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(11.523.422.189)	(36.846.831.364)	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	-	-	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.383
Pembayaran lain-lain	(5.404.089.640)	(1.146.241.883)	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	18.179.897.273	(18.697.397.596)	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(16.291.583.198)	(4.868.605.945)	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	-	68.878.854	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.082.715.476)	-	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.194.401.401)	(23.497.124.687)	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS INVESTASI							
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	129.090.910	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Penambahan uang muka aset tetap	(6.493.525.000)	-	-	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(16.702.827.549)	(7.492.946.846)	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)
ARUS KAS DARI (UNTUK)							
AKTIVITAS PENDANAAN							
Kenaikan modal saham Bank yang dibatasi penggunaannya	25.858.337.990	-	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(9.527.701)	(12.336.879)	-	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	(25.000.000.000)	-	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	-	-	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
(Pembayaran) penerimaan hutang bank jangka panjang	3.012.022.073	(4.042.291.000)	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
(Pembayaran) penerimaan hutang bank jangka pendek	-	32.746.755.781	-	-	-	-	-
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	3.860.832.362	28.692.127.901	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK							
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	(14.036.396.589)	(2.297.943.354)	(9.607.767.696)	15.643.034.555	5.353.571.761	6.195.297.926	(4.524.001.042)
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	18.524.154.422	13.170.582.661	18.524.154.422	13.170.582.661	13.170.582.661	6.975.284.735	11.499.285.777
	4.487.757.834	10.872.639.389	8.916.386.726	28.813.617.216	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735

¹⁾ Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 November 2022 ^{*)}	30 November 2021 ^{*)}	30 September 2022	30 September 2021 ^{*)}	2021	31 Desember 2020	2019
Rasio Pertumbuhan							
Penjualan bersih	31,68%	26,00%	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	26,48%	24,94%	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	67,77%	33,91%	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	74,13%	77,30%	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	20,84%	131,77%	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	30,50%	308,72%	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	21,28%	12,61%	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	31,91%	14,90%	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	12,20%	10,73%	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis							
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	16,04%	12,59%	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	6,40%	4,84%	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	4,46%	4,86%	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	4,29%	4,32%	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	19,03%	13,76%	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	38,14%	25,50%	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	10,19%	8,76%	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	6,87%	5,31%	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	13,76%	9,85%	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	10,67%	8,39%	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	5,29%	4,53%	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan							
<i>Rasio lancar (Current Ratio)</i>	1,49x	1,43x	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
<i>Solvabilitas ekuitas (Debt to Equity Ratio)</i>	1,00x	0,85x	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
<i>Solvabilitas aset (Debt to Asset Ratio)</i>	0,50x	0,46x	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
<i>Interest coverage ratio</i>	9,14x	3,89x	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
<i>Debt Service coverage ratio</i>	4,06x	2,88x	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

^{*)} Tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. **Dasar Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK**

Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Grup diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73

Grup melakukan penerapan dini atas PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif sejak awal perjanjian ditandatangani yaitu sejak tahun 2019. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental.

Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain - pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

^{*) Tidak Diaudit}

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597
BEBAN POJOK PEJUALAN	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(249.419.704.415)
LABA KOTOR	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182
Beban penjualan	(17.530.816.355)	(13.335.282.640)	(19.694.362.612)	(16.962.459.063)
Beban umum dan administrasi	(13.649.469.165)	(10.244.162.100)	(14.989.755.689)	(13.991.965.630)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	(841.135.728)
LABA USAHA	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761
Pendapatan keuangan	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695
Beban keuangan	(3.346.695.668)	(3.647.272.021)	(4.427.224.355)	(4.826.904.909)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(4.797.086.360)	(3.424.707.660)	(3.967.495.180)	(2.436.342.259)
Tangguhan	(34.970.486)	(569.848.055)	(571.280.933)	(29.379.446)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(4.832.056.8456)	(3.994.555.715)	(4.538.776.113)	(2.465.721.705)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842
Efek Penyesuaian Proforma	858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	2.034.861.103
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	649.658.118	1.071.050.426	680.078.241	(1.165.307.293)
Beban komprehensif	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(142.924.786)	(235.631.094)	(149.617.213)	256.367.604
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	5.321.816.866
Kepentingan non-pengendali	242.788.426	409.898.193	898.999.217	480.443.873
JUMLAH	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	5,39	5,38	5,67	3,17

^{*) Tidak Diaudit}

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September 2022	2021 ^{*)}	2021	31 Desember 2020	2019
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	33,29%	21,79%	29,74%	8,37%	-1,04%
Beban Pokok Penjualan	33,40%	22,51%	31,02%	6,43%	-2,38%
Laba kotor	32,69%	17,96%	22,95%	20,08%	7,86%
Laba usaha	3,09%	74,27%	60,91%	-18,75%	1,07%
Laba bersih	19,55%	110,90%	79,53%	-29,27%	10,49%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	14,77%	170,76%	123,72%	-4,23%	-65,55%
Jumlah aset	18,15%	11,81%	20,01%	6,00%	6,13%
Jumlah liabilitas	28,97%	14,83%	31,74%	7,55%	-5,01%
Jumlah ekuitas	7,51%	9,36%	10,35%	4,75%	17,14%
Rasio Bisnis					
Laba kotor / penjualan (<i>Gross Profit Margin</i>)	15,24%	15,31%	14,98%	15,80%	14,26%
Laba usaha / penjualan (<i>Operating Profit Margin</i>)	5,62%	7,27%	6,29%	5,07%	6,76%
Laba bersih / penjualan (<i>Net Profit Margin</i>)	3,13%	3,49%	2,71%	1,96%	3,00%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / penjualan	3,27%	3,80%	2,85%	1,65%	1,87%
Laba kotor / aset	13,92%	13,50%	17,23%	16,82%	14,84%
Laba kotor / ekuitas	30,33%	25,01%	34,16%	30,66%	26,75%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan / ekuitas	6,51%	6,21%	6,50%	3,20%	3,51%
Laba sebelum pajak / aset	4,30%	5,24%	5,93%	3,70%	4,32%
Laba sebelum pajak / ekuitas	9,38%	9,71%	11,76%	6,75%	7,79%
Laba bersih / ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	6,23%	5,70%	6,18%	3,80%	5,63%
Laba bersih / aset (<i>Return On Asset</i>)	2,86%	3,08%	3,12%	2,08%	3,12%
Rasio Keuangan					
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,41x	1,56x	1,50x	1,54x	1,49x
Solvabilitas ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,18x	0,85x	0,98x	0,82x	0,80x
Solvabilitas aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,54x	0,46x	0,50x	0,45x	0,45x
Interest coverage ratio	5,82x	4,69x	4,38x	2,71x	2,55x
Debt Service coverage ratio	3,60x	3,96x	4,78x	1,59x	2,12x

^{*)} Tidak diaudit

ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan bersih, laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih setelah efek penyesuaian proforma periode/tahun berjalan tahun berjalan, laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma dan laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554
Laba Kotor	54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182	38.985.779.754
Laba Usaha	20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761	18.483.966.945
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan	12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842	8.419.489.388
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690

^{*)}Tidak diaudit

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

3.1.1. Penjualan Bersih

Dibawah ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Ban luar	245.897.805.923	171.573.457.744	248.328.073.118	165.260.801.915	138.109.472.601
Ban dalam	114.769.133.556	99.017.608.689	136.011.423.369	130.972.795.682	135.234.836.953
Jumlah	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp360.666.939.479,- naik sebesar Rp90.075.873.046,- atau sebesar 33,29% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp270.591.066.433,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp245.897.805.923,- dibandingkan Rp171.573.457.744,- pada 30 September 2021. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dan juga didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp384.339.496.487,- naik sebesar Rp88.105.898.890,- atau sebesar 29,74% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp296.233.597.597,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp248.328.073.118,- dibandingkan Rp165.260.801.915,- pada 31 Desember 2020.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp296.233.597.597,- naik sebesar Rp22.889.288.043,- atau sebesar 8,37% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp273.344.309.554,-. Kenaikan tersebut

disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ban luar menjadi Rp165.260.801.915,- dibandingkan Rp138.109.472.601,- pada 31 Desember 2020.

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Dibawah ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Bahan baku					
Persediaan awal	58.979.034.432	25.740.230.777	25.740.230.777	25.608.562.571	24.766.508.866
Pembelian	270.232.150.050	209.348.387.761	278.709.334.395	174.374.656.900	170.027.679.633
Retur pembelian	(7.920.000)	(106.432.662)	(102.043.800)	(1.899.500)	(25.196.500)
Jumlah bahan baku	329.203.264.482	234.982.185.876	304.347.521.372	199.981.319.971	194.768.991.999
Persediaan akhir	(93.997.134.040)	(60.691.372.544)	(58.979.034.432)	(25.740.230.777)	(25.608.562.571)
Bahan baku terpakai	235.206.130.442	174.290.813.332	245.368.486.940	174.241.089.194	169.160.429.428
Biaya tidak langsung					
Gaji dan tunjangan	45.705.367.468	35.636.532.499	47.819.252.029	36.387.658.009	34.218.947.358
Listrik	14.961.041.397	13.690.609.581	18.856.157.141	15.415.786.039	14.193.705.441
Perbaikan dan pemeliharaan	9.970.716.584	7.284.946.604	12.516.685.025	8.576.098.791	3.877.666.650
Penyusutan aset tetap	8.966.228.798	8.809.270.929	11.765.154.284	11.234.868.272	10.477.510.167
Perlengkapan	3.393.032.030	2.655.684.659	3.695.403.202	2.030.898.982	1.655.724.836
Impor	2.612.602.449	2.361.594.910	2.863.638.176	2.627.095.723	3.536.120.577
Lain-Lain	5.225.410.828	2.644.618.507	3.446.315.116	1.494.002.389	920.071.384
Jumlah biaya tidak langsung	90.834.399.554	73.083.257.689	100.962.604.973	77.766.408.205	68.879.746.413
Total biaya produksi	326.040.529.996	247.374.071.021	346.331.091.913	252.007.497.399	238.040.175.841
Persediaan barang dalam proses					
Awal tahun	1.878.527.437	16.177.225.969	16.177.225.969	2.315.556.099	2.438.056.770
Akhir tahun	(3.229.918.327)	(1.688.281.528)	(1.878.527.437)	(16.177.225.969)	(2.315.556.099)
	(1.351.390.890)	14.488.944.441	14.298.698.532	(13.861.669.870)	122.500.671
Persediaan barang jadi					
Awal tahun	42.407.621.909	8.557.383.461	8.557.383.461	19.831.260.347	16.027.113.635
Akhir tahun	(61.382.359.107)	(41.244.118.850)	(42.407.621.909)	(8.557.383.461)	(19.831.260.347)
	(18.974.737.198)	(32.686.735.389)	(33.850.238.448)	11.273.876.886	(3.804.146.712)
Jumlah	305.714.401.908	229.176.280.073	326.779.551.997	249.419.704.415	234.358.529.800

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp305.714.401.908,- naik sebesar Rp76.538.121.835,- atau sebesar 33,40% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp229.176.280.073,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pembelian bahan baku di periode 30 September 2022 sebesar Rp60.883.762.289,-.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp326.779.551.997,- naik sebesar Rp77.359.847.582,- atau sebesar 31,02% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp249.419.704.415,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pembelian bahan baku di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp104.334.677.495,-.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249.419.704.415,- naik sebesar Rp15.061.174.615,- atau sebesar 6,43% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp234.358.529.800,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya jumlah biaya tidak langsung di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp8.886.661.792,-.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp54.952.537.571,- naik sebesar Rp13.537.751.211,- atau sebesar 32,69% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp41.414.786.360,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.559.944.490,- naik sebesar Rp10.746.051.308,- atau sebesar 22,95% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp46.813.893.182,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp46.813.893.182,- naik sebesar Rp7.828.113.428,- atau sebesar 20,08% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp38.985.779.754,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan peningkatan beban pokok penjualan sehingga membuat laba kotor mengalami kenaikan.

3.1.4. Beban Penjualan

Dibawah ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^a	2021	2020	2019
Pengangkutan	7.268.136.875	4.419.040.981	6.482.597.362	5.332.273.563	4.839.211.838
Gaji dan tunjangan	5.191.108.008	6.583.682.179	9.060.971.564	6.969.301.100	-
Iklan	2.382.271.472	768.479.880	1.194.883.206	1.498.294.082	1.118.611.607
Hadiah dan promosi	2.661.710.000	1.468.728.980	2.816.240.980	2.972.112.558	3.100.819.000
Lain-lain	27.590.000	95.350.620	139.669.500	190.477.760	206.725.925
Jumlah	17.530.816.355	13.335.282.640	19.694.362.612	16.962.459.063	9.265.368.370

^a)Tidak diaudit

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp17.530.816.355,- naik sebesar Rp4.195.533.715,- atau sebesar 31,46% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp13.335.282.640,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban pengangkutan di periode 30 September 2022 sebesar Rp2.849.095.894,-.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.694.362.612,- naik sebesar Rp2.731.903.549,- atau sebesar 16,11% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp16.962.459.063,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.091.670.464,-.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.962.459.063,- naik sebesar Rp7.697.090.693,- atau sebesar 83,07% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.265.368.370,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp6.969.301.100,-.

3.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Dibawah ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	8.438.453.764	7.910.714.048	10.857.338.206	9.326.249.415	8.335.403.650
Jasa manajemen	1.987.000.000	480.000.000	1.710.000.000	-	-
Imbalan kerja	952.502.801	-	-	1.602.582.656	1.139.438.128
Keperluan kantor	541.295.501	137.422.800	132.188.300	842.269.014	119.166.686
Penyisihan piutang usaha	461.480.041	91.436.002	91.436.002	-	-
Penyusutan aset hak-guna	342.382.965	342.382.965	456.510.621	456.510.621	456.510.621
Penyusutan aset tetap	322.057.207	309.333.444	417.557.484	406.179.289	447.796.666
Asuransi	144.803.564	126.715.196	169.221.553	167.648.443	140.227.517
Pemeliharaan	102.563.868	85.154.390	104.667.208	119.081.243	131.297.703
Perizinan	102.358.050	105.258.404	152.874.404	60.224.158	125.122.077
Jasa professional	81.126.931	507.532.310	713.527.129	584.971.364	413.070.466
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000)	173.444.473	148.212.541	184.434.782	426.249.427	164.926.588
Jumlah	13.649.469.165	10.244.162.100	14.989.755.689	13.991.965.630	11.472.960.102

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp13.649.469.165,- naik sebesar Rp3.405.307.065,- atau sebesar 33,24% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp10.244.162.100,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban jasa manajemen di periode 30 September 2022 sebesar Rp1.507.000.000,-.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.989.755.689,- naik sebesar Rp997.790.059,- atau sebesar 7,13% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp13.991.965.630,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.710.000.000,-.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.991.965.630,- naik sebesar Rp2.519.005.528,- atau sebesar 21,96% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp11.472.960.102,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban gaji dan tunjangan di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp1.697.240.659,-.

3.1.6. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Dibawah ini merupakan rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Laba (rugi) selisih kurs	(3.514.040.154)	485.257.169	631.359.284	(596.665.167)	551.278.278
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	(62.500.000)	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Pendapatan imbalan kerja	-	1.221.384.088	991.532.263	-	-
Lain-lain	82.131.128	68.997.266	(461.997.425)	(424.470.561)	(314.762.615)
Jumlah Bersih	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.292.981.960	(841.135.728)	236.515.663

^{*)}Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.494.409.026,- turun sebesar Rp5.329.138.439,- atau sebesar -290,45% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp1.834.729.433,-. Penurunan ini terutama disebabkan dari meningkatnya rugi selisih kurs di periode 30 September 2022 sebesar Rp3.999.297.323,-.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.292.981.960,- naik sebesar Rp2.134.117.688,- atau sebesar 253,72% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp841.135.728,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya pendapatan imbalan kerja di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp991.532.263,-.

Perbandingan pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp841.135.728,- turun sebesar Rp1.077.651.391,- atau sebesar -455,64% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp236.515.663,-. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban lain-lain di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp786.639.079,-.

3.1.7. Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp20.277.843.025,- naik sebesar Rp607.771.972,- atau sebesar 3,08% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp19.670.071.053,-. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan penjualan bersih Perseroan di periode 30 September 2022 sebesar Rp88.989.441.599,-.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.165.811.221,- naik sebesar Rp9.147.478.460,- atau sebesar 60,91% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp15.018.332.761,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 penjualan bersih meningkat sebesar Rp89.256.742.416,-.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.018.332.761,- turun sebesar Rp3.465.634.184,- atau sebesar 18,75% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.483.966.945,-. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan beban penjualan Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.697.090.693,- dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3.1.8. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.983.294.390,- meningkat sebesar Rp898.688.428,- atau sebesar 5,59% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp16.084.605.962,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan pada periode 30 September 2022 mengalami peningkatan laba usaha sebesar Rp649.278.897,- sementara beban keuangan menurun sebesar Rp259.069.427,- dan membuat laba sebelum pajak penghasilan meningkat di periode 30 September 2022.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.814.946.561,- meningkat sebesar Rp9.512.103.014,- atau sebesar 92,33% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.302.843.547,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba usaha sebesar Rp9.150.475.388,- sementara beban keuangan menurun Rp396.683.626,- dan membuat laba sebelum pajak penghasilan meningkat di periode 31 Desember 2021.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.302.843.547,- menurun sebesar Rp1.047.599.189,- atau sebesar 9,23% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp11.350.442.736,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba usaha sebesar Rp3.465.634.184,- membuat laba sebelum pajak penghasilan menurun di periode 31 Desember 2020.

3.1.9. Laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma

Perbandingan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.292.899.555,- meningkat sebesar Rp1.846.923.310 atau sebesar 19,55% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek penyesuaian untuk periode yang berakhir 30 September 2021 sebesar Rp9.445.976.245,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 30 September 2022 mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp898.688.428,-.

Perbandingan laba bersih sebelum efek proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bersih sebelum efek proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.416.694.783,- meningkat sebesar Rp4.614.434.044,- atau sebesar 79,35% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.260.739,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp9.512.103.014,- di periode 31 Desember 2021.

Perbandingan laba bersih sebelum efek proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba bersih sebelum efek proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.802.260.739,- menurun sebesar Rp2.400.856.984,- atau sebesar 29,27% dibandingkan dengan laba bersih sebelum efek proforma untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.203.117.723,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.047.599.189,-.

3.1.10. Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.799.632.887,- meningkat sebesar Rp1.518.237.310,- atau sebesar 14,77% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp10.281.395.577,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp1.846.923.310,-.

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.947.155.811,- meningkat sebesar Rp6.053.834.761,- atau 123,72% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4.893.321.050,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp4.614.434.044,-.

Perbandingan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.893.321.050,- menurun sebesar Rp215.983.640,- atau 4,23% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.109.304.690,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma sebesar Rp2.400.856.984,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan yang mengacu pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953
JUMLAH ASET	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454
JUMLAH LIABILITAS	213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
karyawan				
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752

^{*) Tidak Diaudit}

3.2.1. Aset Lancar

Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101
Piutang usaha - pihak ketiga	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	7.000.000.000	-	-
Pihak ketiga	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500
Persediaan	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017
Biaya dibayar di muka	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018
Uang muka	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311
Pajak dibayar di muka	2.487.865.981	-	332.081.282	-
Biaya ditangguhkan	2.030.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799

^{*) Tidak Diaudit}

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset lancar adalah persediaan. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp277.882.911.822,- mengalami kenaikan sebesar Rp60.149.975.245,- atau sebesar 27,63% dibandingkan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp217.732.936.576,-. Hal ini disebabkan karena kenaikan persediaan sebesar Rp55.344.227.696,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari persediaan dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari piutang usaha – pihak ketiga. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp217.685.477.306,- mengalami peningkatan sebesar Rp61.284.185.910,- atau sebesar 39,18% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp156.401.291.396,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada persediaan sebesar Rp52.790.343.571,- pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari piutang usaha – pihak ketiga. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp156.401.291.396,- mengalami peningkatan sebesar Rp22.553.975.598,- atau sebesar 16,85% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp133.847.315.799,-. Hal ini terutama disebabkan uang muka dan biaya dibayar di muka, pada periode

31 Desember 2020 uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp17.977.491.842,- sedangkan di periode 31 Desember 2019 sebesar Rp6.052.045.329,-, terjadi peningkatan sebesar Rp11.925.446.513,-.

3.2.2. Aset Tidak Lancar

Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407
Aset tetap - bersih	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491
Aset takberwujud - bersih	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250
Aset hak-guna - bersih	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953

) Tidak Diaudit

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp116.855.441.048,- mengalami peningkatan sebesar Rp435.404.069,- atau sebesar 0,37% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp116.420.036.979,-. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya aset tetap bersih sebesar Rp858.516.544,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp116.420.036.979,- mengalami penurunan sebesar Rp5.580.792.810,- atau sebesar 4,57% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp122.000.829.789,-. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap bersih, pada Periode 31 Desember 2021 aset tetap bersih sebesar Rp106.793.530.396,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp111.241.565.790,-, terjadi penurunan aset tetap bersih sebesar Rp4.448.035.394,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap bersih. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp122.000.829.789,- mengalami penurunan sebesar Rp6.805.244.165,- atau sebesar 5,28% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp128.806.073.953,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aset tetap bersih, di mana pada Periode 31 Desember 2020 aset tetap bersih sebesar Rp111.241.565.790,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp117.761.192.491,-, terjadi penurunan aset tetap bersih sebesar Rp6.519.626.701,-.

3.2.3. Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp394.738.352.869,- mengalami peningkatan sebesar Rp60.632.838.584,- atau sebesar 18,15% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp334.105.514.285,-. Peningkatan ini disebabkan karena pada periode 30 September 2022 aset lancar meningkat sebesar Rp60.197.434.515,-.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp334.105.514.285,- mengalami peningkatan sebesar Rp55.703.393.100,- atau sebesar 20,01% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp278.402.121.185,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 aset lancar meningkat sebesar Rp61.284.185.910,-.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset lancar. Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp278.402.121.185,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.748.731.433,- atau sebesar 6,00% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp262.653.389.752,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 aset lancar meningkat sebesar Rp22.553.975.598,-.

3.2.4. Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka -pendek	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	8.840.462.400	-
Pihak ketiga	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188
Utang lain-lain – pihak ketiga	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968
Utang pajak	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474
Utang bank	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636

*) Tidak Diaudit

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah Rp196.847.770.374,- meningkat sebesar Rp51.987.826.599,- atau sebesar 35,89% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek sebesar Rp109.625.330.313,- meningkat sebesar Rp2.133.746.582,- atau sebesar 1,99% dibandingkan dengan utang bank jangka pendek pada periode 31 Desember 2021. Selain itu, utang usaha pihak ketiga meningkat pada periode 30 September 2022.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp144.859.943.775,- mengalami peningkatan sebesar Rp43.355.451.641,- atau sebesar 42,71% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp101.504.492.134,-. Peningkatan ini disebabkan oleh utang bank jangka pendek meningkat sebesar Rp63.034.090.111,- pada periode 31 Desember 2021, pada Periode 31 Desember 2021 utang bank jangka

pendek sebesar Rp107.491.583.731,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp44.457.493.620,-.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.504.492.134,- mengalami peningkatan sebesar Rp11.760.092.498,- atau sebesar 13,10% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.744.399.636,-. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp13.433.224.116,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019.

3.2.5. Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952
Utang bank	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228
Liabilitas pajak tangguhan	239.983.363	100.746.351	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454

^{*) Tidak Diaudit}

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.738.261.327,- mengalami penurunan sebesar Rp4.012.958.892,- atau sebesar 19,34% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp3.307.329.000,- dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas sewa dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.751.220.219,- mengalami penurunan sebesar Rp3.458.690.017,- atau sebesar 14,29% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.209.910.236,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, pada periode 31 Desember 2021 liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp8.822.158.006,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp11.404.944.131,-, terjadi penurunan sebesar Rp2.582.786.125,-.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.209.910.236,- mengalami penurunan sebesar Rp2.939.543.218,- atau sebesar 10,38% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.149.453.454,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang bank, pada

periode 31 Desember 2020 utang bank sebesar Rp4.041.360.228,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp8.450.732.228,-, terjadi penurunan utang bank sebesar Rp4.409.372.000,- atau sebesar 52,18%.

3.2.6. Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp213.586.031.701,- mengalami kenaikan sebesar Rp47.974.867.707,- atau sebesar 28,97% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp165.611.163.994,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 30 September 2022 liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp51.987.826.599,- dan liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp4.012.958.892,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp165.611.163.994,- mengalami peningkatan sebesar Rp39.896.761.624,- atau sebesar 31,74% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp125.714.402.370,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp43.355.451.641,- dan liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp3.458.690.017,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka pendek. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp125.714.402.370,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.820.549.280,- atau sebesar 7,55% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.893.853.090,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp2.939.543.218,- dan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp11.760.092.498,-.

3.2.7. Ekuitas

Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022	2021	31 Desember 2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250,000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sependengali	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba Tahun berjalan	-	-	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865
Dividen	-	-	-	-
Jumlah	171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662

^{*) Tidak Diaudit}

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp181.152.321.168,- mengalami peningkatan sebesar Rp12.657.970.877,- atau sebesar 7,51% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp168.494.350.291,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 30 September 2022 terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp168.494.350.291,- mengalami peningkatan sebesar Rp15.806.631.476,- atau sebesar 10,35% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp152.687.718.815,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2021 saldo laba meningkat sebesar Rp9.517.695.566,-.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal saham. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp152.687.718.815,- mengalami peningkatan sebesar Rp6.928.182.153,- atau sebesar 0,76% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.759.536.662,-. Peningkatan ini disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 saldo laba meningkat sebesar Rp5.321.816.866,-.

Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ^{*)}		2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.297
Pembayaran lain-lain	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan modal saham	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	(30.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	(9.607.767.696)	15.643.034.555	5.353.571.761	6.195.297.926	(4.524.001.042)
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	8.916.386.726	28.813.617.216	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735

^{*)} Tidak Diaudit

3.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ^{*)}		2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415
Pembayaran kas kepada pemasok	(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)
Pembayaran kas kepada karyawan	(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)
Penerimaan lain-lain	264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.297

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ^{*)}		2020	2019
Pembayaran lain-lain	(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850
Pembayaran pajak penghasilan	(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)
Penerimaan bunga	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057
Pembayaran bunga	(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678

^{*) Tidak Diaudit}

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp5.540.398.021,- mengalami peningkatan sebesar Rp19.673.183.430,- atau sebesar 139,20% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp14.132.785.409,-. Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 30 September 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.033.760.664,- mengalami penurunan sebesar Rp67.506.961.157,- dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.473.200.493,-. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas kepada pemasok pada periode 30 September 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.473.200.493,- mengalami peningkatan sebesar Rp21.501.993.815,- atau sebesar 2213,05% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp971.206.678,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain.

3.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		2021	31 Desember	
	2022	2021 ^{*)}		2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan penjualan aset tetap	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-
Perolehan aset tetap	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(108.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)

^{*) Tidak Diaudit}

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp10.209.302.549,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.716.356.063,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.492.946.486,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.605.585.464,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.664.164.604,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4.941.420.860,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.941.420.860,- mengalami penurunan sebesar Rp13.362.226.061,- dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.303.646.921,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya perolehan aset tetap.

3.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 ⁾	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan modal saham	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	(25.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak	(30.000.000.000)	-	-	-	-
Penurunan (kenaikan) pinjaman bank jangka pendek	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)
Penambahan dari utang bank jangka panjang	-	-	-	-	3.819.290.828
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201

⁾ Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 4.938.863.168,- mengalami penurunan sebesar Rp 42.277.629.618,- atau sebesar 113,22% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp37.338.766.450,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari pinjaman bank jangka pendek yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.992.917.889,- mengalami peningkatan sebesar Rp69.329.399.596,- atau sebesar 611,56% % dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp11.336.481.707,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penurunan pinjaman bank jangka pendek pada 31 Desember 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.336.481.707,- mengalami penurunan sebesar Rp24.144.920.908,- atau sebesar 188,51% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp12.808.439.201,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari penerimaan

atas modal disetor yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

3.4. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko bunga, kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Grup mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin individu mata uang. Perseroan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan Yuan dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Risiko Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup. Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas di mana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat memengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga bersifat terbatas karena Grup hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam beban bunga, keseimbangan optimal antara utang dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ditetapkan di muka.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Ban Luar
2. Ban Dalam

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022		
	Ban Luar	Ban Dalam	Jumlah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan Bersih	245.897.805.923	114.769.133.556	360.666.939.479
Beban Pokok Pejualan	(207.269.364.140)	(98.445.037.768)	(305.714.401.908)
Laba Kotor	38.628.441.783	16.324.095.788	54.952.537.571
Beban Penjualan	(14.156.689.456)	(3.374.126.899)	(17.530.816.355)
Beban Umum Dan Administrasi	(6.814.827.112)	(6.834.642.053)	(13.649.469.165)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(1.907.886.286)	(1.586.522.740)	(3.494.409.026)
Laba Usaha	15.749.038.929	4.528.804.096	20.277.843.025
Pendapatan Keuangan	31.958.375	20.188.659	52.147.034
Beban Keuangan	(1.571.449.537)	(1.775.246.131)	(3.346.695.668)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	14.209.547.767	2.773.746.623	16.983.294.390
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset			
Aset segmen	<u>245.754.478.541</u>	<u>148.983.874.329</u>	<u>394.738.352.870</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	131.915.478.394	81.670.553.307	213.586.031.701
INFORMASI LAINNYA			
Biaya perolehan aset tetap	143.544.354.374	45.310.342.077	188.854.696.451
Akumulasi penyusutan	50.504.948.808	30.697.700.703	81.202.649.511

^{*) Tidak Diaudit}

PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Grup Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga, sebagai berikut:

Perseroan

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJKTII/ XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 12.724 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 17.323 m2 yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 868 m2 yang berlokasi di Desa Nambo ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

UKL

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 16.088 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada UKL, UKL dengan seluruhnya seluas 8.750 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 1.669 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Asuransi Aset Tetap

Berdasarkan polis asuransi No. 0125012200142, 0125012200143, 0125012200144, 0125012200145, 0125012200146 dan 0125012200147, dengan obyek yang diasuransikan masing-masing berupa Persediaan, Bangunan, Mesin dan instalasinya, Mesin dan instalasi serta Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor telah diasuransikan oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan seluruhnya sebesar Rp 129.189.300.000 jangka waktu pertanggungan mulai tanggal April 2022 sampai April 2023.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Penetapan dan Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 102 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk Penetapan dan Pengangkatan kembali Komisaris dan Dewan Direksi, sebagai berikut :

Komisaris	:	Indra Muliawan
Direktur Utama	:	Harris Muliawan
Direktur	:	Hardi Muliawan

Akta ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH.01.09-0085780 tanggal 12 Desember 2022.

Penetapan dan Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 103 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas tata cara penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan serta persetujuan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham.
- Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perusahaan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 2020.

- c. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 50. Sehingga, susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Presentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Harris Muliawan	1.121.180.000	40,36%	56.059.000.000
PT Kingland Investindo			
Nusantara	1.100.000.000	39,60%	55.000.000.000
Indra Muliawan	554.340.000	19,95%	27.717.000.000
Hardi Muliawan	2.500.000	0,09%	125.000.000
Jumlah	<u>2.778.020.000</u>	100,00%	138.901.000.000

- Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 250.000.000.000 yang terbagi atas 5.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50 per lembar saham.
 - Modal ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau setara dengan 2.778.020.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 138.901.000.000.
- d. Meratifikasi persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 24 Juni 2022.
- e. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan Keputusan ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0090012.AH.01.03- 0324823 tanggal 12 Desember 2022.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 14 Desember 2022 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 143 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT King Tire Indonesia Tbk.
- Mela kukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 saham baru dan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Men tapkan Harris Muliawan sebagai pengendali Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt de charge) sepenuhnya kepada mereka serta mengangkat dewan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Muliawan
Komisaris	:	Hardi Muliawan
Komisaris Independen	:	Danny Setiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Harris Muliawan
Direktur	:	Ferry Chandra Kusuma
Direktur	:	Aneka Warna
Direktur	:	Habibullah

- h. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- i. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH. 01.09-0087022 dan AHU-AH.01.03-030326491 tanggal 15 Desember 2022.

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	:	Danny Setiawan
Anggota	:	Hardi Muliawan
Anggota	:	Indra Muliawan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Danny Setiawan
Anggota	:	Lindah
Anggota	:	Christina Wati

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 001/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Internal Audit dengan susunan sebagai berikut:

Audit Internal

Ketua	:	Widikdo
Anggota	:	Rikawati

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Diego Armando sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai No. 001/SPDSL/I XI/2022 tanggal 1 November 2022, PT United Kingland, Anak Perusahaan setuju untuk meminjamkan motor diesel kepada Perusahaan dengan masa pakai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025. Atas pemakaian tersebut tidak dikenakan biaya.

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas

51.675 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo illir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indra Muliawan. Komisaris. selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 28.120 m2. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/ X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indriana Angdrial selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 33.791 m2. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 004/PRJ-KTI/ X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, PT Lingga Djaja selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 83.965 m2 yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo illir. Cikande. Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Perjanjian Kredit Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.610/2022 tanggal 14 November 2022, Perusahaan mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Facilities KMK Revolving sublimit facilities L/C with maximum credit limit of Rp 25,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with interest rate 9% per annum which will fall due on 16 November 2023.
- Sublimit facilities L/C with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000 which is used for purchase of raw materials and will fall due on 16 November 2023.
- Facilities Treasury Line with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/1482/2022 tanggal 24 November 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan lunas atas pinjaman kredit investasi.

UKL

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.611/2022 tanggal 14 November 2022. PT United Kingland, Entitas Anak, mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Facilities KMK Revolving sublimit facilities L/C with maximum credit limit of bRp 30,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with interest rate 9% per annum which will fall due on 16 November 2023.
- Sublimit facilities L/C with maximum credit limit of AS\$ 600,000 which is used for purchase of raw materials and will fall due on 17 November 2023.
- Facilities Treasury Line with maximum credit limit of AS\$ 1,000,000.

KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Until the Prospectus is issued, the spread of the Covid-19 virus in the world including Indonesia causes uncertainty in the macroeconomy related to the volatility of the value of foreign exchange rates, prices, and demand. In the future, developments can change because of market changes, the level of supply or other situations outside the Group's control. An increase in the number of Covid-19 infections

19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup Perseroan. Perseroan akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila Perseroan tidak bisa beradaptasi, Perseroan akan mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangannya.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan memasarkan produknya hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, yang telah mencakup ke 16 Provinsi dari 37 Provinsi di Indonesia. Dalam memasarkan produknya, Perseroan menghadapi tantangan baik dari pemain-pemain nasional yang telah lama dan besar di Industri, maupun dari pemain internasional yang melakukan ekspor ke Indonesia. Persaingan dari segi harga, kualitas dan desain produk, serta lead-time produksi merupakan faktor risiko persaingan usaha yang harus menjadi pertimbangan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan kompetensi dalam memenangkan persaingan usaha, dapat berimbas pada penurunan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Atas Perubahan Teknologi

Dalam proses pengolahan bahan baku dan produksi ban yang Sebagian besar menggunakan tenaga mesin, maka sangat penting bagi Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan mesin yang memiliki spesifikasi dan teknologi lama, maka terdapat risiko bahwa kualitas dan kuantitas produksi ban, tidak akan sebaik dan se-efisien mesin dengan teknologi terbaru, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kurang kompeten-nya Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha.

2. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Industri ban merupakan industri padat karya, dimana Perseroan mempekerjakan ratusan hingga ribuan buruh outsourcing dalam membantu pengoperasian mesin dan proses produksi. Selain itu dengan beroperasinya pabrik secara terus menerus, serta adanya limbah, maka terdapat kemungkinan adanya gangguan sosial kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut berisiko menimbulkan gejolak sosial dan masalah ketenagakerjaan, apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dengan masyarakat sekitar mengenai dampak dari pencemaran udara, suara, atau air, serta adanya tuntutan pekerja melalui aksi pemogokan kerja dan unjuk rasa. Ketidakmampuan Perseroan menjaga kondusifitas iklim sosial dan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Bahan Baku dan Pemasok

Bahan baku utama produk ban Perseroan antara lain karet alam, karet sintetis, carbon black dan berbagai macam bahan kimia yang berasal dari turunan produk minyak mentah. Dalam hal ini terdapat risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (lead time) dari Perseroan. Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan Perseroan.

Penggunaan bahan baku mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Apabila pemasok Perseroan gagal menyediakan bahan baku dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat. Perseroan mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Perseroan menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan. Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan. Selain itu, harga pasar untuk bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurs nilai tukar mata uang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat membebani Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan non-single supplier, dengan rata-rata minimal ada 2 pemasok sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Selain itu untuk mengantisipasi pasokan bahan baku yang membutuhkan waktu yang relatif lama, maka Perseroan menyediakan secara cukup persediaan bahan baku menyesuaikan dengan waktu lama pengiriman untuk masing-masing pemasok.

4. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi

Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

5. Risiko Hambatan dan Gangguan Produksi

Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Beberapa transaksi Perseroan dilakukan dalam mata uang asing, terutama dalam Dolar Amerika Serikat (USD), seperti penjualan ekspor dan beberapa pembelian bahan baku. Dalam hal ini Perseroan mengalami risiko Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang asing, terutama USD, dapat mempengaruhi pendapatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domesik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruh karena Perseroan bekerjasama dengan prinsipal-prinsipal merek yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pengaruh perubahan kondisi perekonomian negara asal prinsipal merek akan mempengaruhi kinerjanya dan akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Melemahnya perekonomian global yang signifikan termasuk perekonomian Indonesia, akan mempengaruhi Perseroan baik dalam mendapatkan produk dari prinsipal merek maupun melakukan distribusi dan penjualan kepada konsumen. Tidak stabilnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi daya beli konsumen sehingga intensitas penjualan dan distribusi produk oleh Perseroan berubah. Daya beli konsumen yang menurun dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/ hasil produksi serta menurunnya permintaan barang konsumsi, pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas produk ban Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur industri ban, terus berupaya meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi baik pada pelaku di industri hulu maupun hilir. Kebijakan tersebut utamanya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri tekstil nasional untuk terus bertumbuh dan dapat menghadapi gencarnya serangan produk impor. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan industri ban, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Atas Ketentuan Negara Lain

Mengingat sebagian dari hasil produksi Perseroan dipasarkan ke luar negeri, maka Perseroan akan ketergantungan pada risiko kebijakan import dari negara lain. Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk tekstil, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Hukum

Kegiatan bisnis Perseroan mempunyai resiko hukum dan perizinan yang berkaitan dengan tuntutan hukum, gagal mendapatkan atau memperbaharui izin maupun lisensi untuk keberlangsungan bisnis Perseroan. Lisensi dan izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk operasi bisnis Perseroan mencakup izin tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan tanah dan izin lainnya. Izin tersebut memiliki batas waktu dan Perseroan harus memperbaharui seluruh izin dan lisensi yang telah berakhir. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah akan mengeluarkan atau memperbaharui izin dan pengabsahan yang diperlukan. Kehilangan atau kegagalan dalam mendapatkan atau memperbaharui perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk operasi Perseroan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan. Perseroan akan selalusecara proaktif mengikuti dan memperhatikan setiap perubahan peraturan perundang-undangan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Harga Saham Dapat Berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

2. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham di Bursa

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena minimnya aktivitas transaksi perdagangan saham Perseroan, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk aktivitas perdagangan di Bursa secara keseluruhan, preferensi investor terhadap saham Perseroan dibandingkan dengan saham-saham perusahaan tercatat lainnya, hingga terbatasnya jumlah saham yang ditawarkan. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

4. Risiko Aksi Korporasi

Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan kinerja di masa yang akan datang.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 28 Februari 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Morhan dan Rekan, anggota Allinial Global dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan Audit untuk tahun yang berakhir 30 September 2022 serta 31 Desember 2021 ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023. Serta 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan Audit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ditandatangani oleh Akuntan Publik Drs. Zainal Abidin Wirahadireja dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0311.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000,- terbagi atas 2.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp500.000.000,- terbagi atas 500 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- / saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Harris Muliawan	125	125.000.000	25,00
Indra Muliawan	250	250.000.000	50,00
Hardi Muliawan	125	125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Penyetoran modal para pemegang saham pada saat Perseroan didirikan, dilakukan dengan uang tunai sebagaimana termaktub pada dalam Pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setoran modal Harris Muliawan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010;
- 2) Setoran modal Indra Muliawan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010; dan
- 3) Setoran modal Hardi Muliawan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dibuktikan berdasarkan kwitansi bermeterai cukup tertanggal 27 Agustus 2010.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 143 Tahun 2022").

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan dengan suara menyetujui dan memutuskan:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT. Bursa Efek Indonesia;
- 2) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT KING TIRE INDONESIA Tbk;
- 3) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- 4) Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;
- 5) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- 6) Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
- 7) Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/2021, pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan Harris Muliawan sebagai pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 8) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal Keputusan ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Harris Muliawan
Direktur	: Ferry Candra Kusuma
Direktur	: Aneka Warna
Direktur	: Habibullah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Muliawan
Komisaris : Hardi Muliawan
Komisaris Independen : Danny Setiawan

- 9) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan;
- 10) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- 11) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. King Tire Indonesia No. 103 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia tanggal 12 Desember 2022, dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324823 tanggal 12 Desember 2022, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0249709.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043982 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 103 Tahun 2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp.138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu :

- a. Kegiatan Usaha Utama
Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (Kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - (a) Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (Kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor*, *fan belt*, *engine mounting*, *lining* dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. *Seal*/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet;
 - (b) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

- (c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 14 Tahun 2019, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan sejumlah 67.901 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.901.000.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) yang merupakan setoran terdahulu dan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp83.901.000.000,- terbagi atas 83.901 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp83.901.000.000,- terbagi atas 83.901 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	83.901	83.901.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	56.059	56.059.000.000	66,82
Indra Muliawan	27.717	27.717.000.000	33,04
Hardi Muliawan	125	125.000.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.901	83.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan dalam Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan dalam Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. King Tire Indonesia No. 75 tanggal 28 Juni 2022 dibuat di hadapan Dewi Octaria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0045063.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia tanggal 30 Juni 2022, telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.03-0258906 tanggal 30 Juni 2022, dan telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.09-0028058 tanggal 30 Juni 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0124539.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022. ("Akta No. 75 Tahun 2022"), para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan modal disetor Perseroan yang semula Rp. 83.901.000.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) menjadi Rp. 138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham.

Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut, Perseroan telah menyetujui masuknya PT Kingland Investindo Nusantara sebagai pemegang saham baru dengan jumlah saham sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal sejumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dan telah diambil bagian dan disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan sejumlah 138.901 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 138.901 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	56.059	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	27.717	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	125	125.000.000	0,09
PT Kingland Investindo Nusantara	55.000	55.000.000.000	39,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	138.901	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	111.099	111.099.000.000	

Berdasarkan Akta No. 103 Tahun 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham Perseroan, dari Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp138.901.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) terbagi atas 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	55.000.000.000	39,60
Harris Muliawan	1.121.180.000	56.059.000.000	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	27.717.000.000	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	125.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	138.901.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.221.980.000	111.099.000.000	

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Harris Muliawan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagaimana diuraikan berikut ini:

Izin Terkait Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") Perseroan

NPWP Perseroan adalah 31.229.435.8-401.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang.

b. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Perseroan

Perseroan telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten KPP Madya Tangerang berdasarkan SKT Nomor: S-188KT/WPJ.08/KP.0703/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan terdaftar sejak 1 Oktober 2018.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") Perseroan

Perseroan telah dikukuhkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP Nomor: PEM-01294/WPJ.08/KP.0103/2011 tanggal 6 Juni 2011.

Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat CQ Lembaga OSS

A. Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("NIB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan No. 8120219093014 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana perubahan ke-4 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama KBLI	Kode KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
				Jenis	Legalitas
Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	22111	Jl. Raya Serang Km. 68, Kel. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42185	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
				Sertifikat Standar belum Terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
				Sertifikat Standar telah Terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB Perseroan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

B. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L")

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha

Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan Perseroan bersedia untuk:

- a) Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut:
 - (a) Persyaratan:
 - 1) Berlokasi di Kawasan Industri atau kawasan Peruntukan Industri;
 - 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
 - (b) Kewajiban:
 - 1) Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
 - 2) Memenuhi Standar Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
 - 3) Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 4) Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - 5) Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
 - 6) Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- b) Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
- c) Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

D. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")

Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan kesanggupan Perseroan untuk:

- a) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;

- b) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- d) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- e) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- f) Bersedia memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- g) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h) Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
- i) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.

E. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PKPLH”)

Perseroan telah memiliki PKPLH yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang telah ditandatangani secara elektronik tanggal 22 Oktober 2021 oleh Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB Perseroan, yang menyatakan kesanggupan Perseroan untuk:

- a) Memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL;
- b) Memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
 - 1) pemenuhan baku mutu air limbah;
 - 2) pemenuhan baku mutu emisi;
 - 3) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4) analisis mengenai dampak lalu lintas.
- c) Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- d) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
- e) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- g) Mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- h) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- j) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan;
- k) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- l) Menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor Induk Kepabeanan ("NIK")

Perseroan telah memperoleh NIB sebagai bukti pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), dengan No. 8120219093014 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana perubahan ke-7 tanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam.	Jl. Raya Serang Km. 68, Kel. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten.	NIB dan Izin Usaha.

Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB Perseroan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan Oleh Kementerian Perindustrian

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

Perseroan telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ("SPPT SNI") No. JPA 009 078 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk LSPRO - Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) Jogja Product Assurance Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2021 dengan sertifikat awal tanggal 24 Juni 2013 No. Ref. 74/JPA/13, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis Produk : Ban Sepeda Motor
- Tipe : Bias
- Merk : Kingland
- Standar Produk : SNI 0101:2012
- Sistem Sertifikasi Produk : Tipe 5

Berdasarkan SPPT SNI, Perseroan diberikan hak untuk menggunakan logo LSPRO - BBKKP JPA dan tanda SNI pada produk.

SPPT SNI Perseroan berlaku hingga tanggal 18 Juli 2025.

2. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Sesuai Dengan ISO SNI 9001 : 2015

Perseroan telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO SNI 9001 : 2015 No. YQ 005 164 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Balai Besar Kulit Karet dan Plastik - YOQA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2022 dengan sertifikat awal tertanggal 29 April 2013 No. Reg. 13/218, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup : Proses produksi ban sepeda motor
- Kode EA : (14) Produk karet dan produksi plastik
- Kode NACE : C.22.1.1 Pembuatan ban dan ban dalam karet; ban karet vulkanisir dan ban karet yang dibuat ulang

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO SNI 9001 : 2015 berlaku hingga 15 September 2025.

Dikeluarkan Oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Sertifikat Laik Operasi Instalasi Listrik

Perseroan telah memenuhi persyaratan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan Sertifikat Laik Operasi No. 515.O.P.DJ.315.3604.22 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian untuk instalasi-instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan laik operasi, dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2032.

Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah

1. Izin Usaha

Perseroan telah memiliki Izin Usaha penanaman modal dalam negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten No. 05/36/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 20 April 2012.

2. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") Perseroan

Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan, dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Serang No. 647/SK.1491/SIMB/DTRBP/2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bidang Usaha Industri Ban Luar Sepeda Motor Lokasi Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Untuk dan Atas Nama Perseroan tertanggal 6 Oktober 2011.

3. Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan, dan Perumahan Pemerintah Kabupaten Serang No. 647/SK.1491/SIMB/DTRBP/2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bidang Usaha Industri Ban Luar Sepeda Motor Lokasi Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Untuk dan Atas Nama Perseroan tertanggal 6 Oktober 2011. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") Perseroan.

Perseroan telah memiliki PBG yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-PBG-360416-04102022-002 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 4 Oktober 2022, yang mulai berlaku pada 4 Oktober 2022.

Perseroan telah memiliki PBG yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-PBG-360416-04102022-001 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 4 Oktober 2022 yang mulai berlaku pada 4 Oktober 2022.

4. Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") Perseroan

Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-005 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-003 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-004 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Perseroan telah memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan No. SK-SLF-360416-22092022-001 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 22 September 2022. SLF Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL")

Perseroan telah memiliki UKL-UPL berdasarkan Surat Persetujuan UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang No. 666.1/II/Penceg./DLH/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk kegiatan/usaha Industri Ban Luar (Rencana Penambahan Bangunan) yang berlokasi di Jl. Raya Serang-Kampung Citawa Lebak, Desa Tambak dan Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir

Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Instalasi Penyalur Petir berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir No. 560/31-DTKT/K3-IPP/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat bulan Maret 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat Angkut

(a) Forklift

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Forklift berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Forklift No. 1355/PAA/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Forklift, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

(b) Electric Chain Hoist

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 *Electric Chain Hoist* berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian *Electric Chain Hoist* No. 1354/PAA/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian *Electric Chain Hoist*, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Tekanan

(a) Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm²

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm² berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm² No. 033/KU/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Ketel Uap (Boiler) 20.000 Kg/Cm², Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

(b) Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2

Perseroan telah memenuhi persyaratan K3 Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2 berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2 No. 032/KU/K3/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Ketel Uap (Boiler) 10.000 Kg/Cm2, Perseroan telah memenuhi persyaratan K3, dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya paling lambat tanggal 6 Juni 2023.

Sertifikasi

1. Lisensi K3 Forklift

(a) Perseroan telah memiliki karyawan yang berlisensi K3 Forklift Kelas 2 dengan No. Register 0246090822/A-OFK2/36/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 9 Agustus 2022, atas nama Basri.

Lisensi K3 atas nama Basri berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2027.

Sehubungan Dengan Ketenagakerjaan

1. Kepesertaan Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 1300000014920 tanggal 14 November 2018, Nomor Kendali: 2017 - 051233 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Sertifikat tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh BPJS, dinyatakan bahwa Perseroan telah ikut serta dalam program jaminan kesehatan - BPJS Kesehatan dengan Nomor Entitas: 02220898.

2. Pemenuhan Upah Minimum

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 24 Februari 2023, dinyatakan dan ditegaskan bahwa upah yang dibayarkan Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Banten No. 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 4.492.561,28 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah koma dua puluh delapan sen) per bulan, sebagaimana ternyata dalam bukti pembayaran gaji (slip gaji) 2 (dua) karyawan Perseroan dengan gaji paling rendah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Bulan	Jumlah Gaji
1.	A. Iyong B. Djudin	Transportasi	Desember 2022	Rp. 4.215.200,-
			Januari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Februari 2023	Rp. 4.493.000,-
2	Tatang	Mekanik	Desember 2022	Rp. 4.215.200,-
			Januari 2023	Rp. 4.493.000,-
			Februari 2023	Rp. 4.493.000,-

3. Perjanjian Kerja Bersama Perseroan

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang melalui Surat Keputusan Nomor: 560/1403/SK-PKB/2021 tentang Pendaftaran PKB antara Perseroan dengan Pimpinan Unit Kerja - Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Perseroan ("PKB") tanggal 22 November 2021. PKB Perseroan mulai berlaku sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2023.

4. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan ("WLKP") Perseroan

Perseroan telah melakukan WLKP secara *online* pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor Pelaporan: 42185.20230202.0001. Perseroan wajib melaporkan kembali WLKP secara *online* pada tanggal 2 Februari 2024. Adapun isi WLKP *Online* Perseroan adalah sebagai berikut:

Status Permodalan: PMDN
Waktu Kerja Normal : 8 jam/hari dan 40 jam/minggu Waktu Kerja Sektor Pertambangan : - Waktu Kerja Sektor ESDM: - Waktu Kerja Sektor Perikanan:-
Limbah Produksi a. Instalasi Pengelola Limbah : Tidak b. Pihak Ketiga : Tidak
Pengupahan a. Tingkat upah tertinggi: Rp. 0 b. Tingkat upah terendah: 0
Fasilitas Perusahaan a. Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Pelayanan Kesehatan dan Kotak P3K b. Fasilitas Kesejahteraan: fasilitas ibadah, kantin/catering, dan ruang merokok
BPJS Ketenagakerjaan a. Nomor Pendaftaran : KK052554 b. Program JKK : 307 Pekerja c. Program JHT : 307 Pekerja d. Program JKM : 307 Pekerja e. Program JP : 307 Pekerja f. Program Jaminan Kesehatan : 270 Pekerja
Perangkat Hubungan Industrial - Perangkat Hubungan Kerja : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sudah mempunyai perencanaan tenaga kerja : tidak Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang : 0 Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang : -
Pekerja 12 Bulan Terakhir Jumlah : 434 orang L : 411 orang P : 23 orang
Jumlah Penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir: 434 orang Jumlah Pekerja Berhenti selama 12 bulan terakhir: 0 orang
Program Pelatihan Bagi Pekerja : Ada Program Pemagangan : Ada

5. Lembaga Kerjasama Bipartit

Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit dengan No. Pencatatan 10/LKS-BIPARTIT-PT.KTI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan kepengurusan anggotanya telah mendapat Pencatatan Kepengurusan Anggota sebagaimana berdasarkan Surat Pencatatan Kepengurusan Anggota LKS Bipartit No. 250/1240/HI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN KREDIT

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
1	Perjanjian Kredit Antara Perseroan Dengan PT. Bank Mandiri Tbk. Perjanjian Kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit Modal Kerja No. DO.JKO/0250/KMK/2015 No. 12 tanggal 17 November 2015, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 16 November 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 06 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 5 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2021; (viii) Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (ix) Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 15 November 2022, oleh dan antara Perseroan selaku penerima fasilitas kredit	Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan-Mandiri, dengan limit kredit sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) termasuk Sublimit Fasilitas <i>Letter of Credit</i> sebesar USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat), dengan jenis, sifat, dan tujuan sebagai berikut: Jenis kredit adalah Kredit Modal Kerja dengan <i>Sublimit Letter of Credit</i>; Fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan-Mandiri bersifat <i>Revolving</i>, sehingga dalam hal Perseroan telah membayar hutang pokok atau sebagian daripadanya maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh Perseroan; Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan-Mandiri dibuat oleh Perseroan dan Mandiri sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan dalam rangka tambahan modal kerja untuk industri ban luar kendaraan roda dua (sepeda motor dan sepeda).	Atas fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dibayar efektif setiap bulan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri perubahan tersebut mengikat Perseroan maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis. sebelumnya.	Jangka waktu fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan-Mandiri adalah sampai dengan tanggal 16 November 2023.	Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. – Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi, kecuali dalam hal Perseroan telah melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen. 2) Menyerahkan copy persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
	modal kerja dengan PT. Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") selaku pemberi fasilitas kredit modal kerja ("Perjanjian Kredit Modal Kerja Perseroan-Mandiri") <i>juncto</i> Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Mandiri tanggal 17 November 2015, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Mandiri ("SKU Fasilitas Kredit Modal Kerja")				(RUPS) dilaksanakan. 3) Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4) Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang telah diatur dalam berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan. – Memindah-tangankan barang Agunan kecuali untuk transaksi dagang/usaha yang wajar. – Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan. – Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. – Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. – Melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham. – Menambah pinjaman dari kreditur lain yang menambah resiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. – Melunasi hutang sebagian atau seluruh hutang pemegang saham selama Fasilitas Kredit belum lunas.

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					– Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain. – Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual dibawah harga pasar; – Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru. – Menjual asset, mengadakan atau memanggil RUPS Tahunan atau RUPS dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemin dahan saham; Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT King Tire Indonesia: – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. Perubahan tersebut dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					tertulis kepada Mandiri apabila: 1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan; 2) Perubahan pemegang saham tanpa mengubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga (Indra Muliawan dan Hardi Muliawan); 3) Terkait perubahan pengurus Perseroan. Khusus perubahan yang dituangkan dalam Akta Notaris, dengan menyampaikan Akta Notaris perubahan-perubahan tersebut berikut Surat Keputusan/Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal akta perubahan. – Melakukan merger dan akuisisi. Untuk emisi saham termasuk dalam rangka proses yang berkaitan dengan <i>initial public offering</i> (IPO) Perseroan, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak emisi saham dilakukan.
2	Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 No. 08 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Jasa Pelayanan	Mandiri setuju untuk memberikan Fasilitas <i>Treasury Line</i> kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> Perseroan-Mandiri, dengan limit sebesar	-	Jangka waktu Fasilitas <i>Treasury Line</i> dalam Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> Perseroan-Mandiri adalah sampai dengan tanggal 16 November 2023.	Selama Perjanjian <i>Treasury Line</i> Perseroan-Bank Mandiri belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
	<i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 12 November 2020; dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 15 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; oleh dan antara Perseroan selaku penerima kredit dengan Mandiri selaku pemberi kredit ("Perjanjian Jasa Pelayanan <i>Treasury Line</i> Perseroan-Mandiri") <i>juncto</i> Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Mandiri tanggal 17 November 2015, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Mandiri	USD.1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat).			– Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. – Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi, kecuali dalam hal Perseroan telah melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Mandiri mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen. 2) Menyerahkan copy persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan. 3) Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4) Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang telah diatur dalam berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan. – Memindah-tangankan barang Agunan kecuali

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					untuk transaksi dagang/usaha yang wajar. – Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan. – Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar. – Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. – Melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham. – Menambah pinjaman dari kreditur lain yang menambah resiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. – Melunasi hutang sebagian atau seluruh hutang pemegang saham selama Fasilitas Kredit belum lunas. – Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain. – Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					pasar atau menjual dibawah harga pasar; – Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru. – Menjual asset, mengadakan atau memanggil RUPS Tahunan atau RUPS dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemin dahan saham; Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/1518/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Penjelasan Negative Covenant : (1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan; (2) Perubahan pemegang saham tanpa merubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga; (3) Terkait perubahan pengurus. Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT King Tire Indonesia: – Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. Perubahan

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					tersebut dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri apabila: 1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan; 2) Perubahan pemegang saham tanpa mengubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga (Indra Muliawan dan Hardi Muliawan); 3) Terkait perubahan pengurus Perseroan. Khusus perubahan yang dituangkan dalam Akta Notaris, dengan menyampaikan Akta Notaris perubahan-perubahan tersebut berikut Surat Keputusan/Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal akta perubahan. Melakukan merger dan akuisisi. Untuk emisi saham termasuk dalam rangka proses yang berkaitan dengan <i>initial public offering</i> (IPO) Perseroan, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak emisi saham dilakukan.
3	Perjanjian Kredit Antara Perseroan Dengan Citibank, N.A Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No. MCFA/000533/KTI/10022020 tertanggal 23 Maret 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan Citibank, N.A selaku Kreditur ("Perjanjian	Citibank, N.A ("Citibank") menyetujui untuk memberikan fasilitas-fasilitas kredit secara berulang (revolving) kepada Perseroan sampai dengan jumlah total awal sebesar USD 5.000.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa	-	Jangka waktu Perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika Citybank memberikan pemberitahuan kepada	Perseroan, tanpa persetujuan sebelumnya dari Citibank, tidak akan: 1) mengadakan percampuran, pemisahan, penggabungan, peleburan atau rekonstruksi korporasi;

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
	Induk Kredit Perseroan-Citibank")	keseluruhan jumlah pokok dari pinjaman-pinjaman yang ditarik dan terulang berdasarkan fasilitas tersebut pada setiap saat tidak boleh melebihi jumlah total fasilitas.		Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum akhir dari jangka waktu yang sedang berjalan pada saat itu bahwa fasilitas akan dibatalkan dan jangka waktu tersebut akan berakhir.	2) mengambilalih suatu perusahaan, usaha atau asset; 3) menjual, menyewakan, mentransfer atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian yang substansial dari asetnya. – Perseroan akan memastikan bahwa tidak ada perubahan pada (para) pemegang saham pengendalinya (sejak tanggal Perjanjian Kredit Perseroan-Citibank) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citibank. – Perseroan akan segera memberitahu Citibank secara tertulis mengenai setiap perubahan pemegang saham selain dari perubahan pada pemegang saham pengendalinya – Perseroan tidak akan memberikan penjaminan atau ganti kerugian apapun (kecuali disyaratkan oleh Perjanjian Kredit Perseroan-Citibank) kepada atau untuk kepentingan pihak manapun atau secara sukarela mengambil liabilitas, baik yang aktual maupun bersyarat, sehubungan dengan kewajiban apapun dari pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank. Berdasarkan Surat Citibank No. CCBSME/JKT/202211 30/KTI/0000550913/00 01 tanggal 30 November 2022:

No.	Perjanjian	Objek	Bunga	Jangka Waktu	Negative Covenant
					Sehubungan dengan rencana Perseroan menjadi perusahaan publik, dimana 20,13% saham akan dimiliki oleh masyarakat, maka perubahan kepemilikan saham masyarakat tersebut tidak perlu diberitahukan kepada Citibank. Akan tetapi jika perubahan kepemilikan yang terjadi di luar saham publik, maka harus mendapat persetujuan tertulis Citibank.

4.2 PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

A. Polis Asuransi

1. PT Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk. ("Maximus")

No. Polis.	:	0125012200142
Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (huru-hara) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 30.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 23.820.000,-
Klausul Bank	:	Banker's Clauses PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

2. Maximus

No. Polis.	:	0125012200143
Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023

Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 6.043.600.000,-
Premi	:	Rp. 6.442.041,60
Klausul Bank	:	Banker's Clauses PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

3. Maximus

No. Polis.	:	0125012200144
Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 5.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 5.340.000,-
Klausul Bank	:	Banker's Clauses PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

4. Maximus

No. Polis.	:	0125012200145

Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 8.495.700.000,-
Premi	:	Rp. 9.031.459,20
Klausul Bank	:	Banker's Clauses PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

5. Maximus

No. Polis.	:	0125012200146
Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	11 April 2022 – 11 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis) atas Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (Kerusuhan Sipil) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 59.650.000.000,-
Premi	:	Rp. 63.050.400,-
Klausul Bank	:	Banker's Clauses PT Bank Mandiri, Tbk
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

B. Polis Asuransi Citibank

1. Maximus

No. Polis.	:	0125012200147
Penanggung	:	Maximus
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	30 April 2022 – 30 April 2023
Jenis Asuransi	:	Industrial All Risk
Resiko Ditanggung/Coverage	:	Segala Resiko Kerugian Fisik atau Kerusakan pada harta benda Perseroan dari sebab apapun (tunduk pada Pengecualian Polis)
Resiko Sendiri/Deductible	:	- Fire (Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang), Smoke (Asap) yaitu 5 % dari Klaim atau 0,1 % dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian - Lainnya yaitu Rp. 1.000.000,- untuk setiap kejadian - Riot, (Kerusuhan), Strike (Pemogokan) Malicious Damage (Perbuatan Jahat) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian - Civil Commotion (huru-hara) yaitu 10 % dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,- untuk setiap kejadian
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 20.000.000.000,-
Premi	:	Rp. 20.820.000,-
Klausul Bank	:	Harta benda yang diasuransikan oleh polis ini telah digadaikan dengan Citibank dan sebagai akibatnya, telah disepakati dengan Citibank dan Perseroan, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, pembayaran apapun berdasarkan polis harus dibayar sampai jumlah pokok yang menjadi hak Citibank tersebut, bunga yang diperoleh dan biaya-biaya harus dibebankan kepada Citibank tersebut tanpa mengurangi hak-hak yang mungkin dimiliki Perseroan atas selisihnya. Ketentuan di atas menjadi batal demi hukum setelah menerima saran dari Citibank tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik dengan harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis.
Objek Pertanggungan	:	Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor Jl. Raya Serang Km. 68 Cikande, Serang, Banten

C. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Lainnya Yang Material Yang Diperlukan Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama Pengolahan (Pengangkutan dan Pemanfaatan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 030/PKPLB3/KTI-BNNI/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT. Bendi Nasha Niaga Industri ("Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-BNNI")	Maksud dan tujuan Perseroan dan PT. Bendi Nasha Niaga Industri ("BNNI") mengadakan dan membuat Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash, sebagai wujud penanganan Limbah B3 di Perseroan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dan BNNI sepakat untuk mengadakan kerjasama pengelolaan Fly ash, Bottom Ash, berupa kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan berdasarkan izin sebagai berikut: - Izin Tempat Penyimpanan Sementara dimiliki Perseroan; - Izin Pengangkutan dimiliki BNNI.	Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Perseroan-BNNI berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan BNNI.

D. Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Distributor

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
1	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 008/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Buanamas Makmur Persada ("BMP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-BMP")	Perseroan dengan ini menunjuk BMP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan BMP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-BMP. BMP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-BMP tidak menjadikan BMP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan BMP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. BMP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. BMP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk BMP dan apabila ditemukan bahwa BMP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-BMP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh BMP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-BMP.
2	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 010/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Aki Kita ("AKI") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-AKI")	Perseroan dengan ini menunjuk AKI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan AKI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-AKI. AKI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-AKI tidak menjadikan AKI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan AKI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. AKI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. AKI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk AKI dan apabila ditemukan bahwa AKI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. AKI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh AKI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-AKI. Perjanjian SK Distributor Perseroan-AKI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau AKI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-AKI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI, maka Perseroan atau AKI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau AKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-AKI.

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		Distributor Perseroan-AKI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-AKI.	
3	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 016/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Jaya Anugerah Perkasa (" JAP ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-JAP")	Perseroan dengan ini menunjuk JAP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan JAP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-JAP. JAP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-JAP tidak menjadikan JAP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan JAP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. JAP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. JAP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk JAP dan apabila ditemukan bahwa JAP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. JAP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-JAP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-JAP.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh JAP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-JAP. Perjanjian SK Distributor Perseroan-JAP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau JAP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-JAP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP, maka Perseroan atau JAP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau JAP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-JAP.
4	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 002/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Unitama Nusa Raya (" UNR ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-UNR")	Perseroan dengan ini menunjuk UNR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan UNR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-UNR. UNR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-UNR tidak menjadikan UNR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan UNR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. UNR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh UNR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-UNR. Perjanjian SK Distributor Perseroan-UNR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau UNR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-UNR sebelum berakhir

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		UNR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk UNR dan apabila ditemukan bahwa UNR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. UNR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-UNR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-UNR.	jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR, maka Perseroan atau UNR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau UNR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-UNR.
5	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 015/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. San Star ("STAR") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-STAR")	Perseroan dengan ini menunjuk STAR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan STAR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-STAR. STAR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-STAR tidak menjadikan STAR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan STAR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. STAR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. STAR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk STAR dan apabila ditemukan bahwa STAR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. STAR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-STAR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-STAR.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh STAR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-STAR. Perjanjian SK Distributor Perseroan-STAR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau STAR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-STAR sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR, maka Perseroan atau STAR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau STAR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-STAR.
6	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 005/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Dwi Mulia Bersaudara ("DMB") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-DMB")	Perseroan dengan ini menunjuk DMB untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan DMB dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-DMB. DMB dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-DMB tidak menjadikan DMB	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh DMB kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan DMB tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. DMB apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. DMB tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk DMB dan apabila ditemukan bahwa DMB menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. DMB setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-DMB dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-DMB.	sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-DMB. Perjanjian SK Distributor Perseroan-DMB, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau DMB hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-DMB sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB, maka Perseroan atau DMB harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau DMB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-DMB.
7	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 013/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Cahaya Eco Indonesia ("CEI") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-CEI")	Perseroan dengan ini menunjuk CEI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan CEI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-CEI. CEI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-CEI tidak menjadikan CEI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan CEI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. CEI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. CEI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk CEI dan apabila ditemukan bahwa CEI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. CEI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-CEI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-CEI.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh CEI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-CEI. Perjanjian SK Distributor Perseroan-CEI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau CEI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-CEI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI, maka Perseroan atau CEI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau CEI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-CEI.

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
8	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 003/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Multi Star Anugrah ("MSA") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-MSA")	Perseroan dengan ini menunjuk MSA untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan MSA dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-MSA. MSA dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-MSA tidak menjadikan MSA sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan MSA tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. MSA apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. MSA tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk MSA dan apabila ditemukan bahwa MSA menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan. MSA setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-MSA dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-MSA.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh MSA kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-MSA. Perjanjian SK Distributor Perseroan-MSA, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau MSA hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-MSA sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA, maka Perseroan atau MSA harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau MSA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-MSA.
9	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 011/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Pratama Inti Distribusindo ("PIDI") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-PIDI")	Perseroan dengan ini menunjuk PIDI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan PIDI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-PIDI. PIDI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-PIDI tidak menjadikan PIDI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan PIDI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. PIDI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. PIDI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk PIDI dan apabila ditemukan bahwa	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh PIDI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-PIDI. Perjanjian SK Distributor Perseroan-PIDI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau PIDI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-PIDI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI, maka Perseroan atau PIDI harus memberitahukan

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		PIDI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. PIDI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-PIDI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-PIDI.	secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau PIDI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-PIDI.
10	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 006/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan PT. Mitra Putera Abadi ("MPA") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-MPA")	Perseroan dengan ini menunjuk MPA untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan MPA dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-MPA. MPA dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-MPA tidak menjadikan MPA sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan MPA tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. MPA apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. MPA tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk MPA dan apabila ditemukan bahwa MPA menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. MPA setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-MPA dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-MPA.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh MPA kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-MPA. Perjanjian SK Distributor Perseroan-MPA, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau MPA hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-MPA sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA, maka Perseroan atau MPA harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau MPA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-MPA.
11	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 017/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan oleh Perseroan dengan CV. Trimitra Maju Sejahtera ("TMS") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-TMS")	Perseroan dengan ini menunjuk TMS untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan TMS dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-TMS. TMS dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-TMS tidak menjadikan TMS sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan TMS tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh TMS kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-TMS.

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. TMS apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. TMS tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk TMS dan apabila ditemukan bahwa TMS menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. TMS setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-TMS dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-TMS.	Perjanjian SK Distributor Perseroan-TMS, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau TMS hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-TMS sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS, maka Perseroan atau TMS harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau TMS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-TMS.
12.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 004/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PD Indo Kita Makmur ("IKM") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan- IKM ")	Perseroan dengan ini menunjuk IKM untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan IKM dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-IKM. IKM dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-IKM tidak menjadikan IKM sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan IKM tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. IKM apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. IKM tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk IKM dan apabila ditemukan bahwa IKM menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. IKM setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-IKM dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-IKM.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh IKM kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-IKM. Perjanjian SK Distributor Perseroan-IKM, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau IKM hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-IKM sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM, maka Perseroan atau IKM harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau IKM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-IKM.
13.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 009/II/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Jasa Barutama	Perseroan dengan ini menunjuk JBP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan JBP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-JBP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
	Perkasa ("JBP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-JBP")	distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-JBP. JBP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-JBP tidak menjadikan JBP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan JBP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. JBP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. JBP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk JBP dan apabila ditemukan bahwa JBP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan. JBP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-JBP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-JBP.	perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh JBP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-JBP. Perjanjian SK Distributor Perseroan-JBP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau JBP hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-JBP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-JBP, maka Perseroan atau JBP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau JBP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-JBP.
14.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 019/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Motorindo Sejahtera ("CMS") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-CMS")	Perseroan dengan ini menunjuk CMS untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan CMS dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-CMS. CMS dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-CMS tidak menjadikan CMS sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan CMS tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. CMS apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. CMS tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk CMS dan apabila ditemukan bahwa CMS menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran diberhentikan. CMS setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh CMS kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-CMS. Perjanjian SK Distributor Perseroan-CMS, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau CMS hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-CMS sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS, maka Perseroan atau CMS harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau CMS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-CMS.

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		Distributor Perseroan-CMS dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-CMS.	
15.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 018/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Sinar Rejeki Jaya ("SRJ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-SRJ")	Perseroan dengan ini menunjuk SRJ untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan SRJ dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-SRJ. SRJ dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-SRJ tidak menjadikan SRJ sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan SRJ tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. SRJ apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. SRJ tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk SRJ dan apabila ditemukan bahwa SRJ menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributuran dihentikan. SRJ setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-SRJ dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-SRJ.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh SRJ kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-SRJ. Perjanjian SK Distributor Perseroan-SRJ, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau SRJ hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-SRJ sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ, maka Perseroan atau SRJ harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau SRJ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-SRJ.
16.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 023/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Sukses Indah Pratama ("SIP") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-SIP")	Perseroan dengan ini menunjuk SIP untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan SIP dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-SIP. SIP dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-SIP tidak menjadikan SIP sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan SIP tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. SIP apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh SIP kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-SIP. Perjanjian SK Distributor Perseroan-SIP, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau SIP hendak mengakhiri SK Distributor

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		SIP tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk SIP dan apabila ditemukan bahwa SIP menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. SIP setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-SIP dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-SIP.	Perseroan-SIP sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP, maka Perseroan atau SIP harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau SIP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-SIP.
17.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 014/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Unitama Musi Raya ("UMR") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-UMR")	Perseroan dengan ini menunjuk UMR untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan UMR dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-UMR. UMR dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-UMR tidak menjadikan UMR sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan UMR tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. UMR apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. UMR tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk UMR dan apabila ditemukan bahwa UMR menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. UMR setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-UMR dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-UMR.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh UMR kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-UMR. Perjanjian SK Distributor Perseroan-UMR, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau UMR hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-UMR sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR, maka Perseroan atau UMR harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau UMR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-UMR.
18.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 012/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Wahana Kreasindo Utama ("WKU") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-WKU")	Perseroan dengan ini menunjuk WKU untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan WKU dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-WKU. WKU dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-WKU tidak menjadikan WKU sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan WKU tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh WKU kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-WKU.

No.	Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
		tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. WKU apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. WKU tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk WKU dan apabila ditemukan bahwa WKU menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. WKU setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-WKU dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-WKU.	Perjanjian SK Distributor Perseroan-WKU, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau WKU hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-WKU sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU, maka Perseroan atau WKU harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau WKU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-WKU.
19.	Surat Keputusan Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 024/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan CV Rani Ismael (" RANI ") selaku Distributor, ("SK Distributor Perseroan-RANI")	Perseroan dengan ini menunjuk RANI untuk menjadi distributor dari hasil produksi ban luar roda dua dengan merek Kingland ("Produk") milik Perseroan untuk wilayah provinsi dan RANI dari Perseroan untuk produk dalam wilayah distribusi berdasarkan syarat dan ketentuan dalam SK Distributor Perseroan-RANI. RANI dalam menyebut dirinya sebagai distributor Perseroan, dalam SK Distributor Perseroan-RANI tidak menjadikan RANI sebagai wakil atau agen dari Perseroan. Dan RANI tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menjadikan diri sebagai distributor tunggal termasuk dalam melakukan pengurusan surat/izin tidak diperkenankan menyebut/mengaku distributor tunggal kepada pejabat atau berwenang termasuk kepada departemen Perdagangan. RANI apabila menjual Produk melalui agen penjualan atau kepada sub-distributor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan. RANI tidak boleh menjual barang-barang sejenis dalam kelompok dagang Perseroan yang dibentuk RANI dan apabila ditemukan bahwa RANI menjual barang sejenis, maka secara otomatis kedistributoran diberhentikan. RANI setuju melakukan yang baik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk pada agen-agen di wilayah sesuai dengan SK Distributor Perseroan-RANI dan wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke agen-agen selama berlangsungnya SK Distributor Perseroan-RANI.	Jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dan dapat diperpanjang melalui surat permohonan perpanjangan yang dibuat secara tertulis oleh RANI kepada Perseroan. Dan surat permohonan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati dalam SK Distributor Perseroan-RANI. Perjanjian SK Distributor Perseroan-RANI, tidak berlaku secara otomatis, tanpa dibuatnya perjanjian perpanjangan terlebih dahulu. Dalam hal Perseroan atau RANI hendak mengakhiri SK Distributor Perseroan-RANI sebelum berakhir jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI, maka Perseroan atau RANI harus memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Perseroan atau RANI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK Distributor Perseroan-RANI.

4.3 PERJANJIAN AFILIASI

Perseroan mengklarifikasi bahwa seluruh perjanjian dan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah dilakukan secara wajar (*amr's lenght basis*).

Selanjutnya, Perseroan akan senantiasa tunduk pada pemenuhan kewajiban terhadap seluruh perjanjian dan transaksi dengan pihak terafiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yang akan dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*amr's lenght*) sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

A. Perjanjian Sewa Tanah

- 1) Perjanjian Sewa Tanah No. 001/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Harris Muliawan ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Harris Muliawan ("Harris") selaku pemilik tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.00070	Harris	Nambo Ilir	280	93
2.	M.00326	Harris	Tambak	1.155	627
3.	M.00333	Harris	Tambak	990	660
4.	M.00343	Harris	Tambak	3.635	1.818
5.	M.00344	Harris	Tambak	2.315	2.315
6.	M.139	Harris	Nambo Ilir	4.145	539
7.	M.140	Harris	Nambo Ilir	7.090	228
8.	M.146	Harris	Nambo Ilir	910	93
9.	M.148	Harris	Nambo Ilir	1.065	355
10.	M.151	Harris	Nambo Ilir	2.660	133
11.	M.152	Harris	Nambo Ilir	1.795	183
12.	M.325	Harris	Tambak	8.605	2.019
13.	M.330	Harris	Tambak	1.680	252
14.	M.335	Harris	Tambak	4.035	2.618
15.	M.340	Harris	Tambak	630	210
16.	M.341	Harris	Tambak	1.710	442
17.	M.82	Harris	Tambak	565	139
Total Tanah Disewa					12.724

- Harris mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Harris untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan

- kepada Harris dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Harris;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1;
 - Harris setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Harris adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Harris menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.76.344.000,-	Rp.76.344.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.114.516.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.152.688.000,-	Rp.190.860.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	12.724	12.724	12.724	12.724	12.724
Total biaya sewa	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-	Rp.190.860.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Harris menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 adalah benar miliki Harris sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Harris membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik)

- atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Harris;
 - Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Harris dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Harris memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Harris;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Harris yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Harris akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 2) Perjanjian Sewa Tanah No. 001/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Harris ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Harris selaku pemilik tanah menyewakan 40 (empat puluh) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	71	Harris	Nambo Ilir	500
2.	339	Harris	Tambak	1.350
3.	338	Harris	Tambak	1.560
4.	337	Harris	Tambak	2.360
5.	73	Harris	Nambo Ilir	1.140
6.	72	Harris	Nambo Ilir	665
7.	74	Harris	Nambo Ilir	2.725
8.	75	Harris	Nambo Ilir	880
9.	76	Harris	Nambo Ilir	230
10.	77	Harris	Nambo Ilir	930
11.	78	Harris	Nambo Ilir	1.285
12.	79	Harris	Nambo Ilir	1.135
13.	80	Harris	Nambo Ilir	305
14.	81	Harris	Nambo Ilir	2.700
15.	141	Harris	Nambo Ilir	845
16.	142	Harris	Nambo Ilir	475

17.	143	Harris	Nambo Ilir	380
18.	144	Harris	Nambo Ilir	515
19.	145	Harris	Nambo Ilir	660
20.	147	Harris	Nambo Ilir	3.750
21.	149	Harris	Nambo Ilir	690
22.	150	Harris	Nambo Ilir	1.970
23.	155	Harris	Nambo Ilir	2.250
24.	156	Harris	Nambo Ilir	1.350
25.	164	Harris	Nambo Ilir	690
26.	323	Harris	Tambak	960
27.	324	Harris	Tambak	1.280
28.	325	Harris	Tambak	8.605
29.	327	Harris	Tambak	885
30.	328	Harris	Tambak	1.210
31.	329	Harris	Tambak	1.490
32.	331	Harris	Tambak	330
33.	332	Harris	Tambak	145
34.	334	Harris	Tambak	1.965
35.	336	Harris	Tambak	135
36.	342	Harris	Tambak	645
37.	346	Harris	Tambak	180
38.	345	Harris	Tambak	430
39.	347	Harris	Tambak	1.560
40.	87	Harris	Nambo Ilir	515

- Harris mengijinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Harris untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Harris dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Harris;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2;
- Harris setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Harris adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Harris menyetujui harga sewa 40 (empat puluh) bidang tanah adalah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter perseginya dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Harris menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 adalah benar miliki Harris sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Harris membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*al/se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Harris;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Harris dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Harris memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Harris 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Harris;
- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Harris yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Harris akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

- 3) Perjanjian Sewa Tanah No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indra Muliawan ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indra Muliawan ("Indra") selaku pemilik tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.00103	Indra	Nambo Ilir	2.265	1.583
2.	M.00112	Indra	Nambo Ilir	680	408
3.	M.00119	Indra	Nambo Ilir	720	72
4.	M.104	Indra	Nambo Ilir	4.330	3.895
5.	M.105	Indra	Nambo Ilir	1.380	828
6.	M.116	Indra	Nambo Ilir	3.865	969
7.	M.120	Indra	Nambo Ilir	410	410
8.	M.163	Indra	Nambo Ilir	770	193
9.	M.166	Indra	Nambo Ilir	885	428
10.	M.167	Indra	Nambo Ilir	1.810	1.207
11.	M.83	Indra	Nambo Ilir	1.280	768
12.	M.84	Indra	Nambo Ilir	1.275	255
13.	M.89	Indra	Nambo Ilir	2.005	1.504
14.	M.90	Indra	Nambo Ilir	535	324
15.	M.95	Indra	Nambo Ilir	1.960	506
16.	M.98	Indra	Nambo Ilir	4.175	3.632
17.	M.89	Indra	Nambo Ilir	345	339
Total Tanah Disewa					17.323

- Indra mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indra untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indra dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indra;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan- Indra 1;
- Indra setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indra adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.103.938.000,-	Rp.103.938.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.155.907.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.207.876.000,-	Rp.259.845.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	17.323	17.323	17.323	17.323	17.323
Total biaya sewa	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-	Rp.259.845.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Indra menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 adalah benar miliki Indra sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indra membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*à se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indra;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang wajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indra dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indra memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indra;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indra yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indra akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 4) Perjanjian Sewa Tanah No. 002/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indra Muliawan ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indra selaku pemilik tanah menyewakan 19 (sembilan belas) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	172	Indra	Nambo Ilir	1.065
2.	108	Indra	Nambo Ilir	675
3.	166	Indra	Nambo Ilir	855
4.	171	Indra	Nambo Ilir	405
5.	85	Indra	Nambo Ilir	2.500
6.	86	Indra	Nambo Ilir	1.725
7.	88	Indra	Nambo Ilir	825
8.	91	Indra	Nambo Ilir	670
9.	97	Indra	Nambo Ilir	4.075
10.	92	Indra	Nambo Ilir	1.995
11.	93	Indra	Nambo Ilir	2.100
12.	94	Indra	Nambo Ilir	2.305
13.	96	Indra	Nambo Ilir	1.190
14.	100	Indra	Nambo Ilir	1.190
15.	101	Indra	Nambo Ilir	715
16.	102	Indra	Nambo Ilir	2.585
17.	106	Indra	Nambo Ilir	1.325
18.	107	Indra	Nambo Ilir	1.280
19.	109	Indra	Nambo Ilir	640

- Indra mengijinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober

2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indra untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indra dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indra;

- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan- Indra 2;
- Indra setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indra adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 19 (sembilan belas) bidang tanah adalah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter perseginya dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Indra menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 adalah benar milik Indra sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indra membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*al se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indra;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggungan jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indra dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indra memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indra 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indra;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indra yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indra akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 5) Perjanjian Sewa Tanah No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indriana Angdrial ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indriana Angdrial ("Indriana") selaku pemilik tanah menyewakan beberapa bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini (selanjutnya seluruh bidang tanah yang tercantum dalam daftar di bawah ini disebut "Bidang Tanah Sewa"):

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah	Luas Tanah Disewa
1.	M.127	Indriana	Nambo Ilir	340	113
2.	M.133	Indriana	Nambo Ilir	500	400
3.	M.159	Indriana	Nambo Ilir	540	180
4.	M.161	Indriana	Nambo Ilir	185	175
Total Tanah Disewa					868

- Indriana mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2038 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indriana untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indriana dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indriana;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dalam keadaan

sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1;

- Indriana setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indriana adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indriana menyetujui harga sewa tanah setiap tahunnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harga sewa per meter	Rp.6.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.5.208.000,-	Rp.5.208.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.7.812.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-

Tahun	2029	2030	2031	2032	2033
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.10.416.000,-	Rp.13.020.000,-

Tahun	2034	2035	2036	2037	2038
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
Tanah disewa	868	868	868	868	868
Total biaya sewa	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-	Rp.13.020.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 30 Desember.

Status Kepemilikan

Indriana menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 adalah benar milik Indriana sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indriana membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*à se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indriana;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indriana dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indriana memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 1 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indriana;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indriana yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indriana akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 6) Perjanjian Sewa Tanah No. 003/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Indriana Angdrial ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- Indriana selaku pemilik tanah menyewakan 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	121	Indriana	Nambo Ilir	2.910
2.	132	Indriana	Nambo Ilir	1.000
3.	122	Indriana	Nambo Ilir	440
4.	123	Indriana	Nambo Ilir	340
5.	124	Indriana	Nambo Ilir	740
6.	125	Indriana	Nambo Ilir	1.105
7.	126	Indriana	Nambo Ilir	950
8.	340	Indriana	Nambo Ilir	1.105
9.	128	Indriana	Nambo Ilir	590
10.	129	Indriana	Nambo Ilir	590
11.	130	Indriana	Nambo Ilir	1.105
12.	131	Indriana	Nambo Ilir	1.630
13.	134	Indriana	Nambo Ilir	3.195
14.	135	Indriana	Nambo Ilir	845
15.	137	Indriana	Nambo Ilir	4.525
16.	136	Indriana	Nambo Ilir	1.200
17.	138	Indriana	Nambo Ilir	3.785
18.	153	Indriana	Nambo Ilir	920
19.	154	Indriana	Nambo Ilir	1.485
20.	157	Indriana	Nambo Ilir	645
21.	158	Indriana	Nambo Ilir	2.540
22.	160	Indriana	Nambo Ilir	830

23.	162	Indriana	Nambo Ilir	2.315

- Indriana mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan Indriana untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada Indriana dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan Indriana;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2;
- Indriana setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada Indriana adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah adalah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

Indriana menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 adalah benar milik Indriana sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini Indriana membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*als en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;
- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran Indriana;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang berwajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan Indriana dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan Indriana memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-Indriana 2 akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan Indriana;
 - Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan Indriana yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan Indriana akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.
- 7) Perjanjian Sewa Tanah No. 004/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Lingga Djaja ("Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

- PT Lingga Djaja ("LD") selaku pemilik tanah menyewakan 4 (empat) bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak milik, sesuai dengan daftar tanah di bawah ini:

No.	Daftar Tanah	Pemilik	Desa	Luas Tanah
1.	B.00514	LD	Nambo Ilir	51.295
2.	B.00513	LD	Nambo Ilir	20.455
3.	B.008	LD	Tambak	10.765
4.	B.007	LD	Tambak	1.450

- LD mengizinkan Perseroan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Bidang Tanah Sewa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka Waktu

- Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD diadakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 17 Oktober 2042 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan LD untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada LD dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa tersebut berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta harga yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan LD;
- Perseroan diwajibkan dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dalam keadaan sebagaimana adanya dengan bangunan di atasnya (jika ada) pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD;
- LD setuju, mengakui, dan menyatakan bahwa segala bangunan yang berada di atas Bidang Tanah Sewa pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dan penyerahan kembali Bidang Tanah Sewa kepada LD adalah merupakan hak milik Perseroan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Harga Sewa

- Perseroan dan Indra menyetujui harga sewa 4 (empat) bidang tanah adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per tahunnya;
- Dalam hal tanah yang disewa didirikan bangunan yang berada di atasnya, maka akan dikenakan biaya tambahan per meter persegi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan tabel dibawah ini yang akan dibuat dalam addendum perjanjian:

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Harga sewa per meter	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-

Tahun	2028	2029	2030	2031	2032
Harga sewa per meter	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-	Rp.12.000,-

Tahun	2033	2034	2035	2036	2037
Harga sewa per meter	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-

Tahun	2038	2039	2040	2041	2042
Harga sewa per meter	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-	Rp.17.000,-

- Pembayaran dilakukan secara tunai setiap akhir tahun sewa pada tanggal 18 Oktober.

Status Kepemilikan

LD menjamin dan menanggung Perseroan apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD adalah benar milik LD sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini LD membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang disewa dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*alse en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan dicabutnya fasilitas (listrik) atau fasilitas lainnya (jika ada) maka segala biaya yang timbul untuk, pemasangan kembali adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan;

- Pajak berkenaan dengan tanah selama waktu sewa menjadi tanggungan dan pembayaran LD;
- Perbaikan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan Listrik, Air, Tembok/Dinding dan atau fasilitas lain (jika ada) menjadi tanggung jawab Perseroan.

Hukum Yang Berlaku

Perseroan berkewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dan yang akan diadakan oleh yang wajib/berwenang dikemudian hari tentang tanah tersebut, dengan membebaskan LD dari segala tuntutan disebabkan kelalaian Perseroan akibat dan kelalaian Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan LD memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Sewa Tanah Perseroan-LD akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan LD;
- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan LD yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan LD akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

B. Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/SP-DSL/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan UKL ("Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Objek Perjanjian

Perseroan dan UKL sepakat mengikatkan diri, bahwa UKL selaku pemilik Motor Diesel dengan No. Seri 0143957/03 ("Genset 1") dan No. Seri 49408992 750907 ("Genset 2") mengizinkan Perseroan untuk menggunakan Motor Diesel UKL.

Jangka Waktu

- Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 November 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 akan tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan Perseroan dan UKL untuk jangka waktu yang ditentukan kemudian dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan kepada UKL dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa pakai sebagaimana dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan UKL;
- Perseroan diwajibkan dan mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Genset 1 dan Genset 2 dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dalam keadaan fungsi yang baik pada saat berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL.

Harga

Perseroan dan UKL sepakat untuk tidak mengenakan biaya atas Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL, kecuali atas biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL tetap berjalan baik.

Status Kepemilikan

UKL menjamin dan menanggung Perseroan atas apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL adalah benar milik UKL sendiri, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang dipinjam-pakaikan tersebut dan tentang penikmatan serta pemakaiannya dengan ini UKL membebaskan Perseroan dari tuntutan Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Hak dan Kewajiban

- Perseroan berkewajiban untuk memelihara, merawat apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri (*al/se en goed huis vader*) dan mempergunakan menurut sifat dan peruntukannya;
- Perseroan tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;
- Semua biaya untuk pemeliharaan atas apa yang diperjanjikan tersebut menjadi tanggungan dan pembayaran Perseroan, apabila akibat kelalaian Perseroan menimbulkan rusak/tidak berfungsinya pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Perseroan.

Perubahan dan Perbaikan

Perseroan tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL tanpa seizin tertulis dari UKL. Apabila setelah ada izin dari UKL, Perseroan akan melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL, harus dilakukan atas risiko dan biaya Perseroan sendiri, dan sesudah habis waktu Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL menjadi milik UKL tanpa sesuatu ganti kerugian apa pun juga kepada Perseroan.

Domisili Hukum

Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL dan segala akibat serta pelaksanaannya Perseroan dan UKL memilih kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Lain-Lain

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai Perseroan-UKL akan diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama antara Perseroan dan UKL;

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Perseroan dan UKL yang tidak dapat diselesaikan diantara Perseroan dan UKL akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase.

5. HARTA KEKAYAAN

5.1 Harta Kekayaan Perseroan Berupa Benda Tidak Bergerak

Mesin-Mesin

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin-mesin yang digunakan Perseroan untuk kegiatan produksi, sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Mesin-Mesin	Tanggal Invoice	No. Invoice / Proforma Invoice
1	BTU 1721 4P+1T TBM	1 Juni 2019	WX201906001
2	BTU 1014 4P+1T TBM	1 Juni 2019	WX201906001
3	STB 1216 BUILDING MACHINE (2SET)	16 Januari 2019	WX201901001
4	BTU 0813 BUILDING MACHINE (1SET)	16 Januari 2019	WX201901001
5	4-LAYER BICYCLE TIRE CURING PRESS WITH PLC CONTROL SYSTEM	29 Desember 2020	TYM2020122901
6	2M HYDRAULIC TIRE CURING PRESS + PCI	23 Maret 2022	TYM2022032303
7	90MM EXTRUDER	3 Maret 2021	BXA-2009025
8	SINGLE WIRE 1*3 BEAD FORMING MACHINE	24 April 2020	WX202004001
9	WRAPPING MACHINE	24 April 2020	WX202004001
10	5 SET OF TWO CAPACITY CURING MACHINE	25 November 2016	SE148/KS-160501
11	BIAS CUTTER	18 Oktober 2016	MR1611115
12	2 SETS OF HPT MC1421 MOTORCYCLE BUILDING MACHINE	1 Juni 2016	SE142/KS-151015
13	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
14	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
15	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (90/90-14)	20 Oktober 2017	MR1711102
16	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	20 Oktober 2017	MR1711102
17	7 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	20 Oktober 2017	MR1711102
18	10 SET OF THE #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	28 September 2017	SE162/KS-17032201
19	TYRE BUILDING MACHINE BTU1316	28 Agustus 2017	WX201708001
20	TYRE BUILDING MACHINE BTU1721	28 Agustus 2017	WX201708001
21	BEAD FORMING MACHINE	28 Agustus 2017	WX201708001
22	BEAD WIRE BIC MACHINE	28 Agustus 2017	WX201708001
23	3 PAPER CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	17 Agustus 2017	MR1711079
24	3 PAPER CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	17 Agustus 2017	MR1711079
25	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
26	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
27	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (90/90-14)	8 Agustus 2017	MR1711068
28	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (70/90-17)	8 Agustus 2017	MR1711068

No.	Mesin-Mesin	Tanggal Invoice	No. Invoice / Proforma Invoice
29	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (80/90-17)	8 Agustus 2017	MR1711068
30	4 IRON CASES OF CURING BLADDER (60/80-17)	8 Agustus 2017	MR1711068
31	M/C TIRE MOLD 90/90-14 KING JAGUAR - 3 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
32	M/C TIRE MOLD 70/90-17 KING JAGUAR - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
33	M/C TIRE MOLD 80/90-17 KING JAGUAR - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
34	M/C TIRE MOLD 2.50-17 KING KOMODO - 1 SET	28 Juli 2017	SJ170803
35	M/C TIRE MOLD 2.75-17 KING KOMODO - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
36	M/C TIRE MOLD 2.50-17 KING SCORPION - 2 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
37	M/C TIRE MOLD 2.75-17 KING SCORPION - 3 SETS	28 Juli 2017	SJ170803
38	5 SETS OF #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	28 Juni 2017	SE159/KS-160823
39	4 SETS POWER SUPPLY OF ULTRASONIC TIRE CUTTING SYSTEM	19 Maret 2017	SE157/KS-160628
40	4 SETS THE HPT MC1421 MOTOCYCLE BUILDING MACHINE	20 Mei 2017	SE156/KS-160628
41	5 SET OF #34 TWO CAPACITY CURING MACHINE	14 April 2017	SE154/KS-160628
42	2 SET BUILDING SPACER 170MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
43	1 SET BUILDING SPACER 160MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
44	1 SET BUILDING SPACER 180MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
45	2 SET BUILDING SPACER 190MM	5 Mei 2017	SE155/KS-17322
46	2 PAPER CASE OF CURING BLADDER (80/90-17)	19 Mei 2017	MR1711035
47	2 PAPER CASE OF CURING BLADDER (80/90-14)	19 Mei 2017	MR1711035
48	1 SET BUILDING SPACER 150MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
49	1 SET BUILDING SPACER 170MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
50	1 SET BUILDING SPACER 150MM	31 Maret 2017	SE153/KS-170209
51	5 SETS OF HYDRAULIC CURING PRESS	17 Januari 2017	MD1611123
52	4 SET OF THE HPT MC1421 MOTOCYCLE BUILDING MACHINE WITH ULTRASONIC KNIFE CUTTER	3 Maret 2017	SE152/KS-160502
53	2 SETS OF BTU1419 BUILDING MACHINE	15 Mei 2015	MR1511027
54	7 SETS OF M/C TIRE MOLD	15 Mei 2015	MR1511027

5.2 Harga Kekayaan Berupa Benda Bergerak

Kendaraan Roda 4 (Empat)

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Nama Pemilik
1.	M-05933696	A 8577 FL	Isuzu/Mobil Barang/2011	MHCNH55EY BJ038945	MO38945	Perseroan
2.	M-05933686	A 8578 FL	Isuzu/Mobil Barang/2011	MHCNH55EY BJ038940	MO38940	Perseroan

5.3 Harta Kekayaan Benda Tak Berwujud

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

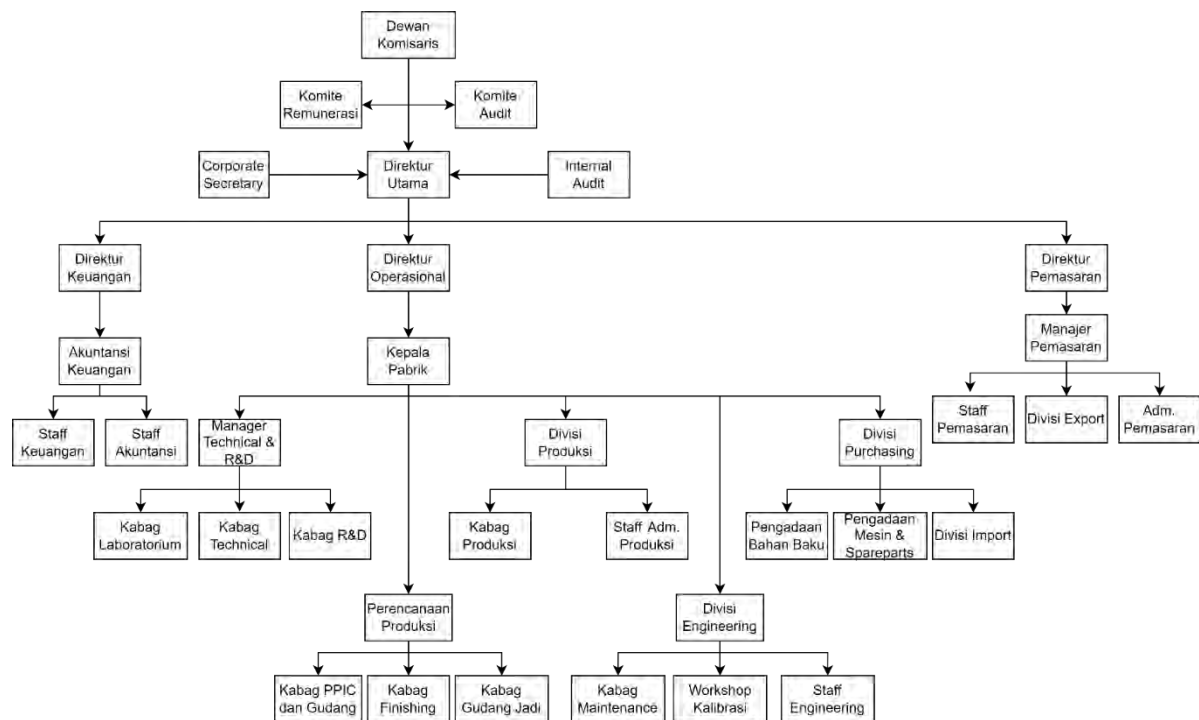
Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa benda tidak berwujud (*intangible assets*) berupa HKI sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Jenis HKI	HKI	Nomor Permohonan & Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Pemilik
1.	Merek	King Dolphin	- Permohonan No. DID2017040726 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773668 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
2.	Merek	King Jaguar	- Permohonan No. DID2017040730 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773664 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
3.	Merek	King Panda	- Permohonan No. DID2017040727 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. IDM000773674 tanggal 30 Mei 2020	29 Agustus 2027	Perseroan
4.	Merek	Axcero	- Permohonan No. DID2019000460 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760072 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan
5.	Merek	King Wolf	- Permohonan No. DID2017049165 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751649 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan

No.	Jenis HKI	HKI	Nomor Permohonan & Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Pemilik
6.	Merek	Axcero Moto	- Permohonan No. DID2019000462 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760070 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan
7.	Merek	Axero Tire	- Permohonan No. DID2019000461 tanggal 7 Januari 2019 - Pendaftaran No. IDM000760071 tanggal 22 Mei 2020	5 Januari 2029	Perseroan
8.	Merek	King Anaconda	- Permohonan No. DID2017049160 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751672 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
9.	Merek	King Doberman	- Permohonan No. DID2017049161 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751667 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
10.	Merek	King Pitbull	- Permohonan No. DID2017049164 tanggal 3 Oktober 2017 - Pendaftaran No. IDM000751655 tanggal 20 Mei 2020	3 Oktober 2027	Perseroan
11.	Merek	King Tiger	- Permohonan No. DID2017040724 tanggal 29 Agustus 2017 - Pendaftaran No. DM000638610 tanggal 7 Februari 2019	29 Agustus 2027	Perseroan

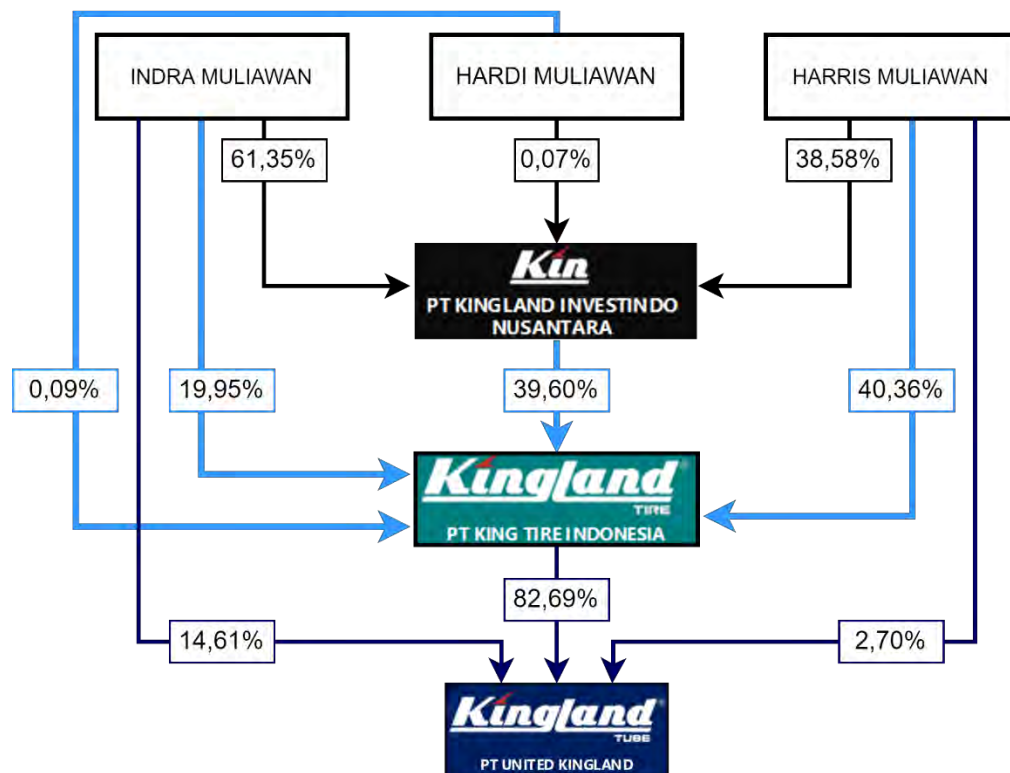
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Guna memenuhi Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan yaitu Harris Muliawan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 Juni 2022 melalui Notaris Dewi Octaria, S.H., M.Kn.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Harris Muliawan merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 143 Tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Indra Muliawan
Komisaris	: Hardi Muliawan
Komisaris Independen	: Danny Setiawan

Direksi:

Direktur Utama	: Harris Muliawan
Direktur	: Ferry Candra Kusuma
Direktur	: Aneka Warna
Direktur	: Habibullah

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Indra Muliawan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar Diploma Business Management pada tahun 1969.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di CV Sukadana pada tahun 1966 – 1968 dan Direktur pada CV Indra Djaya pada tahun 1966 - 1982.

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di industri ban Indonesia, selain menjadi Komisaris Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT United Kingland (*Founder*), menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Sritrang Lingga Indonesia, menjabat sebagai Komisaris di PT Indralaya Agro Lestari, dan menjabat sebagai Direktur di PT Lingga Djaja.



Hardi Muliawan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisariss Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana Chemical Engineering dari University of Minnesota pada tahun 2001.

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri Ban, selain menjadi Komisariss Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Lingga Djaja, Direktur di PT Indralaya Agro Lestari, Direkutr di PT Sumatera Asia Mandiri.

Beliau juga pernah menjabat di Divisi Oil Lubricant di Exxon Mobil Pte Ltd, Middle East and Asia Schlumberger Information Solutions pada 2010.



Danny Setiawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001 dan telah memperoleh Certified Public Accountant (CPA) pada tahun 2017 dan Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) pada tahun 2021.

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia Akuntansi dan Perpajakan, selain menjadi Komisariss Independen Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai CEO di PT Sentra Solusi Sejahtera (Trusvation).

Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Audit di KPMG Indonesia pada tahun 2009 - 2013, Auditor di Deloitte Indonesia pada tahun 2013, Finance Manager di PT Lotte Mart Indonesia pada tahun 2013 – 2016 dan Finance Manager di PT Supra Pritama Nusantara pada tahun 2016 - 2018.

DIREKSI



Harris Muliawan
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar sarjana Keuangan dari Michigan State University pada tahun 1995.

Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri ban Indonesia, selain menjadi Direktur Utama Perseroan, beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisariss Utama di PT Sumber Global Energy Tbk dan sebagai Direktur di PT United Kingland.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Sales Export di PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 1996 – 1999.



Ferry Chandra
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai sales executive di PT Grand Multi Chemical pada tahun 1998 – 2000, sebagai Account Executive di PT Lautan Luas Tbk pada tahun 2000 – 2010, dan Nasional Sales Manager di PT King Tire Indonesia Tbk dan PT United Kingland pada tahun 2010 – 2022.



Aneka Warna
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau merupakan lulusan Akuntansi Dasar Satu serta Sekretaris dan Administrasi Perkantoran dari Adias Sindo Couse pada tahun 1991.

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager Operasional di PT United Kingland pada tahun 1991 - 2022.



Habibullah
Direktur

Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Beliau merupakan lulusan STIE “YKP” Yogyakarta pada tahun 1997.

Berpengalaman lebih dari 23 tahun di Industri Ban, Beliau saat ini berfokus untuk mengembangkan usaha Perseroan.

Beliau pernah menjabat sebagai Tax Manager di PT United Kingland pada tahun 1999 – 2012, sebagai Finance & Accounting Tax Manager di PT Kemakmuran Perkasa pada tahun 2013 - 2015, dan Accounting Tax Manager di PT King Tire Indonesia Tbk 2015 - 2022.

Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1. Indra Muliawan	Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan serta Pemegang Saham dan Komisaris Utama dari PT United Kingland.

		Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.
2. Harris Muliawan	Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali	Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan serta dan Pemegang Saham dan Direktur dari PT United Kingland.
		Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.
3. Hardi Muliawan	Komisaris dan Pemegang Saham	Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan
		Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan presentasi kehadiran sebesar 100% (seratus persen).

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau keputusan Direksi.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas anaknya sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah).

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Diego Armando sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SKD/XII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 16 Desember 2022.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan

Nama : Diego Armando
Alamat : Jl. Raya Serang KM. 68
Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang – Banten 42185
No Telp : 62-254 402675
Email : corsec@kingland.co.id

Adapun riwayat pengalaman kerja Diego Armando adalah sebagai berikut :

2011 : PT MG Holiday sebagai Accounting Staff
2012 : Bank BTN KC Kebon Jeruk sebagai Accounting Staff
2013 – Sekarang : PT United Kingland sebagai Senior Accounting Manager
2022 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan susunan :

Ketua : Danny Setiawan

Keterangan mengenai Danny Setiawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Linda

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 16 Desember 2022,

Adapun riwayat pengalaman kerja Linda adalah sebagai berikut :

2006 – Sekarang	: PT Rental Crane Indonesia sebagai Senior Staff Finance
2022 – Sekarang	: PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Anggota : Christina Wati

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 16 Desember 2022,

Adapun riwayat pengalaman kerja Christina Wati adalah sebagai berikut :

2004 – 2005	: UNICS TECHNOLOGY sebagai Staff Marketing
2005 – 2007	: CV. Angkutan Bersaudara sebagai Staff Accounting
2007 – Sekarang	: PT Rental Crane Indonesia sebagai Senior Staff Accounting
2022 – Sekarang	: PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Widikdo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SKD/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Widikdo

Adapun riwayat pengalaman kerja Widikdo adalah sebagai berikut :

1994 – 2010	: PT Gajah Tunggal Tbk sebagai supervisor produksi
2010 – 2012	: Yayasan Daarul Qur'an Nusantara sebagai supervisor Operasional Bisnis
2012 – 2018	: PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Production Dept. Head

2018 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Dept. Head Quality
2018 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai ketua Audit Internal

Anggota : Rikawati

Adapun riwayat pengalaman kerja Rikawati adalah sebagai berikut :

2000 – 2001 : Apotik Berkas sebagai Staff Admin
2001 – 2022 : PT United Kingland sebagai Senior Staff Accounting
2022 – Sekarang : PT King Tire Indonesia Tbk sebagai Anggota Audit Internal

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 16 Desember 2022 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK No.56/2015 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK. 56/2015.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
- c. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
- d. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan limit-limit yang telah ditetapkan.
- e. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
- f. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
- g. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan current audit, regular audit maupun special audit. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
- h. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
- i. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
- k. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- l. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
- n. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan.
- o. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan Audit Internal terhadap Perseroan dan mempunyai akses untuk semua data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Unit Audit Internal Perseroan untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit tersebut.
- b. Mendapat dukungan dari seluruh staf dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.
- c. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit Perseroan.
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan susunan:

Ketua : Danny Setiawan

Keterangan mengenai Danny Setiawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Hardi Muliawan

Keterangan mengenai Hardi Muliawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : Indra Muliawan

Keterangan mengenai Indra Muliawan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas remunerasi;
- f. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PENDIRIAN UKL

UKL didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 133 tanggal 26 Juli 1972, dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/299/7. tanggal 6 September 1974 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No. HT.01.01 : 01/1999/PN TNG tanggal 03 Maret 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 29 tanggal 9 April Desember 1999, Tambahan Berita Negara (“**TBN**”) No. 2131 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) yang berlaku saat UKL didirikan, dinyatakan bahwa sebelum perseroan dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada presiden atau penguasa yang ditunjuk presiden untuk memperoleh izinnnya, dan berdasarkan Pasal 50 KUHD izin termasuk dalam Pasal 36 KUHD tidak akan diberikan kecuali bila ternyata para pendiri pertama bersama-sama mewakili paling sedikit 1/5 dari modal perseroan.

Dalam akta pendirian UKL yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1972 dinyatakan “dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan disanggupi dibayar penuh dengan uang tunai.” Selanjutnya, akta pendirian UKL disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/299/7. pada tanggal 6 September 1974 (“**Pengesahan Pendirian UKL**”). Dalam Pengesahan Pendirian UKL dinyatakan bahwa “akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas”. Dengan demikian, syarat-syarat yang diperlukan termasuk dalam hal ini penyeteroran modal pendiri dengan uang tunai pada saat pendirian UKL diasumsikan telah disetorkan karena izin dan/atau pengesahan akta pendirian UKL telah diperoleh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta berdasarkan Neraca PT United Kingland/Company Limited Periode 26 Djuli 1972 tertanggal 26 Juli 1972 yang ditandatangani oleh M. Susanto selaku Direktur UKL pada saat itu, Akta Pendirian UKL, Pengesahan Pendirian UKL, dan Surat Pernyataan UKL tertanggal 15 Maret 2023, penyeteroran modal para pemegang saham pada saat UKL didirikan adalah dilakukan dengan uang tunai pada tanggal 26 Juli 1972, dengan rincian sebagai berikut:

- a) M. Susanto sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah); dan
- b) Ateng sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah).

ANGGARAN DASAR TERAKHIR UKL

Anggaran Dasar terakhir UKL adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, yang selanjutnya telah mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam akta-akta berikut ini :

1. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT United Kingland No. 13 tanggal 13 November 2007, dibuat dihadapan Iwan Halimy, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02503.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 003863.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, (“Akta No. 13 Tahun 2007”).

Berdasarkan Akta No. 13 Tahun 2007 tersebut, rapat mengambil keputusan untuk menyetujui perubahan seluruh pasal dalam Anggaran Dasar UKL, untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT United Kingland No. 18 tanggal 31 Agustus 2007, dibuat dihadapan Iwan Halimy, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02503.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 003863.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, (“Akta No. 18 Tahun 2007”).

Berdasarkan Akta No. 18 Tahun 2007 tersebut, rapat mengambil keputusan untuk menyetujui pindah tempat kedudukan UKL, semula berkedudukan di Kota Tangerang, menjadi berkedudukan di Kabupaten Serang, Banten, Kecamatan Kibin/Cikande, Kelurahan Nambo Ilir, Jalan Raya Jakarta Serang Kilometer 68 , dengan demikian merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar, menjadi berbunyi sebagai berikut:

UKL berkedudukan di Kabupaten Serang, Banten.

MAKSUD DAN TUJUAN UKL

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111);
 - b. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192);
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban;
 - b. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining* dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body, frame, suspensi, steering, axle* terbuat dari karet.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM UKL

Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, UKL hanya melakukan perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2022, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham UKL terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham di Luar Rapat PT. United Kingland No. 77 tanggal 28 Juni 2022, dibuat dihadapan Dewi Octaria, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045079.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT United Kingland No. AHU-AH.01.03-0258967 tanggal 30 Juni 2022, serta telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0028079 tanggal 30 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124578.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 ("Akta No. 77 Tahun 2022"), yang mana para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar UKL dari sebelumnya sebesar Rp. 6.280.000.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor UKL dari sebelumnya 6.280.000.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi 36.280.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham UKL adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1,000,000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harris Muliawan	981	981.000.000	2,70
Indra Muliawan	5.299	5.299.000.000	14,61
PT King Tire Indonesia Tbk (Perseroan)	30.000	30.000.000.000	82,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.280	36.280.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	63.720	63.720.000.000	

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS UKL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT United Kingland No. 02 tanggal 3 April 2018, dibuat dihadapan Fitri Susanti SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT United Kingland No. AHU-AH.01.03-0141459 tanggal 10 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050443.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018, ("Akta No. 02 Tahun 2018"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UKL yang terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur : Harris Muliawan
 Komisaris : Indra Muliawan

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

PERSEROAN

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	61	58	56
Karyawan Kontrak	433	343	275
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤30 tahun	283	203	163
31 – 40 tahun	147	134	117
41 – 50 tahun	46	47	35
> 50 tahun	18	17	16
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤ SLTA	475	385	318
Diploma	5	4	4
S1	14	12	9
Total	494	401	331

Tabel Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Level Jabatan

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	2	2	2
Manajer Keuangan	1	1	1
Staff Keuangan	2	2	1
Staff Akuntansi	3	2	2
Kepala Pabrik	1	1	1
Manager Technical RND	1	1	1
Kabag Laboratorium	1	1	1
Kabag Technical	1	1	1
Kabag RND	1	1	1
Head Perencanaan Produksi	3	3	3
Kabag PPIC dan Gudang	12	12	12
Kabag Finishing	12	12	12
Kabag Gudang Jadi	12	12	12

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Head Produksi	24	24	24
Kabag Produksi	60	51	51
Staff Produksi	296	210	134
Head Engineering	2	2	2
Kabag Maintenance	6	5	5
Workshop Kalibrasi	2	2	2
Staff Engineering	24	24	30
Head Purchasing	2	2	2
Staff Purchasing Bahan Baku	2	2	2
Staff Purchasing Mesin & Spareparts	2	2	2
Staff Purchasing Import	2	2	2
Manajer Pemasaran	4	4	4
Staff Pemasaran	8	8	8
Staff Eksport	2	1	1
Staff Adm. Pemasaran	2	3	4
Security	4	8	8
Total	494	401	331

UKL

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	117	116	133
Karyawan Kontrak	415	347	379
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤30 tahun	305	234	251
31 – 40 tahun	159	154	181
41 – 50 tahun	49	56	54
> 50 tahun	19	19	26
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤ SLTA	513	446	492
Diploma	5	4	4
S1	14	13	16
Total	532	463	512

Tabel Komposisi Pegawai PT. United Kingland berdasarkan Level Jabatan

Keterangan	30-Sep	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direksi	1	1	1
Manajer Keuangan	1	1	1
Staff Keuangan	2	2	2
Staff Akuntansi	3	2	2
Kepala Pabrik	1	1	1
Manager Technical RND	1	1	1
Kabag Laboratorium	1	1	1
Kabag Technical	1	1	1
Kabag RND	1	1	1
Head Perencanaan Produksi	3	3	3
Kabag PPIC dan Gudang	9	9	9
Kabag Finishing	9	9	9
Kabag Gudang Jadi	9	9	9
Head Produksi	18	18	18
Kabag Produksi	40	47	51
Staff Produksi	377	300	335
Head Engineering	2	2	2
Kabag Maintenance	6	5	5
Workshop Kalibrasi	2	2	2
Staff Engineering	20	20	25
Head Purchasing	2	2	2
Staff Purchasing Bahan Baku	2	2	2
Staff Purchasing Mesin & Spareparts	2	2	2
Staff Purchasing Import	2	2	2
Manajer Pemasaran	4	4	4
Staff Pemasaran	8	8	8
Staff Eksport	1	1	1
Staff Adm. Pemasaran	2	3	4
Security	2	4	8
Total	532	463	512

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Kegiatan CSR Tahun 2022



Pada tanggal 7 Maret 2022, Kingland peduli banjir donasikan satu truk makanan siap saji ke serang banten untuk warga korban banjir. Bantuan Kingland Peduli tersebut diserahkan ke warga kampung Suka Jaya, Rt 01, Rw 12, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten Jawa bagian Barat.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

14. KETERANGAN MENGENAI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

I. Umum

Perseroan pertama kali mulai beroperasi pada Agustus 2010 dan didirikan pada 2 Agustus 2010 di Jakarta berdasarkan Akta No. 01 tahun 2010 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-42191.AH.01.01.TAHUN 2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 ("Akta No. 01" atau "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("Akta No. 143 Tahun 2022").

Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jl. Raya Serang Km 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

II. Sejarah Perseroan

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis Perseroan:



III. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak selanjutnya disebut Grup Perseroan bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya Grup Perseroan memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 Grup Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan didirikannya Perseroan untuk memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk Perseroan ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor dan sepeda di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan *Quality Management System* SNI ISO 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Visi

Menjadi pemain aktif dalam industri ban luar dan ban dalam dengan memberikan nilai-nilai tambah untuk kehidupan manusia melalui dedikasi yang tinggi.

Misi

- Memasok produk-produk dan jasa-jasa yang terbaik melalui dedikasi Perseroan yang tinggi;
- Memberikan solusi-solusi untuk pelanggan Perseroan serta merespon dengan cepat dan efektif terhadap masalah-masalah unik pelanggan;
- Merancang pabrik serta mendistribusikan produk-produk dengan kualitas terbaik dan memiliki nilai lebih untuk memuaskan pelanggan;
- Berkomitmen untuk melakukan peningkatan terus menerus dalam upaya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan;
- Mengintegrasikan antara lingkungan yang baik dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
- Senantiasa berusaha untuk meminimalkan angka kecelakaan kerja, serta mengurangi limbah dan emisi-emisi.

Grup Perseroan dalam memproduksi ban selalu memegang teguh komitmennya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dengan mengikuti aturan dari lembaga-lembaga sertifikasi ban yang ada di Indonesia dan Internasional, serta memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang terjamin, aman serta kompetitif.

Saat ini Grup Perseroan memiliki 4 produk ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk, dan 28 produk ban luar untuk sepeda dan sepeda motor. Kingland adalah salah satu merek manufaktur di Indonesia sejak tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang, Banten, Jawa Barat Indonesia.

Produk Perseroan

- Ban Luar

1. KingLand Genuine

Merupakan ban luar yang diciptakan dengan mempertimbangkan karakter umum jalan yang ada di Indonesia. KINGLAND Genuine memiliki beberapa tipe ban mulai dari ukuran 70/90-14 sampai 130/70-17 yang cocok untuk semua jenis tipe motor yang ada di Indonesia.



King Dolphin



King Jaguar



King Alligator



King Anaconda



Pangolins



King Pitbull



King Lion



New King Leopard



King Panda



King Puma



New Python



King Rhino



King Shark



King Tiger CRT-001



King Tiger

2. KingLand Premium

Merupakan ban luar yang diciptakan dengan mempertimbangkan karakter umum jalan yang ada di Indonesia. KingLand Premium memiliki beberapa tipe ban mulai dari ukuran 100/90-12 sampai 140/90-14 yang dibuat khusus untuk motor big scooters yang ada di Indonesia.



King Anaconda ATX-7



King Jaguar RTX-2



King Jaguar RTX-5

3. KingLand Racing

Diciptakan dengan traksi dan grip yang maksimal serta memiliki konstruksi yang ringan dan kuat. KingLand Racing Merupakan ban luar yang diciptakan dengan khusus untuk kompetisi drag dan sirkuit di Indonesia.



King Vellox CTX-2



King Vellox CTX-5



King Axcero CTX 007



King Axcero CTX 001

4. KingLand Atlantis
KingLand Atlantis Merupakan ban luar untuk sepeda.



Sumber: Perseroan

UKL

- Ban Dalam



INNER TYRE
BAN DALAM KINGLAND MOTOR

INNER TYRE
BAN DALAM KINGLAND MOBIL

Ban dalam yang diproduksi oleh UKL untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk memiliki ukuran ring 12 sampai 21.

Bahan Baku Utama dan Pemasok

Grup Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri otomotif khususnya ban luar dan ban dalam. Sesuai dengan produk yang dihasilkan, Perseroan memiliki bahan baku utama berupa karet alam. Pembelian bahan baku utama didapat Perseroan dari pemasok PT Perkebunan Nusantara. Perseroan selalu menjaga aktivitas pembelian bahan baku utama sebagai salah satu penopang utama dalam kelangsungan proses produksi. Oleh sebab itu, demi menjamin kepastian harga dan pasokan bahan baku utama, Perseroan melakukan pembelian secara berkala dengan pemasok bahan baku setiap bulan. Perseroan juga menjadi member dari PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) untuk melakukan order pembelian bahan baku.

Selain bahan baku utama Perseroan yaitu karet alam, Perseroan juga menggunakan bahan baku lain diantaranya *Filler*, *Chemical*, *Oil*, *Wire*, dan *Canvas* yang diperoleh dari pemasok lokal maupun pemasok luar negeri yang paling banyak diimpor dari negara China.

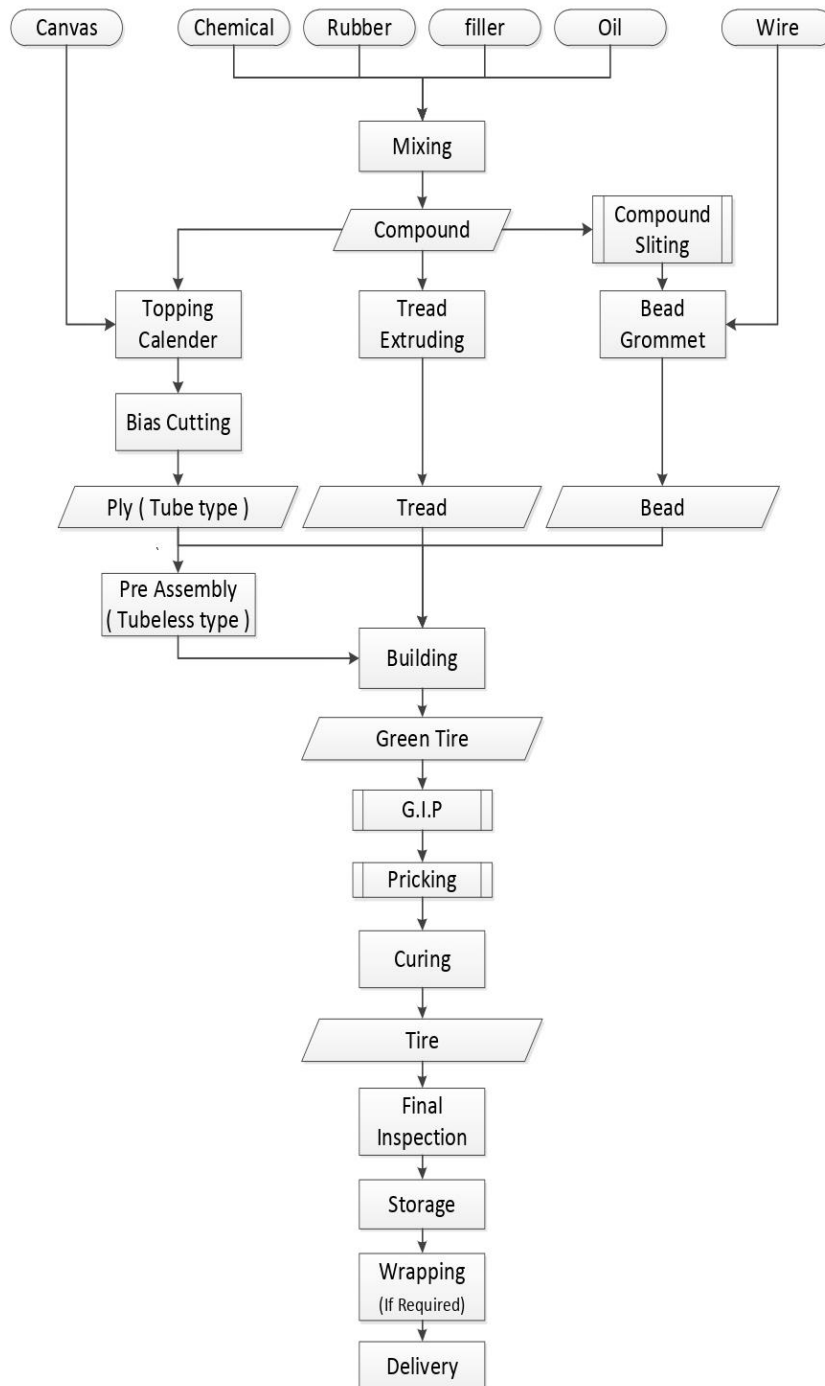
Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi Grup Perseroan untuk ban luar dan ban dalam per tahun dengan total sebesar 13.500.000 pada periode September 2022, 13.000.000 pada tahun 2021, 12.000.000 pada tahun 2020 dan 11.700.000 pada tahun 2019.

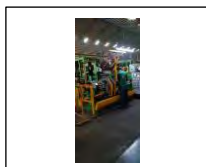
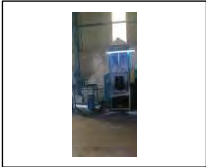
Periode	Ban Luar			Ban Dalam		
	Produksi	Kapasitas	Utilisasi	Produksi	Kapasitas	Utilisasi
September 2022	2,599,139	3,500,000	74.26%	7,112,281	10,000,000	71.12%
Desember 2021	2,852,022	3,000,000	95.07%	8,181,392	10,000,000	81.81%
Desember 2020	1,843,030	2,000,000	92.15%	7,860,837	10,000,000	78.61%
Desember 2019	1,550,377	1,700,000	91.20%	8,536,037	10,000,000	85.36%

Proses Produksi

ALUR PROSES PRODUKSI BAN LUAR



Penjelasan Alur Proses Produksi Utama:

			
<u>Mixing</u>	<u>Tread Extruding</u>	<u>Building</u>	<u>G.I.P</u>
			
<u>Pricking</u>	<u>Curing</u>	<u>Final Inspection</u>	<u>Storage</u>

1. *Mixing*

Pada awal masa proses produksi ban, Perseroan melakukan tahapan pertama yaitu dimana dilakukannya *mixing* atau pencampuran semua bahan dasar utama dalam pembuatan ban. Pada proses ini semua bahan baku utama seperti karet, *chemical*, *filler* dan *oil* dicampur dengan menggunakan mesin *Mixer* dan dibentuk menjadi lembaran/*slab* yang disebut *Compound*.

2. *Tread Extruding*

Proses *Tread Extruding* merupakan proses dimana *Compound* yang telah melalui proses *mixing* akan dilunakkan kembali dengan mesin *Extruder* dan hasilnya berupa *Compound* yang sudah berbentuk tertentu atau *profile*.

3. *Building*

Pada proses *building*, hasil dari *Tread Extruding* dan mesin lainnya yang akan diassembling pada mesin *Buiding* agar menjadi satu dan dinamakan *Green Tire*.

4. *G.I.P*

G.I.P merupakan proses kelanjutan *Green Tire* untuk dilapisi *silicon* dengan menggunakan mesin *G.I.P* agar *Green Tire* tidak mudah lengket dengan karet bladder.

5. *Pricking*

Proses *pricking* merupakan tahapan sesudah *G.I.P* yaitu akan ditusuk-tusuk pada bagian tertentu di *Green Tire* agar udara yang terjebak diantara setiap lapisan dapat keluar. Proses ini dilakukan menggunakan mesin *Pricking*.

6. *Curing*

Curing merupakan proses pencetakan dimana ban luar dapat berbentuk sesuai dngan tipe ban. Pada proses ini, ban work in proses hasil *pricking* akan secara *computerized* oleh mesin akan mencetak ban agar dapat berbentuk menjadi bentuk akhir ban tersebut. Proses ini dilakukan dengan mesin *curing*, dimana terdapat mult atau cetakan khusus setiap tipe ban.

7. *Final Inspection*

Setelah proses *curing* selesai dan ban sudah dalam kondisi suhu yang mendukung sentuhan tangan, selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan kualitas oleh karyawan dengan sistem visual.

8. Storage

Setelah proses produksi, selanjutnya akan dilakukan penyimpanan dimana ban yang sudah melewati final inspection akan dipindahkan ke rack ban dan disusun rack bertumpuk dan dijalankan system FIFO.

Fasilitas Produksi

Perseroan mengoperasikan pabriknya nonstop selama 24 jam per hari dalam 3 shift dan beroperasi penuh selama setahun diluar libur nasional, berikut terlampir daftar mesin yang digunakan Grup Perseroan:

Daftar Mesin PT. King Tire Indonesia Tbk

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
1	1 Unit Komplit Set Sihi Vacum Pump Type Lph4	Dec-19
2	1bh Submersible Pump Ebara Type 80dl52	Dec-19
3	Two Step Expand Mc Drum, Spacer, Bead Holder	Dec-19
4	Buna Cb	Dec-19
5	5 Sets Ecostream Tire Mold	Dec-19
6	Tire Bladder	Dec-19
7	Pompa Hega	Dec-19
8	Ultrasonic Converter, Booster, Cutter, Generator	Dec-19
9	Rangkaian Kabel	Nov-19
10	2 Sets Tire Mold	Nov-19
11	Pompa Cdlf , Sj- 8-50 C/W Motor	Oct-19
12	Generator No Seri 811009	Oct-19
13	Pompa Sj 2-25 C/W Motor 5,5hp	Sep-19
14	Pompa Hega 6505 C/W Motor 90kw	Sep-19
15	Pompa Niso 80-50-315 C/W Motor 7,5hp	Sep-19
16	Elektro Motor 1,5hp	Sep-19
17	Plat Hitam (10lbr)	Sep-19
18	Converter, Part No 421348001 (4ts-C48-001) No.Seri : Gw41808	Aug-19
19	1 Unit Malika Pocket 12", Mesin BRT, Velg & Swing Arm	Aug-19
20	Mc Drum Stb Motorcycle , Spaver, Sasco, Rotor	Jul-19
21	Btu 1014 Ap+1t Tbm	Jun-19
22	Btu 1721 4p+1t Tbm	Jun-19
23	16inch Former Bead Gromet	Jun-19
24	Generator & Booster	Jun-19
25	Plat Hitam 8 X 4 X8 Kpa(5 Lbr)	Apr-19
26	Motorcycle Tire Mould	Mar-19
27	Plat Hitam 6 X 4 X8 (60lbr)	Mar-19
28	Plat Hitam 6 X 4 X 8 Gpa	Mar-19
29	Cangas Nitrogen Generator	Feb-19
30	Nitrogen Boster	Feb-19
31	Btu 0813 Building Machine (1set)	Feb-19
32	Stb 1216 Building Machine (2set)	Feb-19

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
33	Motorcycle Tire Mould 110/90-12 Kj (Inc Bomp Ring)	Jan-19
34	Motorcycle Tire Mould 100/90-12 Kj (Inc Bomp Ring)	Jan-19
35	Pompa Gear GI 25-5 /W Motor 2hp	Jan-19
36	Motorcycle Tyre Mold	Dec-18
37	1 Unit Timbangan Digital	Oct-18
38	Plat Hitam 6 X 4 X 8gpa (25lbr)	Jul-18
39	Ultrasonic Tire Cutting Assembly System	Jul-18
40	Hydraulic Pump	Jul-18
41	Solenoid Valve Oil Pump System	Jul-18
42	5 Set Bc Tire Mold	May-18
43	6 Set Bc Tire Mold	May-18
44	Pompa Fs 750 1hp	May-18
45	Duplex Extruder	Apr-18
46	Coolin Line	Apr-18
47	Pompa Air Wildedn	Apr-18
48	132 Lbr Plat Hitam	Mar-18
49	Rangkaian Kabel Listrik	Mar-18
50	25 Set Bc Tire Mold	Feb-18
51	Stb 20" Building Drum (2 Sets)	Feb-18
52	Tube Printer (1 Set)	Feb-18
53	13" Former (1set)	Feb-18
54	14" Former (1 Set)	Feb-18
55	1unit Mesin Las Falcom	Feb-18
56	Bicycle 2028 Stb Spring Turn Up Building Machine(5sets)	Jan-18
57	Accesories For Bicycle Bead Gromet (1set)	Jan-18
58	90 Lbr Plat Hitam	Jan-18
59	THE#34 TWO CAPACITY CURING MACHINE (10 Sets)	Jan-18
60	THE #34 TWO CAPACITY CURRING MACHINE (5sets)	Jan-18
61	The #34 Two Capacity Curing Machine 5sets (Usd 63.000)	Jan-18
62	HYDRAULIC CURRING PRESS (5sets)	Jan-18
63	MOTORCYCLE BUILDING M,ACHUNE HPT MC1421 (4 Sets)	Jan-18
64	MOTORCYCLE BUILDING M,ACHUNE HPT MC1421 (4sets)	Jan-18
65	Mesin Boiler Selesai Di Pasang	Jan-18
66	1set Tyre Building Machine Btu1316	Jan-18
67	The #34 Two Capacity Curing Machine (5 Sets Rijek/Rusak)	Jan-18
68	1set Tyre Building Machine Btu1721	Jan-18
69	1set Bead Forming Machine	Jan-18
70	7 Iron Cases Of Curing Bladder	Jan-18
71	4 Iron Cases Of Curing Bladder	Jan-18
72	Power Supply Of Ultrasonic Tire Cutting System (4sets)	Jan-18
73	Pompa Ra 150/20 C/W Motor 15kw	Jan-18
74	1set Ultrasonic Generator	Jan-18

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
75	1set Bead Wire Bic Machine	Jan-18
76	250-17 King Komodo Sp025-01 , Sp025-02	Dec-17
77	4 Lbr Plat Hitam 2438mm	Dec-17
78	275-17 King Komodo Sp026-05 , Sp026-06	Dec-17
79	275-17 King Komodo Sp026-02 , Sp026-04	Dec-17
80	Tire Mold 80/90-14 Kt Sp007-05	Nov-17
81	Tire Mold 250-17 Kl	Nov-17
82	Tire Mold 300-17 Kk	Nov-17
83	Tire Mold 75-17 Kr	Nov-17
84	Tire Mold 275-17 Kl	Nov-17
85	Plat Hitam 6 X 4 X 8 Gpa	Oct-17
86	1 Set Pembuatan Inserter Dies Bead Gromed U/Bead Gromed	Aug-17
87	3 Sets M/C Mold 2.75-17 Ks	Aug-17
88	3 Sets M/C Tire Mold 90/90-14 Kj	Aug-17
89	2 Sets M/C Tire Mold 70/90-17 Kj	Aug-17
90	2 Setsm/C Tire Mold 80/90-17 Kj	Aug-17
91	2 Sets M/C Tire Mold 2.75-17 Kk	Aug-17
92	2 Sets M/C Mold 2.50-17 Ks	Aug-17
93	1 Set M/C Tire Mild 2.50-17 Kk	Aug-17
94	33 Plat Hitam	Jul-17
95	Sv0750is7 - 4 No	Jul-17
96	2unit Pompa Cnp Zs 50-32-200	May-17
97	2 BOXES OF CURING BLADDER 80/90-17 & 80/90-14 20pcs	May-17
98	4 Lbr PLAT KAPAL 15 X 5 X 20	May-17
99	40 Lbr PLAT HITAM 6 X 4 X 8 KS	Apr-17
100	1 Unit Tangki Air Pinguin	Mar-17
101	Pompa Sj 8-25 C/W Motor 5,5hp	Jan-17
102	27 Lbr 'Plat Hitam	Jan-17
103	10 Unit Two Capacity Curing Machine	Dec-16
104	1 Unit Mesin Bias Cutter	Dec-16
105	10 Unit Gearbox Bonfig	Dec-16
106	281 Plat Hitam	Nov-16
107	1 Unit Alkaline Water	Nov-16
108	1 Unit Pompa Motor Besar	Nov-16
109	1 Unit Pompa Motor Kecil	Oct-16
110	2 Set Hpt Mc1421 Motorcycle Building Machine	Jul-16
111	1 Unit ULTRASONIC GENERATOR, CUTTER, CONVERTER, BOOSTER	May-16
112	1 Unit Transcyko Cycloidal Speed Reducer	Mar-16
113	1 Unit Wilden	Mar-16
114	2 Unit Mitsubishi Programable	Mar-16
115	5 Unit Two Capacity Curing Machine	Mar-16
116	1 Unit Valas 3Way Yoshitake	Feb-16

No.	Nama Mesin	Tahun Perolehan
117	1 Unit Gear Bonfig, AC Brake	Jan-16
118	2 Unit Building Machine + 7 Tire Mold	Jun-15
119	5 Unit Curing Press	Jan-15
120	1 Rubber Internal Mixer Xm-160	Jan-15
121	1 Rubber Internal Mixer Xm-110	Jan-15
122	3 Unit Building Mechine	Jan-15
123	1 Two Roll Rubber Mixing Mill Xk-610	Jan-15
124	2 Unit Building Mechine	Jan-15
125	1 Unit Buas Cutter	Jan-15
126	1 Unit Four Roll Rubber Calender Line	Jan-13
127	1 Unit Boiler Type BHF 10-76 CAP	Jan-13
128	5 Unit Curring Press & Hydraulic Power	Jan-13
129	5 Unit Curring Press & Hydraulic Power	Jan-13
130	1 Unit Cold Feed Extruder	Jan-13
131	1 Unit Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-13
132	1 Unit Wire Grommet Machine	Jan-13
133	2 Unit Travo 2000 KVA	Jan-13
134	3 Unit ELGI Oil Screw E 75	Jan-13
135	1 Unit Hot Extruder	Jan-13
136	Coolin Line	Jan-13

Daftar Mesin PT. King Tire Indonesia Tbk

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
1	1 Unit Pompa Zs 5032-200	Nov-20
2	2 Unit Pompa Zs 5032-200	Sep-20
3	2 Unit Compresor Ga 75p 10a & Mk5 Grafic	Jul-20
4	Sullair, Element, Fluid Petrotec Air Power	Dec-19
5	Cooling Tower	Nov-19
6	271 Lbr Plat	Sep-19
7	Cart Inner Tube Extrusion Process With Accessories	May-19
8	1set Din Rubber Abrasion Tester, Model No : Ext-2013din	Apr-19
9	1set Demattia Flex-Cracking Taster, Model No : Ekt -2012-Dft	Apr-19
10	1 Unit Kneader	Feb-19
11	1 Unit Mixing Mill	Feb-19
12	Trolley Chain, Y-Hanger, Track Rails, Transmision, Track	Jan-19
13	Pompa CHL	Dec-18
14	Neuron li Controler	Dec-18
15	Dispermeter Complete Set	Nov-18
16	54 Lbr Plat Hitam	Nov-18
17	Rak Ban	Nov-18
18	Cart Inner Tube Extrusion Process	Nov-18

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
19	Transcyko Cycloidal	Oct-18
20	Pompa Ra.	Oct-18
21	Pompa Ra , Pompa Ktz	Oct-18
22	1 Unit Cooling Tower Lbc-200	Oct-18
23	Plat Alluminium Tebal	Sep-18
24	1 Unit Mesin Paving	Sep-18
25	35 Lbr Plat Hitam	Sep-18
26	Kabel Listrik Mesin	Aug-18
27	18 Lbr Plat Hitam	Jul-18
28	Interver Fuji	Jul-18
29	Pipa Galvanis Wd	Jul-18
30	Extruder	Jul-18
31	10 Lbr Plat Hitam	May-18
32	Kabel Listrik Mesin	May-18
33	69 Lbr Plat Hitam	Apr-18
34	Plunger Tester Machine Model No. PI-2002b	Apr-18
35	Valas 4way, 3way, Plesure	Apr-18
36	Moving Die Rheometer Model No. 2003s	Apr-18
37	26 Lbr Plat Hitam	Mar-18
38	13 Lbr Plat Hitam	Feb-18
39	2 Sets Mesin Xk-550 Mixing Mill	Jan-18
40	Tcm Forklift Truck	Jan-18
41	56 Lbr Plat Hitam	Dec-17
42	1 Set Tube Splicer Of Model No. Ha-300	Dec-17
43	Pompa Eta-N 125	Nov-17
44	16 Lbr Plat Hitam	Nov-17
45	Pompa Ra 150 (1 Item)	Oct-17
46	Ga75+P A MI 400 50 Rif + Therm. Valve 60c Kit	Oct-17
47	Cooling Tower	Sep-17
48	Iner Tube Air Aspirator. Model No.Xmbc1	Sep-17
49	Iner Tube Automatic Locking Valve Core And Charging Machine	Sep-17
50	30 Lbr Plat Hitam	Aug-17
51	Cooling Tower Kst	Aug-17
52	Cooling Tower Kst	Jul-17
53	50 Lbr Plat Hitam	Jun-17
54	25 Lbr PLAT HITAM	Apr-17
55	Pressure Sensor Ifm	Apr-17
56	Tube Process Line With Standard Accessories 3 Set	Mar-17
57	Sv0750is7	Jan-17
58	1 Unit Pompa Sanyo	Jan-17
59	Mesin Xlj-200 Stainer	Dec-16
60	48 Lbr Plat Besi	Dec-16

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
61	3 Unit DC Motor Baldor INP 1750RPM	Nov-16
62	Ga75+P A 10 MI 400 50 Rif	Oct-16
63	Instalasi Kabel Listrik Mesin	Sep-16
64	2 Set Xk-450 Mixing Mill	Aug-16
65	Mesin Tube Splicer Ha-22058	May-16
66	1 Unit Pompa CNP	May-16
67	4 Pcs Rubber Holder For Ha-220 Tube Splicer	Apr-16
68	Hitachi Electric Chain Hoist 2 Unit	Jan-16
69	XK-550 M Ixing Mill	Dec-15
70	1 Unit Forklift FD25C3Z Kasana	Oct-15
71	1 Unit Hitachi Electric Chain 3 Ton	Sep-15
72	Inverter A510 125HP/90KW 440V 3PH	Aug-15
73	1 Set Hot Feed Extruder	Jul-15
74	1 Set Cold Feed Extruder	Jul-15
75	Hand Pallet 2 T Dan 3 T	Jul-15
76	Hitachi Electric Chain Hoist 1 Unit	Jun-15
77	1 Unit Extruder	Nov-14
78	3 Unit Mixing	Nov-14
79	Splicing Tube Holder	Mar-14
80	Motor Teco	Feb-14
81	Internal Mixer S'part	Feb-14
82	1 Unit Trafo 2500 Kva	Oct-13
83	Tube Splicer Ha-220	Sep-13
84	Sasco Piston Valve 12"	Aug-13
85	2 Unit Vacum Pump & Blower	Dec-12
86	Tangki Ishikawa Jima Harima-Joy, Japan High, Presure	Jul-08
87	Splicing Ha-540 For L/T & L/B With Accessories	Jun-08
88	Open Rol Motor 50 Hp, Dust Collector, Vacum Pump 10hp	Apr-08
89	Splicing Ha-540 For L/T & T/B With Accessories Taiwan	Jan-08
90	1 Unit Tanki Solution	Jan-07
91	1 Unit Mesin Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-07
92	1 Unit Traffo	Jan-07
93	2 Unit Two Roll Rubber Mixing Mill	Jan-07
94	1 Unit Rubber Mixing	Jan-07
95	1 Unit Mesin Extruder Tire Motorcycle & Bicycle	Jan-07
96	3 Unit Mesin Tire Mobil Press/ Auto Curing Press	Jan-07
97	1 Unit Traffo	Jan-07
98	2 Unit Generator Set	Jan-07
99	4 Unit Mesin Feed Mill	Jan-06
100	12 Unit Mesin Press Hydraulic	Jan-06
101	3 Unit Mesin Batch Off	Jan-06
102	1 Unit Moving Die Rheometer	Jan-06

No.	Daftar Aset Mesin PT. United Kingland	Tahun Perolehan
103	1 Unit Mesin Inner Tube Automatic Locking Valve Core & Charging Machine	Jan-06
104	1 Unit Dust Colector	Jan-06
105	1 Unit Mooney Viscometer	Jan-06
106	1 Unit Cooling Tower	Jan-04
107	6 Unit Tanki Solution	Jan-02
108	1 Unit Milling Machine	Jan-02
109	1 Unit Traffo Welder	Jan-02
110	1 Unit Kompresor Udara	Jan-01
111	1 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-01
112	1 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-01
113	2 Unit Traffo Welder	Jan-01
114	1 Unit Oven	Jan-00
115	1 Unit Kompresor Udara	Jan-00
116	1 Unit Mesin Extruder Butyl	Jan-99
117	2 Unit Traffo Welder	Jan-96
118	1 Unit Mixer Gum	Jan-95
119	1 Unit Strenght Tensile	Jan-94
120	2 Unit Mesin Inner Tube Vacuum	Jan-91
121	1 Unit Milling Machine	Jan-87

Lokasi Pabrik	Luas	Tahun beroperasi	Fasilitas Utama	Produk
Serang	275.965m ²	Sejak 2013 untuk PT King Tire Indonesia Tbk	- Kantin Karyawan - Lapangan Olahraga - Musholla - Laboratorium - 3 (tiga) Ruang <i>Meeting</i> - Mess Karyawan	Ban Luar
		Sejak 1977 untuk PT United Kingland	- Kantin Karyawan - Lapangan Olahraga - Musholla - Laboratorium - 3 (tiga) Ruang <i>Meeting</i> - Mess Karyawan	Ban Dalam

Manajemen Persediaan

Kelancaran proses dan aktivitas produksi bergantung pada manajemen persediaan yang Perseroan terapkan. Perseroan menerapkan metode *First In First-Out* (FIFO) untuk barang *work in process* (WIP) dan *finished good* (FG). Perseroan membeli bahan baku dari dalam negeri dan luar negeri. Sehubungan dengan mengatasi keterbatasan bahan baku utama, Perseroan telah mempunyai minimum persediaan untuk 2 (dua bulan) produksi.

Pengendalian Kualitas Produk

Dengan pengalaman beroperasi lebih dari 40 tahun di industri ban Indonesia, Perseroan telah menunjukkan eksistensinya di industri tersebut dengan menjadi salah satu produsen ban lokal terkemuka. Perseroan secara berkelanjutan terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik para pelanggannya dengan menghasilkan produk-produk ban yang berkualitas tinggi hal ini dibuktikan dengan Perseroan telah mendapatkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Strategi Usaha

1. Peningkatan *Brand Knowledge*

Perseroan memperkuat *brand knowledge* atau membangun kesadaran dan pengetahuan merek di masyarakat agar Perseroan dapat menjadi salah satu manufaktur terkemuka dalam industri ban nasional. Perseroan melakukan peningkatan *brand knowledge* melalui:

- Mendukung dan berkolaborasi dengan pembalap dan event balapan untuk mempromosikan produknya
- Memperkuat kemitraannya dalam negeri dengan melakukan Gathering Tahunan Distributor se Nasional
- Meningkatkan keterlibatan Perseroan pada Media sosial dengan mengendorse beberapa selebgram otomotif terkenal
- Mengikuti pameran pada event PRJ di kemayoran, Trade X di Ice BSD

2. Distribusi dan Kemitraan

Perseroan memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya ke berbagai daerah di Indonesia serta ke luar negeri melalui mitra-mitra distributor yang telah loyal dengan Perseroan. Distributor Perseroan telah memiliki pengalaman dan sudah merupakan distributor untuk beberapa merek ban serta berkomitmen pada target penjualan dalam memasarkan produk Perseroan.

3. Berpegang teguh pada kualitas

Perseroan selalu mengutamakan serta menjunjung tinggi kualitas pada produk yang diberikan pada distributor hingga pelanggan. Bagi Perseroan, ketika kualitas yang diberikan sesuai dengan SNI dan E4 serta ekspektasi dari pelanggan, maka Perseroan akan lebih dipercaya serta mempunyai hubungan yang baik dengan distributor dan pelanggan.

4. Riset dan Pengembangan produk

Perseroan dalam pengembangan produk, selalu mengedepankan kebutuhan pasar, Perseroan selalu melihat perkembangan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia dimana ketika Perseroan melihat ada trend baru atas jenis ban tertentu. Selain itu Perseroan melakukan riset kepada komunitas-komunitas otomotif di Indonesia atas jenis ban baru tersebut, kemudian setelah ditentukan, Perseroan akan melakukan pengujian lapangan atas kualitas dan durabilitas ban yang akan diproduksi masal oleh tim khusus RND Perseroan, selain itu kualitas ban tersebut agar sesuai dengan SNI dan E4

Penjualan dan Pemasaran

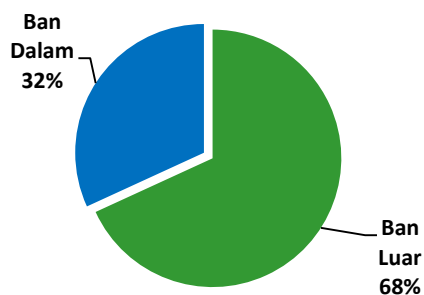
Perseroan dan Perusahaan Anak memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh provinsi di Indonesia serta ke luar negeri melalui jaringan distributor. Produk yang dijual oleh Perseroan adalah Ban Luar untuk sepeda dan sepeda motor sedangkan produk yang dijual oleh Perusahaan Anak adalah Ban Dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk. Perseroan juga telah menjadi salah satu supplier ban *Original Equipment Manufacture* (OEM) Ban Luar kendaraan bermotor yaitu Planet Ban dengan merek Ecostreet.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan produk oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

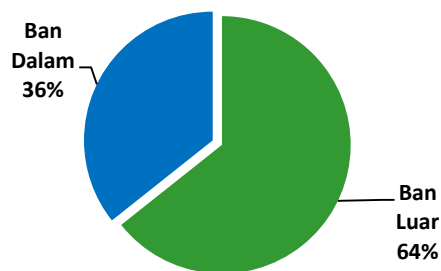
(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2022	2021	2022
Ban Luar	245.897.805.923	248.328.073.119	165.260.801.916
Ban Dalam	114.769.133.556	136.011.423.368	130.972.795.681
Total	360.666.939.479	384.339.496.487	296.233.597.597

Pertumbuhan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dari kegiatan usaha utama yang dijalankan sampai dengan September 2022 :



Total Penjualan
Januari – September 2022
Rp 360.666.939.479



Total Penjualan
Januari – Desember 2021
Rp 384.339.496.487

Adapun area pemasaran lokal mencakup seluruh Provinsi di Pulau Jawa mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Provinsi di Pulau Sumatera mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Area Pemasaran Perseroan



Persaingan Usaha

Dengan terus berkembangnya permintaan kendaraan motor di pasar *domestic* maupun pasar global, tidak dapat dipungkiri bahwa industri ban luar maupun otomotif secara keseluruhan juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Faktor utama dari persaingan adalah pada aspek kualitas produk, kapasitas produksi, distribusi, pemasaran dan persaingan harga yang juga dapat ditawarkan pada perusahaan yang membutuhkan produk ban OEM.

Beberapa pesaing utama Perseroan, antara lain:

1. PT Gajah Tunggal Tbk
2. PT Suryaraya Rubber Industries
3. PT Multi Strada Arah Sarana Tbk
4. PT Industri Karet Deli
5. PT Kenda Rubber Indonesia

Perseroan dan Perusahaan anak tidak menganggap perusahaan sejenis lainnya akan menciptakan persaingan usaha yang negatif dan berdampak kurang baik bagi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun Perseroan dan Perusahaan Anak akan selalu berusaha untuk menjadi efektif dan efisien dalam bidang usahanya sehingga dapat menjadi perusahaan penyedia ban yang terpercaya. Sehingga Perseroan harus menjaga kualitas dan distribusi untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini.

IV. Keunggulan Kompetitif

Dengan pengalaman Grup Perseroan yang telah beroperasi dalam industri ban sejak tahun 1977, Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan manufakturing ban terkemuka yang dengan berkomitmen untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam upayanya mencapai tujuan tersebut, Perseroan didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut :

1. Pengalaman Grup selama 40 tahun
Grup Perseroan memiliki pengalaman dan telah beroperasi dalam industri ban lebih dari 40 tahun di Indonesia. Hal ini membuat Perseroan memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, khususnya di bidang industri ban luar dan ban dalam.
2. Kualitas Produk tinggi
Perseroan saat ini sudah memiliki Sertifikat SNI dan Sertifikat E4. Sertifikat SNI Perseroan gunakan sebagai pengendalian mutu produk Perseroan untuk dapat dijual di Indonesia dan Sertifikat E4 Perseroan gunakan sebagai pengendalian mutu produk untuk dijual di luar negeri. Sehingga produk ban yang diproduksi oleh Perseroan merupakan produk yang berkualitas, selain itu Perseroan selalu melakukan pengujian berkala setiap tahunnya untuk SNI dan setiap 2 tahun untuk E4.
3. Produk yang beragam
Perseroan memiliki produk yang sangat beragam sehingga dapat diserap oleh berbagai jenis segmen pelanggan
4. Mitra Distribusi
Perseroan memiliki kemitraan-kemitraan yang loyal dan kompeten dengan rata-rata umur kerjasama lebih dari 7 (tujuh) tahun.

V. Prospek Usaha

Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok dan logistik, hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian, Perseroan mampu menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama masa-masa tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam menanggulangi pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku.

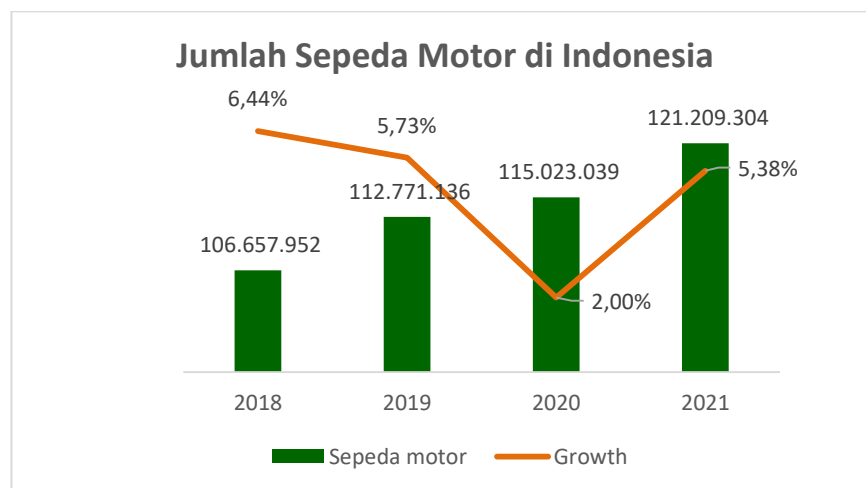
Ditengah kondisi industri manufaktur ban yang belum sepenuhnya pulih, Perseroan optimis bahwa strategi dan inisiatif yang optimal dan efektif dapat membantu Perseroan menghadapi berbagai tantangan bisnis.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2021

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)			
	2018	2019	2020	2021
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261	246.354
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405	5.438.475
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746	16.903.094
Sepeda motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039	121.209.304
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451	143.797.227

Sumber : BPS

Bila dilihat berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor untuk jenis sepeda motor dari tahun ke tahun terbilang cukup stabil. Pada tahun 2018, secara total jumlah kendaraan bermotor adalah 126.508.776 unit yang kontribusi terbesarnya diberikan oleh jenis sepeda motor sebesar 106.657.952 unit. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan pada total jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan dengan jumlah 133.617.012 unit, dengan kontribusi kenaikan terbesar diberikan oleh sepeda motor. Kemudian, pada tahun 2020, dimana dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh jenis kendaraan bermotor tetap mengalami kenaikan di tahun tersebut namun perubahan kenaikannya menurun dari pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor secara total mengalami kenaikan dari sebesar 133.617.012 unit di tahun 2019 menjadi 136.137.451 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dimana mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6% dari sebelumnya jumlah kendaraan bermotor sebanyak 136.137.451 pada tahun 2020, menjadi 143.797.227 pada tahun 2021.



Sumber : BPS

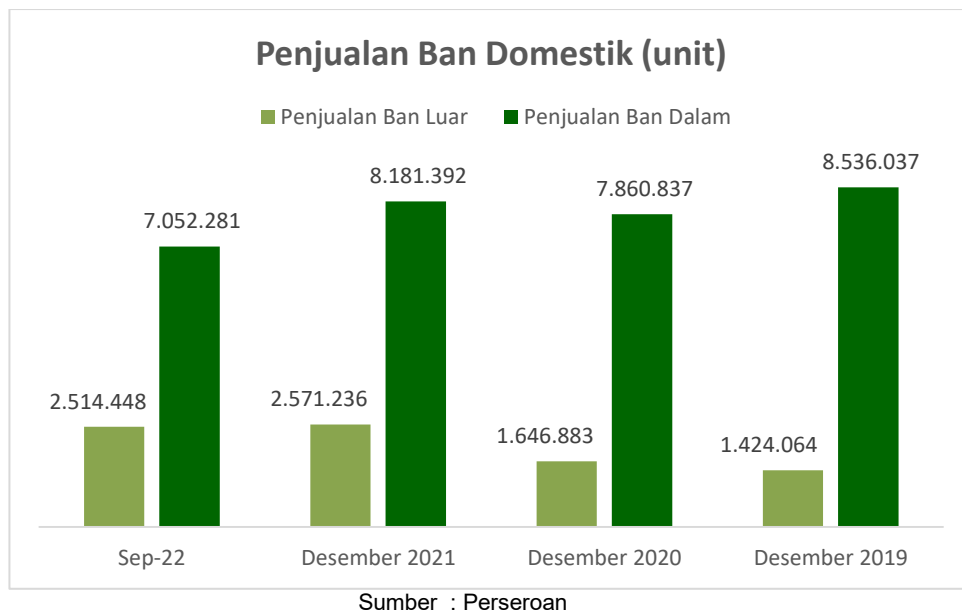
Jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 121.209.304 unit, jumlah tersebut meningkat sebesar 5,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 115.023.039 pada tahun 2020. Jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 meningkat 6,44% menjadi 106.657.952, tahun 2019 meningkat 5,73% menjadi 112.771.136 dan tahun 2020 meningkat 2% menjadi 115.023.039.

Dengan melihat data di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa dalam kondisi dengan adanya pandemi COVID-19, perkembangan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Bagi Perseroan, pada tahun-tahun yang akan datang, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tren pemulihan yang dimulai sejak tahun 2021 dan 2022, industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan, sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah permintaan ban kendaraan.

Pasar Domestik

Pada pasar domestik, Perseroan memprediksikan bahwa industri manufaktur ban kendaraan bermotor dan sepeda akan terus melanjutkan upaya pemulihan. Meskipun dilakukan secara bertahap, upaya pemulihan ini turut membuka optimisme industri untuk bangkit. Selain itu, program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah dinilai cukup berhasil, dimana mayoritas penduduk Indonesia telah menerima dosis vaksinasi. Dengan begitu, mobilitas masyarakat akan meningkat dan berdampak terhadap peningkatan penggunaan kendaraan bermotor yang turut membuka peluang permintaan ban kendaraan bermotor dan sepeda.

Grafik Penjualan Ban Domestik Perseroan



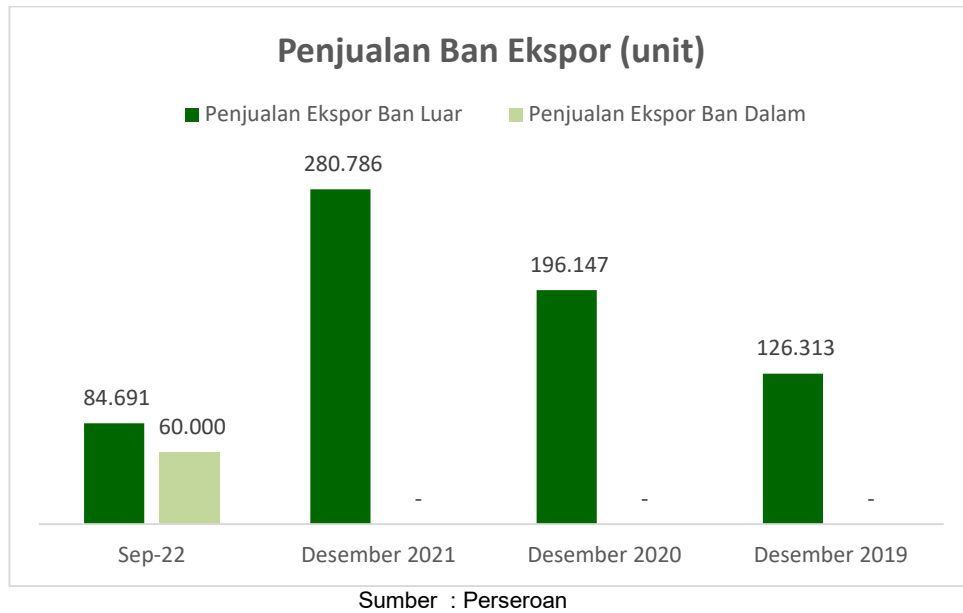
Pasar Ekspor

Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan tren positif di pasar ekspor. Pasar ekspor Perseroan diisi oleh berbagai produk unggulan Perseroan yang menggunakan merek Kingland yang telah dipasarkan secara internasional sejak tahun 2014. Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan penetrasi pasar dan

memperluas jaringan pasar baru yang memiliki potensi untuk produk Perseroan pada masa yang akan datang.

Perseroan berharap bahwa tren pemulihan yang terus berlanjut serta capaian positif tahun 2022 akan mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan pada masa yang akan datang.

Grafik Penjualan Ban Ekspor Perseroan



IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan anggota Allinial Global berdasarkan laporan auditor independen tanggal 28 Februari 2023 dengan Akuntan Publik David Kurniawan, CPA, No Izin Akuntan Publik : 1023. Perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022
EKUITAS	
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham	
Modal dasar – 250,000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018	138.901.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-
Tambahan modal disetor	13.572.345.057
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)
Saldo laba	
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442
Jumlah	171.923.885.210
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958
JUMLAH EKUITAS	181.152.321.168

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 September 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 September 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar – 250,000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	138.901.000.000	•	•	•

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan
serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-			
Tambahan modal disetor	13.572.345.057	•	•	•
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atau imbalan kerja karyawan	(5.660.016.273)			
Saldo laba		-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	10.229.716.984			
Belum ditentukan penggunaannya	14.880.839.442			
Jumlah	171.923.885.210			
Kepentingan non-pengendali	9.228.435.958			
Total	181.152.321.168	•	•	•

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.
5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan mulai dari tahun buku 2023 (*audited*), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, kecuali untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;

e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perseroan membagikan dividen saham pertama kali sejumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada pemegang saham.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan dan Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
	PT Victoria Sekuritas Indonesia	[•]	[•]	[•]
	TOTAL			

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Rentang nilai harga penawaran saham Perseroan berada pada kisaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikarenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan". Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 SEPTEMBER 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan

Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower
Grand Rubina Business Park Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021 – 2911 5611
Fax. -

Laporan audit yang berakhir pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 ditandatangani oleh David Kurniawan CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1023

No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perikatan Prosedur No. 072-P/MR/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Lou & Mitra Law Firm

Rukan Permata Senayan Blok E No.38,
Jl Tentara Pelajar, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Telp. 021 – 5794 0929
Fax. 021 – 5794 0930

No. STTD : STTD.KH-371/PM.223/2019 atas nama Camilla Nuridzkia, S.H

Tanggal STTD : 29 Oktober 2019

HKHPM No. Anggota: : 201925

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 001/SPLKH/KTI/IX/2022 tertanggal 13 Juli 2022.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 2
Komplek Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 4-5
Jakarta Barat

Telp. 021 – 6301 511
Fax. 021 – 6337 851

No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 atas nama Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn

Tanggal STTD : 6 Februari 2023

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran No. 880/SI.Not/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. 021– 2936 5278 / 98
Fax. 021 – 2928 9961

Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek

No. Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penawaran No. PW-176/KTI/102022 tertanggal 4 Oktober 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham Hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) 22111);
 - Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192);
 - Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI 64200) ;
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama :
 - Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban;
 - b. Kegiatan usaha penunjang :
 - Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet
 - Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 55,56% (lima puluh lima koma lima enam persen) atau sejumlah 2.778.020.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp138.901.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Moda
- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang

- dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang :
 - a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau
 - b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
6. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
7. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
9. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
10. Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPSTahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.

- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,13% (dua puluh koma satu tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah) sampai Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp75.600.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 27 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 28 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 2 Mei 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

9. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**")

PT Victoria Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Mei 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(i). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan

Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Berikut ini adalah ketentuan terkait Penjatahan Terpusat :

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel

Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai dengan pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - vi. alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).
6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.600.000.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp96.600.000.000,- (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, dengan batasan

minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% dari Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Mengingat jumlah minimal porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 20,70% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari total nilai maksimal Penawaran Umum, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin a 1, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan efek di Bursa Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

13. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 27 April – 2 Mei 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia
Graha BIP Lt. 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 10230
Website: www.victoria-sekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan Hukum LOU & Mitra Law Firm.

LAW FIRM LOU & MITRA

Rukan Permata Senayan Blok E No.38 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210
Phone: (62) (21) 5794-0929, Facsimile: (62) (21) 5794 0930
info@loumitralawfirm.com | www.loumitralawfirm.com

No. 028/PSH-KTI/LCS/III/2023

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepada Yang Terhormat:

PT King Tire Indonesia Tbk. ("Perseroan")
Jl. Raya Serang Km. 68, Kel. Nambo Ilir, Kec. Kibin,
Kab. Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42185

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2023 ("Penawaran Umum Perdana")

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp.50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham dan Harga Penawaran sebesar Rp.108,- (seratus delapan Rupiah) sampai dengan Rp.138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham, dan penerbitan sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh Rupiah), dimana setiap pemilik 2 (dua) saham baru Perseroan berhak untuk memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dan setiap 1 (satu) Waran Seri I tersebut memberikan hak pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, maka kami, Kantor Hukum LOU & Mitra Law Firm, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 001/SPLKH/KTI/IX/2022 perihal Penunjukan Lembaga Konsultan Hukum Independen tertanggal 22 September 2022 untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan anak usahanya yaitu PT United Kingland ("**UKL**") serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan dan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("POJK No. 30/2015").

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: 027/LPSH-KTI/LCS/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 ("LPSH").

Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk ("POJK No. 7/2017");
2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017"); dan
3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017").

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami sebelumnya Nomor: 024/PSH-KTI/LCS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

I. RUANG LINGKUP

- a. Dalam LPSH sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 atas:
 - i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan dan UKL, Anggaran Dasar Perseroan dan UKL beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan UKL; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan UKL, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dan UKL dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan dan UKL, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan dan UKL; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan

perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;

- ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan dan/atau UKL atau pihak Perseroan dan/atau UKL yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan UKL dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;
- c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan dan UKL, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan dan UKL, serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini diberikan dalam rangka penafsiran menurut hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan LPSH sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan UKL atau pihak lain dari Perseroan dan UKL yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan UKL atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan

kepada Perseroan dan UKL berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;

- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam LPSH, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan dan UKL adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. King Tire Indonesia No. 1 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 26 Agustus 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010. (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Seluruh pemegang saham pendiri Perseroan telah memenuhi kewajiban penyeteroran modal secara penuh ke dalam Perseroan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**), dengan bukti penyeteroran yang sah. Dengan demikian, Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (**"KUHD"**) yang berlaku saat UKL didirikan, dinyatakan bahwa sebelum Perseroan dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada presiden atau penguasa yang ditunjuk presiden untuk memperoleh izinnya, dan berdasarkan Pasal 50 KUHD izin termasuk dalam Pasal 36 KUHD tidak akan diberikan kecuali bila ternyata para pendiri pertama bersama-sama mewakili paling sedikit 1/5 dari modal perseroan.

Dalam akta pendirian UKL yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1972 dinyatakan *"dari saham-saham tersebut, maka telah diambil dan disanggupi dibayar penuh dengan uang tunai."* Selanjutnya, akta pendirian UKL disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/299/7. pada tanggal 6 September 1974 (**"Pengesahan Pendirian UKL"**). Dalam Pengesahan Pendirian UKL dinyatakan bahwa *"akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas"*. Dengan demikian, syarat-syarat yang diperlukan termasuk dalam hal ini penyeteroran modal pendiri dengan uang tunai pada saat pendirian UKL diasumsikan telah disetorkan karena izin dan/atau pengesahan akta

pendirian UKL telah diperoleh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta pemeriksaan Konsultan Hukum atas Neraca PT United Kingland/Company Limited Periode 26 Djuli 1972 tertanggal 26 Juli 1972 yang ditandatangani oleh M. Susanto selaku Direktur UKL pada saat itu, Akta Pendirian UKL, Pengesahan Pendirian UKL, dan Surat Pernyataan UKL tertanggal 15 Maret 2023, penyetoran modal para pemegang saham pada saat UKL didirikan adalah dilakukan dengan uang tunai pada tanggal 26 Juli 1972, dengan rincian sebagai berikut:

- a) M. Susanto sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah); dan
- b) Ateng sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah).

3. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia No. 143 tanggal 14 Desember 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia, Tbk tertanggal 15 Desember 2022, dan telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.03-0326491 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT King Tire Indonesia, Tbk No. AHU-AH.01.09-0087022 tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252363.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043983 tanggal terbit 20 Desember 2022. ("**Akta No. 143 Tahun 2022**").

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f UUPT, atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 143 Tahun 2022 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 143 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak

menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 143 Tahun 2022 di atas dalam TBN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 143 Tahun 2022 di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 33/2014**").

Perseroan dan UKL telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

4. Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri ban luar dan ban dalam, industri barang dari karet untuk keperluan industri, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha utama Perseroan adalah Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (kode KBLI 22111), yang mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban
- b) Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - 1) Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (kode KBLI 22192), yang mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet
 - 2) Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.

Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- 3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Maksud dan kegiatan usaha Perseroan dan UKL telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020.

Perseroan dan UKL telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. King Tire Indonesia No. 103 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia tanggal 12 Desember 2022, dan telah diterima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT King Tire Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324823 tanggal 12 Desember 2022, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0249709.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 101, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 043982 tanggal terbit 20 Desember 2022. (**Akta No. 103 Tahun 2022**) yakni sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	Rp.250.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Harris Muliawan	1.121.180.000	Rp.56.059.000.000,-	40,36
Indra Muliawan	554.340.000	Rp.27.717.000.000,-	19,95
Hardi Muliawan	2.500.000	Rp.125.000.000,-	0,09
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	Rp.55.000.000.000,-	39,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.778.020.000	Rp.138.901.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Portepel	2.221.980.000	Rp.111.099.000.000,-	

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan dan UKL dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 7/2017 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh peningkatan modal dasar Perseroan dan UKL telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUP. Selain itu, Perseroan dan UKL telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Pemilik Manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan adalah Harris Muliawan.

Dalam rangka pelaksanaan:

- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pengkinian data pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 Juni 2022 melalui Notaris Dewi Octaria, S.H., M.Kn.
- Ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 143 Tahun 2022 telah menetapkan Harris Muliawan sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan dan pemenuhan persyaratan Pemilik Manfaat Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Perpres 13/2018 serta Pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) POJK 3/2021.

Bahwa peningkatan penyertaan modal oleh para pemegang saham di dalam Perseroan dilakukan di dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan kepada OJK. Dengan

W

demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, Harris Muliawan, Indra Muliawan, Hardi Muliawan, dan PT Kingland Investindo Nusantara dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, diantaranya sesuai ketentuan POJK No. 8/2017 Pasal 11 huruf b yaitu termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Harris Muliawan
Direktur	: Ferry Candra Kusuma
Direktur	: Aneka Warna
Direktur	: Habibullah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Indra Muliawan
Komisaris	: Hardi Muliawan
Komisaris Independen	: Danny Setiawan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 143 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Diego Armando

Komite Audit

Ketua Komite Audit	: Danny Setiawan
Anggota Komite Audit	: Linda
Anggota Komite Audit	: Christina Wati

Unit Audit Internal

Widikdo

Bahwa Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 35/2014"**); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (**"POJK No. 56/2015"**).

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 34/2014"**) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT King Tire Indonesia Tbk No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Danny Setiawan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Hardi Muliawan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Indra Muliawan

7. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau UKL pada saat Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan dan UKL secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan dan/atau UKL, pada saat Pemeriksaan Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan UKL tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perkara/sengketa yang melibatkan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau UKL secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

W

8. Perseroan dan UKL telah memperoleh sebagian besar izin-izin dan/atau melaksanakan kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dan diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana izin-izin dan/atau kepatuhan-kepatuhan tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Namun demikian, Perseroan dan/atau UKL belum memiliki perizinan dan/atau kepatuhan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Entitas	Izin/Kepatuhan	Konsekuensi
a.	Perseroan	Izin Pengusahaan Air Tanah ("SIPA")	Berdasarkan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"), setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa SIPA, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
b.	Perseroan	Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-P	Dengan tidak ada Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-P, maka Perseroan tidak dapat melakukan impor produk tekstil, sehingga apabila Perseroan melakukan impor tanpa persetujuan impor maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor disebutkan bahwa Terhadap kegiatan Impor atas Barang berupa Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-P (Permendag No. 25 Tahun 2022): - Perseroan yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam

			Permendag No. 25 Tahun 2022 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No. 25 Tahun 2022 ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan di atas ditanggung oleh Perseroan.
c.	Perseroan	Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya API-P	Dengan tidak ada Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya API-P, maka Perseroan tidak dapat melakukan impor produk Bead Wire, sehingga apabila Perseroan melakukan impor tanpa persetujuan impor maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 Permendag No. 25 Tahun 2022: - Perseroan yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No. 25 Tahun 2022 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendag No. 25 Tahun 2022 ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan di atas ditanggung oleh Perseroan.
d.	UKL	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")	Berdasarkan Pasal 274 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

			Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("PP Bangunan Gedung"), SLF harus diperoleh oleh UKL sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 327 PP Bangunan Gedung, Perseroan yang melanggar ketentuan Pasal 274 ayat (2) PP Bangunan Gedung dapat dikenai sanksi administrasi.
e.	UKL	SIPA	Berdasarkan Pasal 70 huruf c UUCK, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa SIPA, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Namun demikian, Perseroan dan/atau UKL telah mengajukan permohonan-permohonan sebagai berikut:

- a) Perseroan telah melakukan pengurusan SIPA sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 25 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten, dan hingga tanggal Pendapat Hukum ini pengurusan SIPA Perseroan masih dalam proses Rekomendasi BBWS sebagaimana berdasarkan Alur Proses SIPA tertanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT Akbaro Putra Gemilang selaku konsultan, dengan alur sebagai berikut:

No	Tahapan Proses	Keterangan
1	Pemberkasan	√
2	Rekomendasi PDAM	√
3	Rekomendasi BBWS	Sedang dalam proses
4	Kajian	-
5	Rekomendasi SIPA	-

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Perseroan bahwa pengurusan izin SIPA ditargetkan akan selesai pada 17 April 2023.

- b) Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-P sebagaimana berdasarkan No. Berkas 233 tertanggal 28 Februari 2023 kepada Kementerian Perindustrian melalui website <http://siinas.kemenperin.go.id/e-services/vki/>. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, permohonan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-P masih dalam proses Verifikasi Kemampuan

Industri Komiditas TPT oleh pihak ketiga, yang merupakan salah satu syarat permohonan berdasarkan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Impor. Berdasarkan Konfirmasi Order No. 2307/PIK-III/FIK/2023 tanggal 14 Maret 2023 Verifikasi Kemampuan Industri akan dilakukan oleh PT Sucofindo selaku surveyor dengan waktu pelaksanaan 5 (lima) hari kerja terhitung setelah pelaksanaan verifikasi lapangan dan dokumen lengkap, dan melalui email dari fauzan@sucofindo.co.id pada tanggal 28 Maret 2023 PT Sucofindo telah menjadwalkan kunjungan pada minggu berikutnya.

Berdasarkan tangkapan layar pengurusan izin di SIINas pada website http://siinas.kemenperin.go.id/e-services/vki/berkas_idx.php, seluruh berkas persyaratan verifikasi kemampuan industri (terdapat 5 berkas) telah dipenuhi oleh Perseroan.

- c) Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya No. 4100089476EDF tertanggal 17 Maret 2023 kepada Kementerian Perindustrian melalui website <http://neraca-komoditas.insw.go.id/v2/rencana-kebutuhan>. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, proses permohonan masih dalam tahap verifikasi oleh Kementerian Perindustrian, dimana seluruh dokumen persyaratan telah dilengkapi Perseroan sebagaimana berdasarkan Konfirmasi Kelengkapan Data dalam website <http://neraca-komoditas.insw.go.id/v2/rencana-kebutuhan/view>.
- d) UKL telah melakukan pengurusan SIPA sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 25 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten, dan hingga tanggal Pendapat Hukum ini pengurusan SIPA UKL masih dalam proses Rekomendasi BBWS sebagaimana berdasarkan Alur Proses SIPA tertanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT Akbaro Putra Gemilang selaku konsultan, dengan alur sebagai berikut:

No	Tahapan Proses	Keterangan
1	Pemberkasan	√
2	Rekomendasi PDAM	√
3	Rekomendasi BBWS	Sedang dalam proses
4	Kajian	-
5	Rekomendasi SIPA	-

- e) UKL telah melakukan pengurusan SLF sebagaimana berdasarkan bukti *screenshot* permohonan online melalui website <https://simbg.pu.go.id/> dengan nomor registrasi:
- 1) SLF-360416-11082022-01;
 - 2) SLF-360416-11082022-02;
 - 3) SLF-360416-11082022-03;
 - 4) SLF-360416-11082022-04;
 - 5) SLF-360416-11082022-05;
 - 6) SLF-360416-11082022-06;
 - 7) SLF-360416-11082022-07;
 - 8) SLF-360416-14072022-01;

Selanjutnya, hingga tanggal Pendapat Hukum ini pengelolaan SLF UKL sedang dalam proses pengolahan data atas luas yang dimohonkan sebesar 10,5 ha (sepuluh koma lima hektar) oleh instansi terkait sebagaimana berdasarkan laporan PT Sies Konsultama selaku konsultan, serta berdasarkan keterangan dari Perseroan bahwa pengelolaan izin SLF UKL ditargetkan akan selesai pada 17 April 2023.

Bahwa perolehan sebagian besar izin-izin yang dimiliki dan/atau pelaksanaan kepatuhan-kepatuhan oleh Perseroan dan/atau UKL, termasuk perpanjangannya, tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan/atau UKL, dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah dan berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga mengikat Perseroan dan/atau UKL sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan dan UKL telah melakukan pelaporan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("UU WLK"), dan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Perseroan dan UKL telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan Perseroan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS Kesehatan").

Perseroan dan UKL telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perseroan dan UKL telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana telah dilakukan pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan demikian, Perseroan dan UKL telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").

11. Kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan dan/atau UKL atas aset atau harta kekayaan berupa benda bergerak dan hak kekayaan intelektual yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Perseroan belum memperoleh sertifikat merek atas kekayaan intelektual berupa merek King Shark, King Puma, dan King Leopard. Dengan demikian, terdapat potensi gugatan apabila terdapat pihak yang merasa memiliki merek dan/atau logo serupa dengan yang digunakan Perseroan.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, baik harta tetap maupun bergerak serta benda tidak berwujud, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut, kecuali harta kekayaan Perseroan yang sedang dijaminkan sebagai berikut:

No.	Kreditur	Harta Kekayaan Yang Dijaminkan
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Mesin-mesin pabrik ban luar berikut peralatan kelengkapannya milik Perseroan yang terletak di Jalan Raya Serang Kilometer 68, Desa Namboilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat, yang diikat dengan Jaminan Fidusia dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00412972.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015.
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bangunan pabrik ban luar, boiler, rumah kolam CWS, milik Perseroan berikut sarana, prasarana, dan turutan-turunannya, yang terletak di Jalan Raya Serang Kilometer 68, Desa Namboilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat yang diikat dengan Jaminan Fidusia dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00412970.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015.

Apabila Harta Kekayaan Yang Dijaminkan Perseroan tersebut di atas akan dieksekusi, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan.

12. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan UKL telah mengasuransikan harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam LPSH kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 15 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Direksi UKL tertanggal 15 Maret 2022, jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan UKL telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
13. Bahwa terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum Perdana di dalam perjanjian kredit Perseroan sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 12 tanggal 17 November 2015, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 16 November 2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 06 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 5 April 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 November 2021; (viii) Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (ix) Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 15 November 2022, oleh dan antara Perseroan selaku debitur dengan PT. Bank Bank Mandiri Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku kreditur *juncto* Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri, Tbk ("**SUPK Bank Mandiri**") (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan**");
- b) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 No. 08 tanggal 10 November 2017, dibuat di hadapan Adrian Djuani, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 14 November 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 12 November 2020; dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 November 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan (vi) Addendum VI (Keenam) Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 15 November 2022, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; oleh dan antara Perseroan selaku debitur dengan Bank Mandiri selaku kreditur *juncto* SUPK Bank Mandiri (untuk selanjutnya "**Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-Perseroan**"); dan
- c) Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No. MCFA/000533/KTI/10022020 tertanggal 23 Maret 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku debitur dengan Citibank, N.A ("**Citibank**")

selaku kreditur ("Perjanjian Induk Kredit Citibank-Mandiri").

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Perjanjian Kredit Perseroan").

Adapun pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum Perdana dan/atau merugikan pemegang saham publik yang telah dilakukan penghapusan dan/atau perubahan serta diberikan penjelasan atasnya dalam Perjanjian Kredit Perseroan diantaranya sebagai berikut:

Bank Mandiri

No	Klausul <i>Negative Covenant</i> / Merugikan Pemegang Saham Publik	Perubahan / Penjelasan	Dasar Perubahan / Penjelasan
1.	Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham.	Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham. Perubahan tersebut dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri apabila: 1) Perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan; 2) Perubahan pemegang saham tanpa mengubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga (Indra Muliawan dan Hardi Muliawan); 3) Terkait perubahan pengurus Perseroan. Khusus perubahan yang dituangkan dalam Akta Notaris, dengan menyampaikan Akta Notaris perubahan-perubahan tersebut berikut Surat Keputusan/Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal akta perubahan	Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT King Tire Indonesia
2.	Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.	Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi, kecuali dalam hal Perseroan telah melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada	Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 Oktober 2022

		Mandiri mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen. 2) Menyerahkan copy persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan. 3) Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4) Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang telah diatur dalam berdasarkan Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan.	
3.	Melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham.	Melakukan merger dan akuisisi. Untuk emisi saham termasuk dalam rangka proses yang berkaitan dengan <i>initial public offering</i> (IPO) Perseroan, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak emisi saham dilakukan.	Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Atas Nama PT King Tire Indonesia
4.	Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh Mandiri sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KMK Bank Mandiri-Perseroan, maka apabila dipandang perlu oleh Bank Mandiri disebabkan oleh sesuatu peningkatan risiko yang dipikul oleh Bank Mandiri dan tanpa mengindahkan penyebab dari peningkatan risiko tersebut serta dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri dapat: 1) turut serta dalam kepengurusan Perseroan dengan cara apapun juga yang dianggap layak oleh Bank Mandiri; 2) menciptakan alat pengawasan apapun juga atas Perseroan yang dianggap perlu	Ketentuan tersebut antara lain berlaku apabila Perseroan melakukan perbuatan wanprestasi dan akan dilakukan dengan tetap mematuhi Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Surat Bank Mandiri No. CM2.JKO/1518/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Penjelasan Negative Covenant.

	oleh Bank Mandiri; 3) mengadakan perubahan dalam kepengurusan Perseroan termasuk perubahan-perubahan dalam staff pimpinan atau staff lainnya; 4) turut serta dalam kepemilikan Perseroan, melaksanakan hak-hak kepemilikan atas Perseroan untuk jangka waktu yang selama itu hak-hak kepemilikan yang asli dianggap telah ditanggihkan atau mengambil alih kepemilikan sepenuhnya atas Perseroan sebagaimana dianggap perlu oleh Bank Mandiri.		

Citibank

No	Klausul Negative Covenant / Merugikan Pemegang Saham Publik	Perubahan / Penjelasan	Dasar Perubahan / Penjelasan
1.	Perseroan akan segera memberitahu Citibank secara tertulis mengenai setiap perubahan pemegang saham selain dari perubahan pada pemegang saham pengendalinya.	Sehubungan dengan rencana Perseroan menjadi perusahaan publik, dimana 20,13% saham akan dimiliki oleh masyarakat, maka perubahan kepemilikan saham masyarakat tersebut tidak perlu diberitahukan kepada Citibank. Akan tetapi jika perubahan kepemilikan yang terjadi di luar saham publik, maka harus mendapat persetujuan tertulis Citibank.	Surat Citibank No. CCBSME/JKT/20221130/KTI/0000550913/0001 tanggal 30 November 2022.

Selanjutnya, terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum Perdana dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik di dalam perjanjian kredit UKL sebagai berikut:

W

- a) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tertanggal 28 Juli 1981, yang telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan: (i) Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri No. 12/X/88/Ekspor tanggal 27 Oktober 1988, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri No. 15/VIII/89/Ekspor tanggal 14 Agustus 1989, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri dengan No. 80 tanggal 27 Oktober 2003, dibuat dihadapan Ade Suryatini, S.H., Notaris di Jakarta; (iv) Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 14 Januari 2005, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 08 Desember 2005, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Addendum VI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 18 Oktober 2006, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Addendum VII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 23 Mei 2007, dibuat dihadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta; (viii) Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 24 Oktober 2008, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (ix) Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri dengan No. 45 tanggal 29 Mei 2009, dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; (x) Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 22 Oktober 2009, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xi) Addendum XI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 25 Oktober 2010, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xii) Addendum XII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 27 Oktober 2011, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xiii) Addendum XIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 25 Oktober 2012, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xiv) Addendum XIV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 25 Oktober 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xv) Addendum XV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 06 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xvi) Addendum XVI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 24 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xvii) Addendum XVII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri dengan No. 29 tanggal 17 Februari 2015, dibuat dihadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta; (xviii) Addendum XVIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 26 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xix) Addendum XIX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 27 November 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xx) Addendum XX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 26 Oktober 2016, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxi) Addendum XXI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 26 April 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxii) Addendum XXII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 10 November 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxiii) Addendum XXIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 25 April 2018, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxiv) Addendum XXIV Perjanjian Kredit Modal Kerja No.

10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 14 November 2018, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxv) Addendum XXV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 14 November 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxvi) Addendum XXVI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 12 November 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxvii) Addendum XXVII Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Letter Of Credit No. 10/VII/81 Produksi/Industri tanggal 05 April 2021, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxviii) Addendum XXVIII Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Letter Of Credit tertanggal 12 November 2021, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xxix) Addendum XXIX Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Letter Of Credit tertanggal 12 Oktober 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; dan (xxx) Addendum XXX Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit Letter Of Credit tertanggal 15 November 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara UKL selaku debitur dengan Bank Mandiri selaku kreditur *juncto* SUPK Bank Mandiri untuk selanjutnya disebut ("**Perjanjian KMK Bank Mandiri-UKL**");

- b) Perjanjian Jasa Pelayanan Treasury Line Nomor : CRO.JKO/0281/TL/2014 dengan No. 2 tanggal 06 Oktober 2014, dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, melalui : (i) Addendum I Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (ii) Addendum II Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 26 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (iii) Addendum III Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 27 November 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (iv) Addendum IV Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 26 Oktober 2016, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (v) Addendum V Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 26 April 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (vi) Addendum VI Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 10 November 2017, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (vii) Addendum VII Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 25 April 2018, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (viii) Addendum VIII Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 14 November 2018, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (ix) Addendum IX Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 14 November 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (x) Addendum X Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 12 November 2020, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xi) Addendum XI Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 12 November 2021, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xii) Addendum XII Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 12 Oktober 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; (xiii)

W

Addendum XIII Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL PT Bank Mandiri, Tbk Nomor CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 15 November 2022, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara UKL selaku Debitur dengan Bank Mandiri selaku Kreditur *juncto* SPUK Bank Mandiri ("**Perjanjian Treasury Line Bank Mandiri-UKL**"); dan

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kredit UKL**")

Adapun pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian Kredit UKL tersebut adalah kewajiban permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri untuk dapat melakukan pembagian bonus, deviden, atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.

UKL telah memperoleh perubahan syarat *negative covenant* dari Bank Mandiri sebagaimana berdasarkan Surat No. CM2.JKO/SPPK.399/2022 tertanggal 26 Januari 2023, sehingga perubahan syarat *negative covenant* dalam Perjanjian KMK UKL-Bank Mandiri dan Perjanjian Treasury Line UKL-Bank Mandiri menjadi sebagai berikut:

"Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, maka PT United Kingland tidak diperkenankan melakukan hal-hal sbb:

- *Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.*

Kecuali dalam hal PT King Tire Indonesia (Parent Company atau Group Usaha dari UK) telah melakukan Initial Public Offering (IPO) maka pembagian dividen PT United Kingland dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen.*
- b. Menyerahkan copy persetujuan RUPS atas pembagian dividen maksimal 1 (satu) bulan sejak RUPS dilaksanakan.*
- c. Penarikan Dividen harus memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar UK.*
- d. Memenuhi Financial Covenant yang telah diatur dalam berdasarkan perjanjian."*

Dengan telah dilakukannya perubahan dan/atau addendum terhadap Perjanjian Kredit Perseroan dan Perjanjian Kredit UKL, maka pembatasan-pembatasan yang berpotensi menghalangi Penawaran Umum dan/atau merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perjanjian Kredit Perseroan dan Perjanjian Kredit UKL telah diubah dan/atau dihapuskan.

14. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan ditandatangani:

- a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 196 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah

W

diubah berdasarkan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 80 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 56 tanggal 7 Maret 2023, ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT. Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek ("**VSI**") (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian PEE**");

- b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT King Tire Indonesia, Tbk No. 197 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 81 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 57 tanggal 7 Maret 2023, ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat dengan Wilayah Jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("**Adimitra**") ("**Perjanjian PAS**");
- c) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 198 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Atas Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 82 tanggal 18 Januari 2023, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh Perseroan selaku penerbit Waran Seri I (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta PPW**") *juncto* Lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk Syarat dan Kondisi Waran;
- d) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 199 tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Atas Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT King Tire Indonesia Tbk No. 83 tanggal 18 Januari 2023, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan Adimitra (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian PAW**"); dan
- e) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran : SP-144/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menerbitkan efek dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku Pihak yang akan menyimpan Efek bersifat ekuitas dalam penitipan kolektif (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian KSEI**").

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pencatatan efek Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat dari BEI No. S-01995/BEI.PP3/03-2023 tanggal 2 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

15. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
LOU & Mitra Law Firm



Camilla Nuridzkia, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-371/PM.223/2019
Anggota HKHPM No. 201925

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yang Terhormat PT. Bursa Efek Indonesia

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain, dan laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian oleh David Kurniawan, CPA dengan Nomor Izin Akuntan Publik : 1023 pada tanggal 28 Februari 2023. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini wajar tanpa modifikasian oleh Kantor Audit Publik Drs. Thomas Suharsono Wirawan dan Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Zainal Abidin dengan Nomor Izin Akuntan Publik: 0311 pada tanggal 14 Oktober 2022.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARY

Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements

Pada Tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /

As Of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019

Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 /

And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /

And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019

Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report

(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)



**PT KING TIRE INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARY**

Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Indonesia)	<i>Consolidated Financial Statements As Of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019 With Independent Auditor's Report (Indonesian Currency)</i>

Daftar Isi / Table of Contents

Halaman / Pages

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6 - 9	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 11	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 106	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PT. KING TIRE INDONESIA

Jl. Raya Serang Km. 68, Nambo Ilir, Kibin, Banten 42186, Indonesia
Telp. (+62254) 402675, Fax. (+62254) 400268

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
30 SEPTEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021,
2020 DAN 2019
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2022,
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2022,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Harris Muliawan	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Raya Serang Km. 68 Nambo Ilir, Kibin - Serang	:	Office address
Nomor telepon	:	0254-402675	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Daan Mogot Km. 11, No. 37, Jakarta Barat	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Habibullah	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Raya Serang Km. 68 Nambo Ilir, Kibin - Serang	:	Office address
Nomor telepon	:	0254-400268	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Jl. Cengkareng Indah IA No. 15, Jakarta Barat	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Keuangan / Finance Director	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT King Tire Indonesia Tbk dan Entitas Anak ("Grup");
1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT King Tire Indonesia Tbk and Subsidiary (the "Group");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.
4. We are responsible for the internal control system of the Group.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari 2023 / February 28, 2023

Harris Muliawan

Direktur Utama / President Director



Habibullah

Direktur Keuangan / Finance Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00039/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/II/2023

Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi

PT King Tire Indonesia Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT King Tire Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 00039/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/II/2023

To the Shareholders, Commissioner and Board of Directors

PT King Tire Indonesia Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT King Tire Indonesia Tbk (the "Company") and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of September 30, 2022 and December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the year ended December 31, 2021, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of September 30, 2022 and December 31, 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the year ended December 31, 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Dengan mengacu ke Catatan 1c (Entitas Anak yang Dikonsolidasikan) dan Catatan 2e (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 28 Juni 2022, Perusahaan telah mengakuisisi 82,69% kepentingan pada PT United Kingland dengan jumlah imbalan sebesar Rp 30.000.000.000, yang menghasilkan selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (atau selisih jumlah imbalan yang dialihkan terhadap nilai buku aset bersih yang diakuisisi) sebesar Rp 13.572.345.057. Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Grup atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, pengalihan aset atau liabilitas harus dicatat berdasarkan nilai buku seperti penggabungan usaha yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode selama entitas sepengendali. Selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali akan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor.

Akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah hal audit utama dalam audit karena dampak substansial terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Accounting for Business Combination of Entities Under Common Control

Refer to Note 1c (Consolidated Subsidiary) and Note 2e (Summary of Significant Accounting Policies - Business Combination of Entities Under Common Control) to the consolidated financial statements.

As described in Note 1c to the consolidated financial statements, on June 28, 2022, the Company acquired 82.69% interest in PT United Kingland for a total consideration of Rp 30,000,000,000, resulting to a difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control (i.e., difference between consideration transferred and book value of net assets acquired) amounted to Rp 13,572,345,057. The Group accounted for the business combination by applying PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

Under PSAK 38, transfer of assets, liabilities, shares and other instruments of ownership among entities under common control would not result in a gain or loss to the Group or to the individual entity within the same Group. Since a restructuring transaction among entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instruments of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded at book value as business combination using the pooling-of-interests method. In applying the pooling-of-interests method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring must be presented in such a manner as if the restructuring has occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control. The difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is presented in equity as additional paid-in capital.

Accounting for business combination of entities under common control is a key audit matter in the audit due to the substantial effect to the consolidated financial statements.

Hal Audit Utama (lanjutan)Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami meninjau dokumen terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali untuk (a) menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kombinasi bisnis, (b) mengidentifikasi pihak pengakuisisi, dan (c) menentukan tanggal akuisisi;
- Kami menilai kompetensi dan objektivitas manajemen dalam menentukan aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali yang diakuisisi;
- Kami memeriksa bahwa imbalan yang dialihkan diidentifikasi dan diukur dengan benar dengan membaca perjanjian penggabungan usaha dan membandingkan jumlah tersebut dengan dokumen pendukung atas imbalan aktual yang dialihkan;
- Kami memeriksa bahwa selisih jumlah imbalan yang dialihkan terhadap nilai buku aset bersih yang diakuisisi diakui dan diukur dengan benar;
- Kami mengevaluasi keselarasan kebijakan akuntansi Grup dan PT United Kingland sehubungan dengan penggabungan usaha; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Penilaian dan Keberadaan Persediaan

Lihat Catatan 2j (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Persediaan), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Penting - Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan) dan Catatan 7 (Persediaan) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian, jumlah tercatat persediaan sebesar Rp 158.609.411.474 dan Rp 103.265.183.778 pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dimana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

PSAK 14, "Persediaan", menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi bersih. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

Penilaian dan keberadaan persediaan dianggap sebagai hal audit utama karena audit kami atas persediaan difokuskan pada risiko bahwa akan ada salah saji material yang berkaitan dengan keberadaan persediaan, atau bahwa penilaian persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Key Audit Matters (continued)Accounting for Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We reviewed documents relating to business combination to (a) determine whether the transaction is a business combination, (b) identify the acquirer, and (c) determine the acquisition date;
- We assessed the competency and objectivity of the management in determining assets acquired and the liabilities assumed, and any non-controlling interest in the acquiree;
- We checked that the consideration transferred is properly identified and measured by reading the documents relating to business combination and comparing the amount to supporting documents of the actual consideration transferred;
- We checked that the difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is properly recognized and measured;
- We evaluated the alignment of the Company and PT United Kingland's accounting policies in respect to the business combination; and
- We assessed the adequacy of the related disclosures in accordance with PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

Valuation and Existence of Inventory

Refer to Note 2j (Summary of Significant Accounting Policies - Inventories), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions - Impairment of Non-Financial Assets) and Note 7 (Inventories) to the consolidated financial statements.

As described in Note 7 to the consolidated financial statements, the carrying amounts of inventories amounted to Rp 158,609,411,474 and Rp 103,265,183,778 as of September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, whereby cost is determined by weighted average method.

PSAK 14, "Inventories", provides guidance on the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realizable value. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories.

Valuation and existence of inventory is a key audit matter since our audit of inventories was focused around the risk that there would be a material misstatement relating to the existence of inventories, or that the valuation of inventories would not comply with the accounting policies applied.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman alur proses dan kontrol utama atas penilaian dan keberadaan persediaan;
- Kami melakukan penghitungan stok fisik persediaan berdasarkan sampel. Kami melakukan prosedur berikut selama penghitungan persediaan: (a) memilih sampel item persediaan dan membandingkan kuantitas yang kami hitung dengan kuantitas yang tercatat; (b) mengamati sampel prosedur penghitungan persediaan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan; dan (c) menanyakan tentang persediaan barang usang dan memeriksa kondisi barang yang dihitung;
- Kami mengevaluasi rasionalitas kebijakan persediaan seperti kebijakan penilaian persediaan dan provisi keusangan, dan memahami apakah penilaian persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan tersebut;
- Kami melakukan prosedur analitis serta pengujian terhadap rincian transaksi individual;
- Kami menganalisis laporan umur persediaan dan nilai realisasi bersih atas persediaan; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai persediaan telah dilakukan dan bahwa informasi tersebut disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan bahwa Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019 / 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, karena penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Kami telah mengaudit penyesuaian-penyusunan yang telah diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian di atas seperti dijelaskan pada Catatan 4. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut wajar dan diterapkan dengan benar. Kami tidak melakukan suatu audit, review atau prosedur lain atas laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali penyesuaian yang telah disebutkan di atas; oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian di atas secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi terkait hal tersebut di atas.

Key Audit Matters (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We obtained understanding of the process flows and key controls over inventory valuation and existence;
- We performed the inventory physical stock count on sample basis. We performed the following procedures during inventory count: (a) selected a sample of inventory items and compared the quantities we counted to the quantities recorded; (b) observed a sample of management's inventory count procedures to assess compliance with policy; and (c) made inquiries regarding obsolete inventory items and inspected the condition of items counted;
- We evaluated the rationality of the inventory policies such as the policy of inventory valuation and provision for obsolescence, and understood whether the valuation of inventory was performed in accordance with the policy;
- We performed analytical procedures as well as tests of details of individual transactions;
- We analyzed the inventory aging report and net realizable value of inventories; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the inventories have been made and that the information is properly presented and explained.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 4 to the consolidated financial statements which describes that the Group restated the consolidated financial statements as of December 31, 2020, 2019 and January 1, 2019 / December 31, 2018 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 due to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control". We have audited the adjustments that have been applied to the above consolidated financial statements as described in Note 4. In our opinion, those adjustments are fair and applied properly. We did not perform an audit, review or any other procedures on the said consolidated financial statements of the Group, except for those adjustments mentioned above; hence, we do not express an opinion or other form of assurance to the above consolidated financial statements as a whole. Our opinion is not modified in respect of the matter mentioned above.

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi pada tanggal 14 Oktober 2022.

Laporan ini disusun semata-mata untuk tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Grup, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00012/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Group for the nine-month period ended September 30, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows.

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended, prior to the restatement, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on October 14, 2022.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of the Group, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00012/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/1/2023 dated January 24, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of September 30, 2022 and December 31, 2021 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the year ended December 31, 2021 in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares. As explained in Note 41 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of September 30, 2022 and December 31, 2021 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the year ended December 31, 2021 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

28 Februari 2023 / February 28, 2023



PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, 2019
Dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020, 2019
And January 1, 2019/December 31, 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)					
		30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 / January 1, 2019/ December 31, 2018	
Catatan / Notes							
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,2i,5,33, 34	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735	11.499.285.777	Cash on hand and in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	2g,2i,33, 34	598.864.551	590.565.113	576.463.053	553.817.101	288.308.921	Restricted fund
Piutang usaha - pihak ketiga - bersih	2g,6,33,34	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117	71.904.483.976	Trade receivables - third parties - net
Piutang lain-lain	2g,33,34	-	7.000.000.000	-	-	-	Other receivables
Pihak berelasi	2f,32	300.000.000	32.500.000	35.000.000	163.897.500	551.647.500	Related party
Pihak ketiga	2j,7	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017	43.231.679.271	Third parties
Persediaan	2k,8	71.810.404	82.461.934	77.526.661	70.840.018	68.853.056	Inventories
Biaya dibayar di muka	2l,9	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311	8.080.796.954	Prepaid expense
Uang muka	17a	2.487.865.981	-	332.081.282	-	-	Advances
Pajak dibayar di muka	10	2.030.000.000	-	-	-	-	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan							Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		277.882.911.821	217.685.477.306	156.401.291.396	133.847.315.799	135.625.055.455	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2s,17d	1.320.226.510	1.358.884.770	1.979.036.565	1.752.048.407	807.576.322	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2m,11	107.652.046.940	106.793.530.396	111.241.565.790	117.761.192.491	110.490.852.403	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	2n,12	14.870.000	56.941.250	113.036.250	169.131.250	113.955.417	Intangible assets - net
Aset hak-guna - bersih	2o,13	7.418.297.598	7.760.680.563	8.217.191.184	8.673.701.805	-	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	2g,33,34	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Other asset
Jumlah Aset Tidak Lancar		116.855.441.048	116.420.036.979	122.000.829.789	128.806.073.953	111.862.384.142	Total Non- Current Assets
JUMLAH ASET		394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752	247.487.439.597	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, 2019
Dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020, 2019
And January 1, 2019/December 31, 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)					
Catatan / Notes		30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 / January 1, 2019/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS							LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS							LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES
Utang bank	2g, 14,						Short-term bank
jangka pendek	33,34	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061	54.519.215.688	loans
Utang usaha	2g,33,34						Trade payables
Pihak berelasi	2f,32	-	-	8.840.462.400	-	-	Related party
Pihak ketiga	15	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188	14.039.499.278	Third parties
Utang lain-lain -	2g,16,						Other payables -
pihak ketiga	33,34	13.085.271.114	14.024.322.368	16.549.627.460	16.367.507.968	32.886.111.308	third parties
Utang pajak	17b	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788	728.881.334	Taxes payable
Beban masih							Accrued
harus dibayar	2g,18,33,34	7.076.063.279	4.440.146.215	3.457.116.617	2.738.539.157	2.777.338.101	expenses
Uang jaminan	2g,19,33,34	38.000.000.000	-	-	-	-	Security deposits
Liabilitas jangka							
panjang yang							Current
jatuh tempo							maturities
dalam waktu							of long-term
satu tahun:							liabilities:
Liabilitas sewa	2o,20,32,33,	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474	-	Lease liabilities
Utang bank	34	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000	4.326.722.000	Bank loan
Jumlah							Total
Liabilitas							Current
Jangka							Liabilities
Pendek		196.847.770.374	144.859.943.775	101.504.492.134	89.744.399.636	109.277.767.709	
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka							
panjang,							Long-term
setelah							liabilities,
dikurangi							net of
bagian yang							current
jatuh tempo							maturities:
dalam satu							
tahun:							
Liabilitas sewa	2o,20,32,33,	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952	-	Lease liabilities
Utang bank	34	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228	9.041.213.400	Bank loan
Liabilitas pajak	2g,21,33,34						Deferred tax
tangguhan		239.983.363	100.746.351	-	-	-	liabilities
Liabilitas	2s,17d						Estimated
diestimasi atas							liabilities for
imbalan kerja							employee
karyawan	2q,22	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274	4.734.598.181	benefits
Jumlah							Total
Liabilitas							Non-Current
Jangka							Liabilities
Panjang		16.738.261.327	20.751.220.219	24.209.910.236	27.149.453.454	13.775.811.581	
JUMLAH							TOTAL
LIABILITAS		213.586.031.701	165.611.163.994	125.714.402.370	116.893.853.090	123.053.579.290	LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, 2019
Dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020, 2019
And January 1, 2019/December 31, 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)			
				31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 / January 1, 2019/ December 31, 2018	
EKUITAS							EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham							Share capital - Rp 1,000,000 par share per value
Modal dasar - 250.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018							Authorized - 250,000 shares as of September 30, 2022 and 83,901 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and 67,901 shares as of December 31, 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 138.901 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 83.901 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 67.901 saham pada tanggal 31 Desember 2018							Issued and fully paid - 138,901 shares as of September 30, 2022 and 83,901 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and 67,901 shares as of December 31, 2018
Tambahan modal disetor	23	138.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	83.901.000.000	67.901.000.000	Additional paid-in capital
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1c,2d,2e, 24	13.572.345.057	-	-	-	-	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Saldo laba	25	-	42.714.007.067	37.854.531.402	35.819.670.299	35.603.298.634	Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		10.229.716.984	-	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		14.880.839.442	39.060.445.297	29.542.749.731	24.220.932.865	16.574.920.093	Unappropriated
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		(5.660.016.273)	(6.122.567.553)	(6.534.777.559)	(5.680.317.485)	(3.098.315.601)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Jumlah		171.923.885.210	159.552.884.811	144.763.503.574	138.261.285.679	116.980.903.126	Total
Kepentingan non-pengendali	2d	9.228.435.958	8.941.465.480	7.924.215.241	7.498.250.983	7.452.957.181	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		181.152.321.168	168.494.350.291	152.687.718.815	145.759.536.662	124.433.860.307	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		394.738.352.869	334.105.514.285	278.402.121.185	262.653.389.752	247.487.439.597	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

					Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)		
	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PENJUALAN BERSIH	2r,26	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2r,27	(305.714.401.908)	(229.176.280.073)	(326.779.551.997)	(249.419.704.415)	(234.358.529.800)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		54.952.537.571	41.414.786.360	57.559.944.490	46.813.893.182	38.985.779.754	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2r,28	(17.530.816.355)	(13.335.282.640)	(19.694.362.612)	(16.962.459.063)	(9.265.368.370)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2r,29	(13.649.469.165)	(10.244.162.100)	(14.989.755.689)	(13.991.965.630)	(11.472.960.102)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2r,30	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	(841.135.728)	236.515.663	Other income (expenses) - net
LABA USAHA		20.277.843.025	19.670.071.053	24.165.811.221	15.018.332.761	18.483.966.945	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2r	52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057	Finance income
Beban keuangan	2r	(3.346.695.668)	(3.647.272.021)	(4.427.224.355)	(4.826.904.909)	(7.194.418.266)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2s,17c	(4.797.086.360)	(3.424.707.660)	(3.967.495.180)	(2.436.342.259)	(3.002.811.500)	Current
Tangguhan	2s,17d	(34.970.486)	(569.848.055)	(571.280.933)	(29.379.446)	71.858.152	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(4.832.056.846)	(3.994.555.715)	(4.538.776.113)	(2.465.721.705)	(2.930.953.348)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		12.151.237.545	12.090.050.247	15.276.170.448	7.837.121.842	8.419.489.388	NET INCOME AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FOR THE PERIOD/YEAR
Efek Penyesuaian Proforma		858.337.990	2.644.074.002	4.859.475.665	2.034.861.103	216.371.665	Effect of Proforma Adjustment
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723	NET INCOME BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)					
	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PENGHASILAN							OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN							INCOME
Pos yang tidak akan							Item that will not be
direklasifikasi ke laba rugi							reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas							Remeasurement of
destimasi atas imbalan							estimated liabilities
kerja karyawan	2q,22	649.658.118	1.071.050.426	680.078.241	(1.165.307.293)	(3.966.426.966)	for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2s,17d	(142.924.786)	(235.631.094)	(149.617.213)	256.367.604	872.613.933	Related income tax
JUMLAH LABA							TOTAL
KOMPREHENSIF							COMPREHENSIVE
PERIODE/TAHUN							INCOME FOR
BERJALAN		11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690	THE PERIOD/YEAR
LABA BERSIH SEBELUM							NET INCOME
EFEK PENYESUAIAN							BEFORE EFFECT OF
PROFORMA PERIODE/							PROFORMA ADJUSTMENT
TAHUN BERJALAN							FOR THE PERIOD/ YEAR
YANG DAPAT							ATTRIBUTABLE TO:
DIATRIBUSIKAN							Owners of the parent entity
KEPADA:							Non-controlling
Pemilik entitas induk		11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	5.321.816.866	7.646.012.772	interests
Kepentingan non-							TOTAL
pengendali	2d	242.788.426	409.898.193	898.999.217	480.443.873	557.104.951	
JUMLAH		11.292.899.555	9.445.976.245	10.416.694.783	5.802.260.739	8.203.117.723	
JUMLAH LABA							TOTAL COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF							INCOME FOR
PERIODE/TAHUN							THE PERIOD/YEAR
BERJALAN YANG							ATTRIBUTABLE
DAPAT DIATRIBUSIKAN							TO:
KEPADA:							Owners of the parent entity
Pemilik entitas induk		11.755.450.835	10.137.800.945	10.828.904.789	4.947.800.665	5.621.115.839	Non-controlling
Kepentingan non-							interests
pengendali	2d	44.182.052	143.594.632	118.251.022	(54.479.615)	(511.811.149)	TOTAL
JUMLAH		11.799.632.887	10.281.395.577	10.947.155.811	4.893.321.050	5.109.304.690	
LABA BERSIH PER							BASIC EARNINGS
SAHAM DASAR	2u,31	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56	PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity											
				Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Saldo Laba / Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits		Kepentingan Non- Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid- in Capital		Telah Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated		Jumlah / Total			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019 (Disajikan Kembali)		67.901.000.000	-	35.603.298.634	-	16.574.920.093	(3.098.315.601)	116.980.903.126	7.452.957.181	124.433.860.307	Balance as of January 1, 2019 (As Restated)
Kenaikan modal saham	23	16.000.000.000	-	-	-	-	-	16.000.000.000	-	16.000.000.000	Increase in share capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	7.646.012.772	-	7.646.012.772	557.104.951	8.203.117.723	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	(2.582.001.884)	(2.582.001.884)	(511.811.149)	(3.093.813.033)	Other comprehensive income
Efek penyesuaian proforma		-	-	216.371.665	-	-	-	216.371.665	-	216.371.665	Effect of proforma adjustment
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan Kembali)		83.901.000.000	-	35.819.670.299	-	24.220.932.865	(5.680.317.485)	138.261.285.679	7.498.250.983	145.759.536.662	Balance as of December 31, 2019 (As Restated)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	5.321.816.866	-	5.321.816.866	480.443.873	5.802.260.739	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	(854.460.074)	(854.460.074)	(54.479.615)	(908.939.689)	Other comprehensive income
Efek penyesuaian proforma		-	-	2.034.861.103	-	-	-	2.034.861.103	-	2.034.861.103	Effect of proforma adjustment
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan Kembali)		83.901.000.000	-	37.854.531.402	-	29.542.749.731	(6.534.777.559)	144.763.503.574	7.924.215.241	152.687.718.815	Balance as of December 31, 2020 (As Restated)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahkan Modal Disetor / Additional Paid- in Capital	Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Saldo Laba / Retained Earnings		Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non- Pengendali / Non- Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
					Telah Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated					
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan Kembali)		83.901.000.000	-	37.854.531.402	-	29.542.749.731	(6.534.777.559)	144.763.503.574	7.924.215.241	152.687.718.815	Balance as of December 31, 2020 (As Restated)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	9.517.695.566	-	9.517.695.566	898.999.217	10.416.694.783	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	412.210.006	412.210.006	118.251.022	530.461.028	Other comprehensive income
Efek penyesuaian proforma		-	-	4.859.475.665	-	-	-	4.859.475.665	-	4.859.475.665	Effect of proforma adjustment
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		83.901.000.000	-	42.714.007.067	-	39.060.445.297	(6.122.567.553)	159.552.884.811	8.941.465.480	168.494.350.291	Balance as of December 31, 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity											
Saldo Laba / Retained Earnings											
	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Telah Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)		83.901.000.000	-	42.714.007.067	-	39.060.445.297	(6.122.567.553)	159.552.884.811	8.941.465.480	168.494.350.291	Balance as of December 31, 2021 (As Restated)
Kenaikan modal saham	23	55.000.000.000	-	-	-	-	-	55.000.000.000	-	55.000.000.000	Increase in share capital
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	11.050.111.129	-	11.050.111.129	242.788.426	11.292.899.555	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	462.551.280	462.551.280	44.182.052	506.733.332	Other comprehensive income
Dividen		-	-	-	-	(25.000.000.000)	-	(25.000.000.000)	-	(25.000.000.000)	Dividends
Pencadangan saldo laba	25	-	-	-	10.229.716.984	(10.229.716.984)	-	-	-	-	Capital reserve
Efek penyesuaian proforma		-	-	858.337.990	-	-	-	858.337.990	-	858.337.990	Effect of proforma adjustment
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1c	-	13.572.345.057	(43.572.345.057)	-	-	-	(30.000.000.000)	-	(30.000.000.000)	Difference in value of restructuring transaction of entities under common control
Proforma kepentingan non-pengendali yang timbul dari pembagian dividen entitas anak		-	-	(24.807.056.229)	-	-	-	(24.807.056.229)	(5.192.943.771)	(30.000.000.000)	Proforma non- controlling interest arising from dividend distribution of subsidiary
Proforma kepentingan non-pengendali yang timbul dari perubahan modal saham entitas anak		-	-	24.807.056.229	-	-	-	24.807.056.229	5.192.943.771	30.000.000.000	Proforma non- controlling interests arising from changes in the share capital of subsidiary
Saldo pada tanggal 30 September 2022		138.901.000.000	13.572.345.057	-	10.229.716.984	14.880.839.442	(5.660.016.273)	171.923.885.210	9.228.435.958	181.152.321.168	Balance as of September 30, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity										
Saldo Laba / Retained Earnings										
Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisa si Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Telah Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	83.901.000.000	-	37.854.531.402	-	29.542.749.731	(6.534.777.559)	144.763.503.574	7.924.215.241	152.687.718.815	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	9.036.078.052	-	9.036.078.052	409.898.193	9.445.976.245	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	691.824.700	691.824.700	143.594.632	835.419.332	Other comprehensive income
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisas entitas sepengendali	-	-	2.644.074.002	-	-	-	2.644.074.002	-	2.644.074.002	Effect of proforma adjustment
Saldo pada tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)	83.901.000.000	-	40.498.605.404	-	38.578.827.783	(5.842.952.859)	157.135.480.328	8.477.708.066	165.613.188.394	Balance as of September 30, 2021 (Unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)					
		2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Catatan / Notes							
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		386.306.865.412	304.318.313.673	381.146.854.712	294.745.657.364	272.901.901.415	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(298.607.234.252)	(241.855.858.960)	(340.845.687.012)	(199.091.411.076)	(193.517.913.464)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(45.351.490.107)	(48.550.738.596)	(47.889.306.620)	(42.577.945.434)	(40.705.706.312)	Cash paid to employees
Pembayaran kas untuk beban operasional		(23.282.692.191)	(19.036.050.105)	(29.714.496.385)	(22.661.036.693)	(12.220.231.602)	Cash paid for operating expenses
Penerimaan lain-lain		264.003.235	2.136.117.782	3.861.828.463	450.207.088	1.241.123.383	Other receipts
Pembayaran lain-lain		(5.881.510.465)	(3.942.989.632)	(2.544.342.428)	(2.306.356.232)	(16.786.098.570)	Other payments
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi		13.447.941.632	(6.931.205.838)	(35.985.149.270)	28.559.115.017	10.913.074.850	Cash generated from (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan		(4.807.363.465)	(3.858.817.077)	(4.963.871.659)	(1.638.512.905)	(2.961.663.069)	Income tax paid
Penerimaan bunga		52.147.034	61.806.930	76.359.695	111.415.695	60.894.057	Interest received
Pembayaran bunga		(3.152.327.180)	(3.404.569.424)	(4.161.099.430)	(4.558.817.314)	(7.041.099.160)	Interest paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		5.540.398.021	(14.132.785.409)	(45.033.760.664)	22.473.200.493	971.206.678	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan aset tetap	11	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	11	(10.634.302.549)	(7.622.037.396)	(7.734.676.374)	(5.121.420.860)	(18.195.646.921)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset takberwujud		-	-	-	-	(108.000.000)	Acquisition of intangible assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(10.209.302.549)	(7.562.946.486)	(7.605.585.464)	(4.941.420.860)	(18.303.646.921)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan modal saham	23	55.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000	Increase in share capital
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk	23	(25.000.000.000)	-	-	-	-	Cash dividends paid to owners of the parent entity
Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemilik entitas anak		(30.000.000.000)	-	-	-	-	Cash dividends paid to owners of the subsidiary
Utang bank jangka panjang							Long-term bank loans
Pembayaran		(3.307.329.000)	(3.307.329.000)	(4.409.772.000)	(4.409.372.000)	(4.326.722.000)	Repayments
Penerimaan		-	-	-	-	3.819.290.828	Proceeds
Kenaikan (penurunan) utang bank jangka pendek	14	(1.631.534.168)	40.646.095.450	62.402.689.889	(6.927.109.707)	(2.684.129.627)	Increase (decrease) in short-term bank loans
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(4.938.863.168)	37.338.766.450	57.992.917.889	(11.336.481.707)	12.808.439.201	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT KING TIRE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KING TIRE INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)					
		2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(9.607.767.696)	15.643.034.555	5.353.571.761	6.195.297.926	(4.524.001.042)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN BERJALAN	5	18.524.154.422	13.170.582.661	13.170.582.661	6.975.284.735	11.499.285.777	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	5	8.916.386.726	28.813.617.216	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT King Tire Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 2 Agustus 2010 berdasarkan Akta Notaris No. 01 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dengan daftar perusahaan No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 75 tanggal 28 Juni 2022 oleh Dewi Octaria, S.H., M.Kn., tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan susunan pemegang saham. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0045063.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang manufaktur produk ban dalam dan ban luar.

Perusahaan terletak di Jl. Raya Serang Km. 68 Nambo Ilir, Kibin - Serang.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2011.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Kingland Investindo Nusantara. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Harris Muliawan.

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Indra Muliawan	:
<u>Dewan Direksi</u>			
Direktur Utama	:	Harris Muliawan	:
Direktur	:	Hardi Muliawan	:

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT King Tire Indonesia Tbk (the "Company") was established on August 2, 2010 based on Notarial Deed No. 01 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-42191.AH.01.01.Tahun 2010 dated August 26, 2010 with company registration No. AHU-0064343.AH.01.09.Tahun 2010 dated August 26, 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 75 dated June 28, 2022 of Dewi Octaria, S.H., M.Kn., concerning the increase in issued and paid-up capital and changes in the composition of shareholders. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0045063.01.02.Tahun 2022 dated June 30, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the field of development, trade, industry, land transportation, agriculture, printing and services, except for services in the field of law and tax.

Currently, the Company is engaged in manufacturing of tube and tire.

The Company is located at Jl. Raya Serang Km. 68 Nambo Ilir, Kibin - Serang.

The Company started its commercial operations in 2011.

The Company's immediate parent entity is PT Kingland Investindo Nusantara. The controlling interest of the Company is owned by an individual namely Harris Muliawan.

b. Commissioner, Board of Directors and Employees

The Company's Commissioner and Board of Directors as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	:	Commissioner	:
<u>Board of Directors</u>			
President Director	:	Harris Muliawan	:
Director	:	Hardi Muliawan	:

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 165, 174, 189 dan 194 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji dan tunjangan	520.000.000	520.000.000	676.000.000	416.000.000	416.000.000	Salaries and allowances

Personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan dan entitas anaknya. Seluruh anggota Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, entitas anak yang dikonsolidasikan dan masing-masing persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiary	Bidang Usaha / Business Activity	Tempat Kedudukan / Domicile	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)			
				30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
<u>Kepemilikan Langsung / Direct Ownership</u>											
PT United Kingland	Industri Ban Dalam / Tube Industry	Cikande, Banten / Cikande, Banten	1972	82,69%	-	-	-	148.983.875	-	-	-

PT United Kingland (UK)

Sesuai dengan Akta Notaris No. 77 oleh Dewi Octaria, S.H., M.Kn., tanggal 28 Juni 2022, perubahan Anggaran Dasar UK meliputi (a) Peningkatan modal dasar dari Rp 6.280.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000, (b) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 6.280.000.000 menjadi Rp 36.280.000.000.

Berdasarkan akta tersebut, Perusahaan membeli 30.000 saham baru sebesar Rp 30.000.000.000 atau setara dengan 82,69% kepentingan pada UK.

1. GENERAL (continued)

b. Commissioner, Board of Directors and Employees (continued)

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary had 165, 174, 189 and 194 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Board of Directors by the Company and its subsidiary for the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Key management personnel of the Company and its subsidiary are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company and its subsidiary. All members of the Commissioner and Board of Directors are considered as key management personnel of the Company and its subsidiary.

c. Consolidated Subsidiary

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the consolidated subsidiary and the respective percentage of ownership owned by the Company are as follows:

PT United Kingland (UK)

In accordance with the Notarial Deed No. 77 of Dewi Octaria, S.H., M.Kn., dated June 28, 2022, amendments to UK's Articles of Association relate to (a) Increase in authorized capital from Rp 6,280,000,000 to Rp 100,000,000,000, (b) Increase in issued and paid-up capital from Rp 6,280,000,000 to Rp 36,280,000,000.

Based on the Deed, the Company purchased 30,000 new shares amounted to Rp 30,000,000,000 or equivalent to 82.69% interest in UK.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT United Kingland (UK) (lanjutan)

Perubahan Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0045079.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022.

Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

Nilai buku aset bersih yang diakuisisi	43.572.345.057
Persentase kepemilikan	82.69%
Imbalan yang dialihkan	30.000.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	13.572.345.057

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ini disajikan sebagai tambahan modal disetor pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 28 Februari 2023.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiary (continued)

PT United Kingland (UK) (continued)

The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0045079.AH.01.02. TAHUN 2022 dated June 30, 2022.

The calculation of the difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is as follows:

Book value of net assets acquired
Percentage of ownership
Consideration transferred
Difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control

The difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is presented as additional paid-in capital in the consolidated statement of financial position.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on February 28, 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) of IAI and applicable Capital Market regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK

Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK effective January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the entities in the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of Amendments and Improvements to PSAK

The Group applied amendments and improvements to PSAK that are mandatory for application from January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021. The application of these amendments and improvements to PSAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK (lanjutan)

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-panjang dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Grup diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of Amendments and Improvements to PSAK (continued)

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination on Reference to the Conceptual Framework of Financial Reporting";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Leases".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Leases on Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Leases (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

PSAK 73, "Leases"

PSAK 73 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognizes right-of-use (ROU) asset representing its right to use the underlying asset and lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items. Lessor accounting remains similar to current practice, i.e. lessors continue to classify leases as finance or operating leases.

The Group is required to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is of low-value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Penyesuaian diakui atas penerapan PSAK 73

Grup melakukan penerapan dini atas PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif sejak awal perjanjian ditandatangani yaitu sejak tahun 2019. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental.

Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of Amendments and Improvements to PSAK (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

The nature of expenses related to those leases will now change as PSAK 73 replaces the previous straight-line operating lease expense, with a depreciation expense for ROU assets and interest expense on lease liabilities.

Adjustments recognized on adoption of PSAK 73

The Group has early adopted PSAK 73 using the retrospective approach from the inception of the agreement which is since 2019. Right-of-use assets were measured at the carrying amount since the commencement date and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate.

The Group used the following practical expedients for leases previously classified as operating leases under PSAK 73:

- Applied the exemption not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases with lease term that ends within 12 months at the date of initial application;
- Excluded initial direct costs from measuring the right-of-use assets at the date of initial application; and
- Used hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.

ROU assets and lease liabilities are presented as separate line items in the consolidated statements of financial position.

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiary is entity over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, the Company on the date of loss of control:

- Derecognizes the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;
- Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- Recognizes the fair value of the consideration received (if any);
- Recognizes the fair value of any investment retained;
- Reclassifies the Group's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and
- Recognizes any resulting difference as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", hanya transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali akan diperhitungkan oleh PSAK 38. Pelaporan harus menentukan apakah substansi transaksi benar-benar kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Aset dan liabilitas dari Perusahaan yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Sesuai PSAK 38, metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan dimulai dari awal jika dalam periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Selisih antara harga pengalihan yang dibayar adalah jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

Saldo "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" akan diakui dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor pada awal penerapan standar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Business Combination of Entities Under Common Control

In accordance with PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control", only business combination transaction of entities under common control would be accounted for PSAK 38. The reporting entity should determine whether the transaction's substance is really the business combination entities under common control.

Assets and liabilities of the acquiree are not restated to fair value instead the acquirer continues to assume the acquiree's carrying amount of those assets and liabilities using pooling-of-interest method. Under the PSAK 38, the pooling-of-interest method should be applied starting from the beginning of the period in the year the two entities (acquirer and acquiree) first came under common control.

The difference between the transfer price paid and carrying amount of net assets acquired will be presented as part of the acquirer's Additional Paid-in Capital account in equity.

The balance of the "Difference Arising From Restructuring Transaction of Entities Under Common Control" will be recognized and presented in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. Aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of interest*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara jumlah tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

Since the restructuring transaction of entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instrument of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interest method.

In applying the pooling-of-interest method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring occurred and for other periods presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the earlier period presented. The difference between the carrying amount of the investment at the effective date and the transfer price is recognized under the account "Difference in Value Arising from Restructuring Transaction of Entities under Common Control" as part of equity.

f. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transaction with Related Parties (continued)

- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - viii. The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties were disclosed in Note 32 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

The Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, restricted fund, trade receivables, other receivables and other asset.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, uang jaminan, utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, security deposits, short-term bank loans and long-term bank loan. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position, if and only if, 1) the Group currently have rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Estimation of Fair Value (continued)

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

h. Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kas dan Bank dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dijadikan jaminan atas Pembelian Komoditi berupa Karet disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir tahun.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

m. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Cash on Hand and in Banks and Restricted Fund

Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

Restricted Fund

Funds used as collateral for the purchase of commodities in the form of rubber are presented as restricted fund and stated at nominal value.

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by weighted average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

k. Prepaid Expense

Prepaid expense is amortized over its beneficial periods using the straight-line method.

l. Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

m. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun / Years
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	16
Kendaraan	8
Perabotan kantor	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari perangkat lunak. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed Assets (continued)

If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

Tarif / Rate	
5%	Buildings
6,25%	Machinery and equipment
12,5%	Vehicles
25%	Office furniture and fixtures

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

n. Intangible Assets

Intangible assets consist of software. Intangible assets are recognized when the Group is most likely to have economic benefit in the future from these intangible assets and the cost incurred can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud 4 tahun. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan.

Jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset takberwujud yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset takberwujud tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset takberwujud tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

o. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Grup sebagai penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Intangible Assets (continued)

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over its estimated useful life. The Group must estimate recoverable amount of intangible assets. If the carrying amount of intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount.

Intangible assets are amortized using straight-line method based on estimated useful life of 4 years. The period and method of amortization are reviewed at the end of each reporting period. If the estimated useful life is significantly different from the prior estimates, the period of amortization will be adjusted.

An item of intangible assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated amortization and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of intangible assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

o. Leases

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-use Assets

The Group as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liability. The cost of ROU assets includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Aset Hak-Guna (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak guna – Bangunan

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

Right-of-use Assets (continued)

The Group as Lessee (continued)

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Tahun / Years

20

ROU assets – Buildings

ROU assets are subject to impairment.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liability measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

q. Imbalan Kerja

Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

Short-term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

p. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

q. Employee Benefits

The Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefit is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada inisiasi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Employee Benefits (continued)

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

r. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;
- The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskon tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

The Group determines whether the Group is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Group has generally concluded that the Group is the principal in its revenue contracts.

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized.

Contract Balance

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e. only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

s. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

u. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

v. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs yang digunakan terhadap Rupiah adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
1 Dolar Amerika Serikat	15.247	14.269
1 Yuan Cina	2.216	2.238

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

v. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currency are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the exchange rates used to Rupiah are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	14.105	13.901	United States Dollar 1
	2.161	1.991	Chinese Yuan 1

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas estimasi dan asumsi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup yang diungkapkan dalam Catatan 2g.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclose in Note 2g.

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Grup menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Grup melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun dan aset takberwujud 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Group maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Group uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Group performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 6 to the consolidated financial statements.

Depreciation of Fixed Assets and Intangible Assets

The acquisition costs of fixed assets and intangible assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets to be within 4 until 20 years and intangible assets to be 4 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 11 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa. Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2q atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of Group's operations.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liabilities. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use assets in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Employee Benefits

The determination of the Group's pension fund and post-employment benefit liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2q to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian terutama terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah disajikan kembali guna mencerminkan dampak penerapan retrospektif atas penerapan PSAK 38, dimana seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode dimana entitas menjadi sepengendali.

"Efek Penyesuaian Proforma" yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian digunakan untuk menyajikan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan.

Harris Muliawan merupakan pengendali individu Perusahaan, sedangkan PT Kingland Investindo Nusantara merupakan entitas induk langsung Perusahaan sebelum maupun setelah terjadi transaksi yang dimaksud oleh PSAK 38.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits (continued)

Further details are disclosed in Note 22 to the consolidated financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The restatement of the consolidated financial statements is mainly related to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, 2019 and January 1, 2019/ December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2020 and 2019 have been restated to reflect the impact of the retrospective application of PSAK 38, where as if the business combination has occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control.

The "Effect of Proforma Adjustment" which was recorded in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is used to present the adjustment as a result of the adoption of PSAK 38 in the current period.

Harris Muliawan is the controlling interest of the Company, while PT Kingland Investindo Nusantara is the immediate parent entity of the Company before and after the transaction under PSAK 38.

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut:

4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The adjustments that resulted from the application of PSAK 38 in the consolidated financial statements are summarized in the following tables:

	2020 (Disajikan sebelumnya / As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan posisi keuangan Konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	9.865.555.497	3.305.027.164	13.170.582.661	Cash on hand and in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	576.463.053	576.463.053	Restricted fund
Piutang usaha - pihak ketiga	44.424.599.222	29.410.233.129	73.834.832.351	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	35.000.000	35.000.000	Other receivables - third parties
Persediaan	20.634.115.956	29.840.724.251	50.474.840.207	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	14.163.961.811	3.813.530.031	17.977.491.842	Advance and prepaid expense
Aset lainnya	260.432.881	(260.432.881)	-	Other assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	176.382.633	1.802.653.932	1.979.036.565	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	93.779.130.864	17.462.434.926	111.241.565.790	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	80.135.417	32.900.833	113.036.250	Intangible assets - net
Aset hak-guna - bersih	4.547.726.961	3.669.464.222	8.217.191.184	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	-	450.000.000	450.000.000	Other asset
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang bank jangka pendek	29.743.901.880	14.713.591.740	44.457.493.620	Short-term bank loans
Utang usaha	15.325.537.864			Trade payables
Pihak berelasi	6.104.498.400	2.735.964.000	8.840.462.400	Related party
Pihak ketiga	9.221.039.380	11.890.252.524	21.111.291.904	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	16.512.228.957	37.398.503	16.549.627.460	Other payables - third parties
Utang pajak	1.323.152.064	988.969.520	2.312.121.584	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	1.389.525.832	2.067.590.785	3.457.116.617	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	197.523.732	169.082.727	366.606.549	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities, net of current maturities:
Liabilitas sewa	4.855.506.224	3.908.099.653	8.763.605.877	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	3.556.641.571	7.848.302.560	11.404.944.131	Estimated liabilities for employee benefits
Ekuitas				Equity
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	37.854.531.402	37.854.531.402	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Saldo laba	25.181.619.980	4.361.129.751	29.542.749.731	Retained earnings
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(2.173.647.726)	(4.361.129.833)	(6.534.777.559)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Kepentingan non-pengendali	-	7.924.215.241	7.924.215.241	Non-controlling interests

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2020 (Disajikan sebelumnya / As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Penjualan bersih	165.260.801.916	130.972.795.681	296.233.597.597	Net sales
Beban pokok penjualan	(136.713.548.640)	(112.706.155.775)	(249.419.704.415)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(12.837.449.905)	(4.125.009.158)	(16.962.459.063)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(5.254.410.237)	(8.737.555.393)	(13.991.965.630)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	(793.282.578)	(47.853.150)	(841.135.728)	Other expenses - net
Pendapatan keuangan	67.886.706	43.528.989	111.415.695	Finance income
Beban keuangan	(3.046.141.297)	(1.780.763.612)	(4.826.904.909)	Finance costs
Manfaat (beban) pajak penghasilan:				Income tax benefit (expense):
Kini	(1.481.278.920)	(955.063.339)	(2.436.342.259)	Current
Tangguhan	(141.013.117)	111.633.671	(29.379.446)	Deferred
Efek penyesuaian proforma	-	2.034.861.103	2.034.861.103	Effect of proforma adjustment
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, setelah dikurangi pajak	(594.207.136)	(314.732.553)	(908.939.689)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits, net of tax
Laporan arus kas konsolidasian				Consolidated statement of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi	8.106.935.420	14.366.265.073	22.473.200.493	Cash flow from operating activities
Arus kas untuk aktivitas investasi	(4.500.659.103)	(440.761.757)	(4.941.420.860)	Cash flow for investing activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	2.454.129.880	(13.790.611.587)	(11.336.481.707)	Cash flow from (for) financing activities
	2019 (Disajikan sebelumnya / As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2019 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	3.805.149.217	3.170.135.518	6.975.284.735	Cash on hand and in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	553.817.101	553.817.101	Restricted fund
Piutang usaha - pihak ketiga	40.918.317.578	31.428.574.539	72.346.892.117	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	163.897.500	-	163.897.500	Other receivables - third parties
Persediaan	19.323.871.049	28.431.507.968	47.755.379.017	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.572.394.153	4.479.651.176	6.052.045.329	Advance and prepaid expense
Aset lainnya	250.000.000	(250.000.000)	-	
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	149.798.865	1.602.249.542	1.752.048.407	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	97.060.542.368	20.700.650.123	117.761.192.491	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	119.385.417	49.745.833	169.131.250	Intangible assets - net
Aset hak-guna - bersih	4.800.378.459	3.873.323.346	8.673.701.805	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	-	450.000.000	450.000.000	Other asset
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang bank jangka pendek	22.880.400.000	28.954.686.061	51.835.086.061	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	3.980.553.009	8.627.213.179	12.607.766.188	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	16.309.469.699	58.038.269	16.367.507.968	Other payables - third parties
Utang pajak	1.041.690.789	613.082.999	1.654.773.788	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	1.006.726.573	1.731.812.584	2.738.539.157	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	68.815.176	62.139.298	130.954.474	Lease liabilities

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	2019 (Disajikan sebelumnya / As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2019 (Disajikan Kembali / As restated)	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)</u>				<u>Consolidated statement of financial position (continued)</u>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities, net of current maturities:
Liabilitas sewa	4.984.214.781	4.015.043.171	8.999.257.952	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2.589.744.971	7.109.718.303	9.699.463.274	Estimated liabilities for employee benefits
Ekuitas				Equity
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	35.819.670.299	35.819.670.299	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Saldo laba	20.120.055.969	4.100.876.896	24.220.932.865	Retained earnings
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.579.440.590)	(4.100.876.895)	(5.680.317.485)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Kepentingan non-pengendali	-	7.498.250.983	7.498.250.983	Non-controlling interests
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Penjualan bersih	138.109.472.601	135.234.836.953	273.344.309.554	Net sales
Beban pokok penjualan	(118.541.025.888)	(115.817.503.912)	(234.358.529.800)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(4.967.408.352)	(4.297.960.018)	(9.265.368.370)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(3.667.774.490)	(7.805.185.612)	(11.472.960.102)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain - bersih	156.970.634	79.545.029	236.515.663	Other income - net
Pendapatan keuangan	19.277.619	41.616.438	60.894.057	Finance income
Beban keuangan	(4.162.432.213)	(3.031.986.053)	(7.194.418.266)	Finance costs
Manfaat (beban) pajak penghasilan:				Income tax benefit (expense):
Kini	(1.650.792.000)	(1.352.019.500)	(3.002.811.500)	Current
Tangguhan	(95.232.857)	167.091.009	71.858.152	Deferred
Efek penyesuaian proforma	-	216.371.665	216.371.665	Effect of proforma adjustment
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, setelah dikurangi pajak	(137.044.166)	(2.956.768.867)	(3.093.813.033)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits, net of tax
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of cash flows</u>
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi	(1.193.627.020)	2.164.833.698	971.206.678	Cash flow from (for) operating activities
Arus kas untuk aktivitas investasi	(12.538.529.003)	(5.765.117.918)	(18.303.646.921)	Cash flow for investing activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	13.492.968.826	(684.529.625)	12.808.439.201	Cash flow from (for) financing activities

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 / January 1, 2019/ December 31, 2018 (Disajikan sebelumnya / As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 / January 1, 2019/ December 31, 2018 (Disajikan kembali / As restated)	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	4.044.336.414	7.454.949.363	11.499.285.777	Cash on hand and in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	288.308.921	288.308.921	Restricted fund
Piutang usaha - pihak ketiga	33.297.544.148	38.606.939.828	71.904.483.976	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	229.897.500	321.750.000	551.647.500	Other receivables
Persediaan	22.205.371.424	21.026.307.847	43.231.679.271	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	6.479.106.849	1.670.543.161	8.149.650.010	Advance and prepaid expense
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	206.378.239	601.198.083	807.576.322	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	92.153.013.962	18.337.838.441	110.490.852.403	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	76.864.583	37.090.834	113.955.417	Intangible assets - net
Aset lain-lain	-	450.000.000	450.000.000	Other asset
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang bank jangka pendek	24.880.000.002	29.639.215.686	54.519.215.688	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	3.635.890.248	10.403.609.030	14.039.499.278	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	32.048.712.635	837.398.673	32.886.111.308	Other payables - third parties
Utang pajak	425.278.157	303.603.177	728.881.334	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	955.212.562	1.822.125.539	2.777.338.101	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2.001.879.623	2.732.718.558	4.734.598.181	Estimated liabilities for employee benefits
Ekuitas				Equity
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	35.603.298.634	35.603.298.634	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Saldo laba	20.120.055.969	(3.545.135.876)	16.574.920.093	Retained earnings
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, setelah dikurangi pajak	(1.579.440.590)	(1.518.875.011)	(3.098.315.601)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits, net of tax
Kepentingan non-pengendali	-	7.452.957.181	7.452.957.181	Non-controlling interests

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kas	3.406.565.028	573.978.360	2.289.378.193	1.609.875.255	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.123.046.825	11.441.653.941	1.403.541.046	3.045.581.201	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank N.A., Indonesia	521.084.778	102.484.778	58.618.667	-	Citibank N.A., Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	400.877.791	550.050.620	792.970.918	152.261.760	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	45.898.125	10.755.724	222.636.367	13.929.966	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Citibank N.A., Indonesia	1.111.051.329	1.421.863.113	3.262.207	-	Citibank N.A., Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	183.282.663	3.737.449.821	6.016.983.100	149.115.941	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	124.580.188	685.918.065	2.383.192.163	2.004.520.612	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Sub-jumlah	5.509.821.699	17.950.176.062	10.881.204.468	5.365.409.480	Sub-total
Jumlah	8.916.386.726	18.524.154.422	13.170.582.661	6.975.284.735	Total

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash on hand and in banks placed with related parties.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Mitra Putera Abadi	15.733.871.557	11.534.755.295	14.575.606.955	8.820.063.236	PT Mitra Putera Abadi
PT Wahana Kreasindo Utama	9.387.923.865	13.079.652.761	7.373.885.779	8.041.543.226	PT Wahana Kreasindo Utama
PT Pratama Inti Distribusindo	8.035.738.858	6.676.796.771	7.190.016.215	7.760.862.443	PT Pratama Inti Distribusindo
PT Unitama Nusa Raya	7.778.774.810	5.364.040.249	6.439.248.171	5.984.211.787	PT Unitama Nusa Raya
Saldo terbawa	40.936.309.090	36.655.245.076	35.578.757.120	30.606.680.692	Balance carried forward

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

a. Based on customers

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
Saldo bawaan	40.936.309.090	36.655.245.076	35.578.757.120	30.606.680.692
CV Multi Star Anugrah	7.419.102.435	5.386.744.641	5.732.702.647	11.258.548.852
CV Motorindo Sejahtera	4.832.344.491	1.615.310.261	1.261.434.293	716.440.728
CV Sinar Rejeki Jaya	4.351.360.890	938.915.042	1.903.132.503	-
PT Jasabarutama Perkasa	3.759.629.830	3.594.193.130	2.445.835.390	3.071.774.756
PT Unitama Musi Raya	3.506.402.555	2.228.889.812	521.888.613	-
CV Jaya Anugerah Perkasa	2.755.750.492	4.532.131.486	3.582.451.727	3.387.238.151
Yongkie Tanubrata	1.894.650.668	1.207.377.803	1.171.762.067	1.165.788.513
CV Trimitra Maju Sejahtera	1.728.017.621	1.798.496.964	1.724.207.906	1.024.383.095
PT Surganya Motor Indonesia	1.670.900.094	2.255.436.535	1.957.261.405	-
CV Rani Ismael	1.386.066.145	487.554.206	-	-
CV Sukses Indah Pratama	1.369.208.318	1.983.870.007	1.613.519.281	371.190.301
CV Aki Kita	1.328.385.964	1.278.230.722	2.229.066.273	2.368.924.807
PT Cahaya Eco Indonesia	1.192.318.639	1.332.039.600	1.072.977.537	738.244.730
CV San Star	1.188.232.429	2.258.010.705	2.088.373.483	1.017.364.350
PT Meka Adipratama	-	1.448.374.229	2.159.484.378	3.674.500.976
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	10.496.784.565	8.118.089.896	8.791.977.728	12.945.812.166
Jumlah	89.815.464.226	77.118.910.115	73.834.832.351	72.346.892.117
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(552.916.043)	(91.436.002)	-	-
Bersih	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117

Balance brought forward
CV Multi Star Anugrah
CV Motorindo Sejahtera
CV Sinar Rejeki Jaya
PT Jasabarutama Perkasa
PT Unitama Musi Raya
CV Jaya Anugerah Perkasa
Yongkie Tanubrata
CV Trimitra Maju Sejahtera
PT Surganya Motor Indonesia
CV Rani Ismael
CV Sukses Indah Pratama
CV Aki Kita
PT Cahaya Eco Indonesia
CV San Star
PT Meka Adipratama
Others (each below Rp 1,000,000,000)
Total
Less allowance for impairment of trade receivables
Net

b. Berdasarkan mata uang

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
Rupiah	88.627.565.882	77.118.910.115	72.940.227.205	71.928.082.638
Dolar Amerika Serikat	1.187.898.344	-	894.605.146	418.809.479
Jumlah	89.815.464.226	77.118.910.115	73.834.832.351	72.346.892.117
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(552.916.043)	(91.436.002)	-	-
Bersih	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117

Rupiah
United States Dollar
Total
Less allowance for impairment of trade receivables
Net

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

c. Berdasarkan umur

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	76.137.719.212	68.697.220.923	39.259.134.775	32.949.932.920	Not yet due
Telah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	13.043.181.177	7.510.272.842	7.673.105.046	7.528.906.384	1 - 30 days
31 - 60 hari	74.888.036	640.250.636	24.391.514.504	19.919.668.099	31 - 60 days
61 - 90 hari	45.542.892	-	1.828.350.555	8.207.288.435	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	514.132.909	271.165.714	682.727.471	3.741.096.279	More than 90 days
Jumlah	89.815.464.226	77.118.910.115	73.834.832.351	72.346.892.117	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(552.916.043)	(91.436.002)	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	89.262.548.183	77.027.474.113	73.834.832.351	72.346.892.117	Net

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha
adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	91.436.002	-	-	-	Beginning balance
Penambahan (Catatan 29)	461.480.041	91.436.002	-	-	Additions (Note 29)
Saldo akhir	552.916.043	91.436.002	-	-	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan
penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk
menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul
dari tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember
2021, 2020 dan 2019, piutang usaha digunakan
sebagai jaminan utang bank (lihat Catatan 14 dan 21).

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
(continued)

c. Based on aging

Movement in the allowance for impairment of trade
receivables is as follows:

Management believes that the allowance for
impairment in value of trade receivables is sufficient to
cover possible losses which might arise from
uncollectible receivables.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020
and 2019, trade receivables were used as collateral
for bank loans (see Notes 14 and 21).

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Bahan baku dan bahan pembantu	93.997.134.040	58.979.034.432	25.740.230.777	25.608.562.571	Raw materials and supplementary supplies
Barang dalam proses	3.229.918.327	1.878.527.437	16.177.225.969	2.315.556.099	Work in progress
Barang jadi	61.382.359.107	42.407.621.909	8.557.383.461	19.831.260.347	Finished goods
Jumlah	158.609.411.474	103.265.183.778	50.474.840.207	47.755.379.017	Total

7. INVENTORIES

This account consists of:

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, biaya persediaan yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan masing-masing adalah sebesar Rp 235.206.130.442, Rp 174.290.813.332, Rp 245.368.486.940, Rp 174.241.089.194, dan Rp 169.160.429.428 (lihat Catatan 27).

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan yang telah diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 80.000.000.000, Rp 80.000.000.000, Rp 80.000.000.000 dan Rp 60.000.000.000 pada PT Asuransi Maximus dan PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, pihak ketiga.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup semua kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungan.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank (lihat Catatan 14 dan 21).

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaan realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya, oleh karena itu, tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, akun ini merupakan asuransi dibayar dimuka atas persediaan dan aset tetap masing-masing sebesar Rp 71.810.404, Rp 82.461.934, Rp 77.526.661 dan Rp 70.840.018.

9. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 September 2022 / September 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Pembelian persediaan	14.478.678.681	10.485.405.117	15.930.337.168	5.150.011.416	Inventory purchases Operational
Operasional	1.127.345.820	677.732.830	1.969.628.013	831.193.895	
Jumlah	15.606.024.502	11.163.137.947	17.899.965.181	5.981.205.311	Total

7. INVENTORIES (continued)

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the cost of inventories recognized as part of the cost of goods sold amounted to Rp 235,206,130,442, Rp 174,290,813,332, Rp 245,368,486,940, Rp 174,241,089,194, and Rp 169,160,429,428, respectively (see Note 27).

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, inventories are insured against all risks of loss with total sum insured of Rp 80,000,000,000, Rp 80,000,000,000, Rp 80,000,000,000 and Rp 60,000,000,000, respectively, by PT Asuransi Maximus and PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, third parties.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the inventories that are insured.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, inventories were used as collateral for bank loans (see Notes 14 and 21).

Based on the review of net realizable value of inventories, management believes that the carrying amount of inventories does not exceed its net realizable value, therefore, there is no provision for impairment needed to adjust the carrying amount of inventories to its net realizable value.

8. PREPAID EXPENSE

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, this account represents prepaid insurance related to inventories and fixed assets amounted to Rp 71,810,404, Rp 82,461,934, Rp 77,526,661 and Rp 70,840,018, respectively.

9. ADVANCES

This account consists of:

10. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 30 September 2022, saldo biaya ditangguhkan sebesar Rp 2.030.000.000.

10. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of September 30, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 2,030,000,000.

11. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	559.577.107	-	-	559.577.107	Land
Bangunan	19.228.593.074	-	-	19.228.593.074	Buildings
Mesin dan peralatan	155.403.361.870	10.486.483.928	-	165.889.845.798	Machinery and equipment
Kendaraan	2.848.546.619	100.000.000	780.000.000	2.168.546.619	Vehicles
Perabotan kantor	960.315.232	47.818.621	-	1.008.133.853	Office furniture and fixtures
Jumlah	179.000.393.902	10.634.302.549	780.000.000	188.854.696.451	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	9.102.176.164	718.546.616	-	9.820.722.780	Buildings
Mesin dan peralatan	60.637.572.626	8.270.988.831	-	68.908.561.457	Machinery and equipment
Kendaraan	1.673.508.267	207.460.334	292.500.000	1.588.468.601	Vehicles
Perabotan kantor	793.606.449	91.290.224	-	884.896.673	Office furniture and fixtures
Jumlah	72.206.863.506	9.288.286.005	292.500.000	81.202.649.511	Total
Nilai Buku Bersih	106.793.530.396			107.652.046.940	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	559.577.107	-	-	559.577.107	Land
Bangunan	19.228.593.074	-	-	19.228.593.074	Buildings
Mesin dan peralatan	148.316.476.509	7.086.885.361	-	155.403.361.870	Machinery and equipment
Kendaraan	2.476.364.801	600.000.000	227.818.182	2.848.546.619	Vehicles
Perabotan kantor	912.524.219	47.791.013	-	960.315.232	Office furniture and fixtures
Jumlah	171.493.535.710	7.734.676.374	227.818.182	179.000.393.902	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	8.144.114.010	958.062.154	-	9.102.176.164	Buildings
Mesin dan peralatan	49.799.404.973	10.838.167.653	-	60.637.572.626	Machinery and equipment
Kendaraan	1.637.212.668	264.113.781	227.818.182	1.673.508.267	Vehicles
Perabotan kantor	671.238.269	122.368.180	-	793.606.449	Office furniture and fixtures
Jumlah	60.251.969.920	12.182.711.768	227.818.182	72.206.863.506	Total
Nilai Buku Bersih	111.241.565.790			106.793.530.396	Net Book Value

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	482.792.107	76.785.000	-	559.577.107	Land
Bangunan	19.138.593.074	90.000.000	-	19.228.593.074	Buildings
Mesin dan peralatan	143.412.964.649	4.903.511.860	-	148.316.476.509	Machinery and equipment
Kendaraan	2.838.726.801	-	362.362.000	2.476.364.801	Vehicles
Perabotan kantor	861.400.219	51.124.000	-	912.524.219	Office furniture and fixtures
Jumlah	166.734.476.850	5.121.420.860	362.362.000	171.493.535.710	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	7.186.051.856	958.062.154	-	8.144.114.010	Buildings
Mesin dan peralatan	39.491.523.322	10.307.881.651	-	49.799.404.973	Machinery and equipment
Kendaraan	1.756.303.689	243.270.979	362.362.000	1.637.212.668	Vehicles
Perabotan kantor	539.405.492	131.832.777	-	671.238.269	Office furniture and fixtures
Jumlah	48.973.284.359	11.641.047.561	362.362.000	60.251.969.920	Total
Nilai Buku Bersih	117.761.192.491			111.241.565.790	Net Book Value
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	482.792.107	-	-	482.792.107	Land
Bangunan	18.313.375.741	825.217.333	-	19.138.593.074	Buildings
Mesin dan peralatan	126.636.310.876	16.776.653.773	-	143.412.964.649	Machinery and equipment
Kendaraan	2.461.126.801	377.600.000	-	2.838.726.801	Vehicles
Perabotan kantor	645.224.404	216.175.815	-	861.400.219	Office furniture and fixtures
Jumlah	148.538.829.929	18.195.646.921	-	166.734.476.850	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	6.264.346.000	921.705.856	-	7.186.051.856	Buildings
Mesin dan peralatan	29.904.643.478	9.586.879.844	-	39.491.523.322	Machinery and equipment
Kendaraan	1.474.128.922	282.174.767	-	1.756.303.689	Vehicles
Perabotan kantor	404.859.126	134.546.366	-	539.405.492	Office furniture and fixtures
Jumlah	38.047.977.526	10.925.306.833	-	48.973.284.359	Total
Nilai Buku Bersih	110.490.852.403			117.761.192.491	Net Book Value

11. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban pokok penjualan (Catatan 27)	8.966.228.798	8.809.270.929	11.765.154.284	11.234.868.272	10.477.510.167	Cost of goods sold (Note 27)
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	322.057.207	309.333.444	417.557.484	406.179.289	447.796.666	General and administrative expenses (Note 29)
Jumlah	9.288.286.005	9.118.604.373	12.182.711.768	11.641.047.561	10.925.306.833	Total

Laba (rugi) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Hasil penjualan	425.000.000	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-	Proceeds from sale
Nilai buku bersih	487.500.000	-	-	-	-	Net book value
Laba (rugi) penjualan (Catatan 30)	(62.500.000)	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-	Gain (loss) on sale (Note 30)

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan diasuransikan terhadap seluruh risiko dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 119.889.300.000, Rp 81.518.158.700, Rp 81.518.158.700 dan Rp 81.518.158.700 oleh PT Asuransi Maximus dan PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, pihak ketiga.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi seluruh kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat aset tetap tertentu berupa perabotan kantor, mesin dan peralatan serta kendaraan yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Grup dengan biaya perolehan masing-masing Rp 8.534.676.470, Rp 8.246.309.498, Rp 2.731.043.253 dan Rp 1.832.051.321.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

11. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense was allocated to the following:

Gain (loss) on sale of fixed assets is as follows:

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, buildings, machinery and equipment and vehicles are insured against all risks of loss for a total coverage of Rp 119,889,300,000, Rp 81,518,158,700, Rp 81,518,158,700 and Rp 81,518,158,700, respectively, by PT Asuransi Maximus and PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, third parties.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the fixed assets that are insured.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are certain fixed assets in the form of office furniture and fixtures, machinery and equipment and vehicles which have been fully depreciated but are still being used to support the Group's operations with acquisition costs of Rp 8,534,676,470, Rp 8,246,309,498, Rp 2,731,043,253 and Rp 1,832,051,321, respectively.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no fixed assets used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan digunakan sebagai jaminan utang bank (lihat Catatan 14 dan 21).

12. ASET TAKBERWUJUD

Rincian dan mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS (continued)

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, fixed assets in the form of land, buildings, machinery and equipment were used as collateral for bank loans (see Notes 14 and 21).

12. INTANGIBLE ASSETS

The details and movements of intangible assets are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak	224.380.000	-	-	224.380.000	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak	167.438.750	42.071.250	-	209.510.000	Software
Nilai Buku Bersih	56.941.250			14.870.000	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak	224.380.000	-	-	224.380.000	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak	111.343.750	56.095.000	-	167.438.750	Software
Nilai Buku Bersih	113.036.250			56.941.250	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak	224.380.000	-	-	224.380.000	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak	55.248.750	56.095.000	-	111.343.750	Software
Nilai Buku Bersih	169.131.250			113.036.250	Net Book Value
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Perangkat lunak	116.380.000	108.000.000	-	224.380.000	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak	2.424.583	52.824.167	-	55.248.750	Software
Nilai Buku Bersih	113.955.417			169.131.250	Net Book Value

12. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban amortisasi dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 42.071.250, Rp 42.071.250, Rp 56.095.000, Rp 56.095.000 dan Rp 52.824.167

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

12. INTANGIBLE ASSETS (continued)

For the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, amortization expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 42,071,250, Rp 42,071,250, Rp 56,095,000, Rp 56,095,000 and Rp 52,824,167, respectively.

Management believes that there is no impairment in value of intangible assets as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

13. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

The details and movements of right-of-use assets are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	9.130.212.426	-	-	9.130.212.426	Acquisition Cost Buildings
Akumulasi Penyusutan Bangunan	1.369.531.863	342.382.965	-	1.711.914.828	Accumulated Depreciation Buildings
Nilai Buku Bersih	<u>7.760.680.563</u>			<u>7.418.297.598</u>	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	9.130.212.426	-	-	9.130.212.426	Acquisition Cost Buildings
Akumulasi Penyusutan Bangunan	913.021.242	456.510.621	-	1.369.531.863	Accumulated Depreciation Buildings
Nilai Buku Bersih	<u>8.217.191.184</u>			<u>7.760.680.563</u>	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	9.130.212.426	-	-	9.130.212.426	Acquisition Cost Buildings
Akumulasi Penyusutan Bangunan	456.510.621	456.510.621	-	913.021.242	Accumulated Depreciation Buildings
Nilai Buku Bersih	<u>8.673.701.805</u>			<u>8.217.191.184</u>	Net Book Value

13. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

13. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan Bangunan	-	9.130.212.426	-	9.130.212.426	Acquisition Cost Buildings
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	456.510.621	-	456.510.621	Accumulated Depreciation Buildings
Nilai Buku Bersih	-			8.673.701.805	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa gedung pabrik dan kantor. Sewa berjalan untuk jangka waktu 20 tahun.

The Group recognized right-of-use assets for leases of building factory and office. The leases run for a period of 20 years.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 342.382.965, Rp 342.382.965, Rp 456.510.621, Rp 456.510.621 dan Rp 456.510.621 (lihat Catatan 29).

For the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020, 2019, depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 342,382,965, Rp 342,382,965, Rp 456,510,621, Rp 456,510,621 and Rp 456,510,621, respectively (see Note 29).

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM BANK LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.924.380.313	52.555.914.481	41.918.591.740	51.835.086.061	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank N.A., Indonesia	58.700.950.000	54.935.669.250	2.538.901.880	-	Citibank N.A., Indonesia
Jumlah	109.625.330.313	107.491.583.731	44.457.493.620	51.835.086.061	Total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Perusahaan

The Company

Fasilitas Modal Kerja

Working Capital Facility

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 12 tanggal 17 November 2015 dengan Mandiri, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000 termasuk Sublimit Fasilitas Letter of Credit sebesar \$AS 1.000.000. Atas fasilitas ini, dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 16 November 2016.

Based on Working Capital Credit Agreement No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 No. 12 dated November 17, 2015 with Mandiri, the Company obtained a working capital credit facility with a maximum loan limit of Rp 25,000,000,000 including a Letter of Credit Facility Sublimit of US\$ 1,000,000. This facility bears interest at 11.5% per annum and with maturity date of November 16, 2016.

Perjanjian di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 15 November 2022 tentang perpanjangan jatuh tempo fasilitas kredit menjadi tanggal 16 November 2023.

The above agreement has been amended several times, most recently by Addendum IX Working Capital Credit Agreement No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 dated November 15, 2022 regarding the extension of the credit facility period until November 16, 2023.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Modal Kerja (lanjutan)

Berdasarkan Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 tanggal 12 Oktober 2022, terdapat perubahan ketentuan fasilitas kredit antara lain Pasal 17 ayat 2 tentang selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengambil dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi kecuali dalam hal Penawaran Umum Perdana. Pembagian dividen disampaikan maksimal 7 hari setelah pelaksanaan pembagian dividen dan menyerahkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Fasilitas Treasury Line

Perjanjian Jasa Pelayanan Treasury Line No. CRO.TNG/136/TL/2017 No. 08 tanggal 10 November 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas Treasury Line bersifat Revolving (Uncommitted and Advise) dengan maksimum pinjaman sebesar \$AS 1.000.000. Fasilitas Treasury Line diberikan dengan jenis Tom, Spot, Forward Buy dan Underlying Transaction Transaksi L/C/Impor dan/atau hak dan kewajiban valuta asing lainnya yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2018.

Perjanjian di atas telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Addendum VI Perjanjian Jasa Pelayanan Treasury Line No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 15 November 2022 tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit menjadi tanggal 16 November 2023.

Berdasarkan Addendum V Perjanjian Jasa Pelayanan Treasury Line No. CRO.TNG/136/TL/2017 tanggal 12 Oktober 2022, terdapat perubahan ketentuan fasilitas kredit antara lain Pasal 17 ayat 2 tentang selama kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi kecuali dalam hal penawaran umum perdana. Pembagian dividen disampaikan maksimal 7 hari setelah pelaksanaan pembagian dividen dan menyerahkan Rapat Umum Pemegang Saham.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

The Company (continued)

Working Capital Facility (continued)

Based on Addendum VIII Working Capital Credit Agreement No. CDO.JKO/0250/KMK/2015 dated October 12, 2022, there are changes to the provisions of the credit facility, among others, Article 17 paragraph 2 concerning the credit that has not been paid off without written approval from Mandiri, the Company is not allowed to take dividends or capital for interests outside the business and personal interests except in the case of initial public offering (IPO). Dividend distribution is submitted for a maximum of 7 days after the implementation of dividend distribution and submit the General Meeting of Shareholders.

Treasury Line Facility

Treasury Line Service Agreement No. CRO.TNG/136/TL/2017 No. 08 dated November 10, 2017, the Company obtained a Revolving Treasury Line Facility (Uncommitted and Advise) with a maximum loan amount of US\$ 1,000,000. The Treasury Line Facility is provided with Tom, Spot, Forward Buy and Underlying Transaction of L/C/Import Transaction and/or other foreign exchange rights and obligations with maturity date of November 16, 2018.

The above agreement has been amended several times, most recently by Addendum VI Treasury Line Services Agreement No. CRO.TNG/136/TL/2017 dated November 15, 2022 regarding the extension of the credit facility period to November 16, 2023.

Based on Addendum V of Treasury Line Services Agreement No. CRO.TNG/136/TL/2017 dated October 12, 2022, there are changes to the provisions of the credit facility, among others, Article 17 paragraph 2 concerning the credit that has not been paid off without written approval from Mandiri, the Company is not allowed to take dividends or capital for interests outside the business and personal interests except in the case of initial public offerings (IPO). Dividend distribution is submitted for a maximum of 7 days after the implementation of dividend distribution and submit the General Meeting of Shareholders.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Treasury Line (lanjutan)

Seluruh fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- a. Piutang usaha senilai Rp 16.500.000.000 (Catatan 6);
- b. Persediaan yang berlokasi di Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang senilai Rp 8.500.000.000 (Catatan 7);
- c. Bangunan pabrik ban luar, boiler, rumah kolam, milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang, yang diikat dengan Jaminan Fidusia dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp15.000.000.000 (Catatan 11);
- d. Mesin-mesin pabrik ban luar berikut peralatan kelengkapannya milik Perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang, yang diikat dengan Jaminan Fidusia dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000 (Catatan 11);
- e. 8 bidang tanah seluas 15.415 m² yang berlokasi di Desa Tambak, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000;
- f. 17 bidang tanah seluas 25.825 m² yang berlokasi di Desa Tambak, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 6.750.000.000;
- g. 14 bidang tanah seluas 27.150 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 8.250.000.000;
- h. 3 bidang tanah seluas 1.480 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000;
- i. 11 bidang tanah seluas 15.055 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Taslim Muliawan, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 6.850.000.000;

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

The Company (continued)

Treasury Line Facility (continued)

All of these loan facilities are secured by:

- a. Trade receivables amounted to Rp 16,500,000,000 (Note 6);
- b. Inventory located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang amounted to Rp 8,500,000,000 (Note 7);
- c. Tire factory building, boiler, pool house, owned by the Company located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang, which is bound by Fiduciary Guarantee with a guarantee value of Rp 15,000,000,000 (Note 11);
- d. Tire factory machinery and equipment owned by the Company located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang, which is bound by Fiduciary Guarantee with a guarantee value of Rp 5,000,000,000 (Note 11);
- e. 8 plots of land with an area of 15,415 m² located in Tambak Village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Liability Rights Rank I with a total amount of Rp 2,000,000,000;
- f. 17 plots of land with an area of 25,825 m² located in Tambak Village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 6,750,000,000;
- g. 14 plots of land with an area of 27,150 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 8,250,000,000;
- h. 3 plots of land with an area of 1,480 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety with a total amount of Rp 250,000,000;
- i. 11 plots of land with an area of 15,055 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Taslim Muliawan, a related party. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety with a total amount of Rp 6,850,000,000;

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Treasury Line (lanjutan)

- j. 3 bidang tanah seluas 7.340 m² yang berlokasi di Desa Namboilir, Cikande, Serang atas nama Indriana Angdrial atau Ang Mooy Ing, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 900.000.000;
- k. 19 bidang tanah seluas 28.245 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Taslim Muliawan, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000;
- l. 4 bidang tanah seluas 83.965 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indriana Angdrial atau Ang Mooy Ing, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000;
- m. 1 bidang tanah seluas 1.795 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I dengan jumlah sebesar Rp 200.000.000;
- n. 28 bidang tanah 39.790 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 31.500.000.000;
- o. 23 bidang tanah seluas 28.090 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indriana Angdrial atau Ang Mooy Ing, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp 1.300.000.000.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank. antara lain mengubah Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham. permodalan dan nilai saham; melakukan pembagian dividen; memindah-tangankan barang jaminan; mengalihkan aset kepada pihak lain Sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul dari pinjaman; mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain; mengikat diri sebagai penjamain hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain; melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham; memperoleh fasilitas kredit dari bank/Lembaga keuangan lain yang menambah risiko; melunasi hutang pemegang saham sebagian/seluruhnya.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

The Company (continued)

Treasury Line Facility (continued)

- j. 3 plots of land with an area of 7,340 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indriana Angdrial or Ang Mooy Ing, a related party. The guarantee has been tied up with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 900,000,000;
- k. 19 plots of land with an area of 28,245 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Taslim Muliawan, a related party. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 1,000,000,000;
- l. 4 plots of land with an area of 83,965 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indriana Angdrial or Ang Mooy Ing, a related party. The guarantee has been tied with a rank I Mortgage with a total amount of Rp 2,000,000,000;
- m. 1 plot of land with an area of 1,795 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with a rank I Mortgage with a total amount of Rp 200,000,000;
- n. 28 plots of 39,790 m² of land located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 31,500,000,000;
- o. 23 plots of land with an area of 28,090 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Indriana Angdrial or Ang Mooy Ing, a related party. The guarantee has been tied with Mortgage in its entirety for a total amount of Rp 1,300,000,000.

The loan agreements contain certain covenants wherein written approval should be obtained from the bank before executing certain matters which include among others: change the Articles of Association including shareholders, capital and share value; distribute dividends; transfer collateral goods; transfer assets to other parties in part or in whole of the rights and obligations arising from the loan; get a loan of money or credit from another party; bind themselves as guarantor of debt or pledge assets to other parties; perform mergers and acquisitions as well as share issuance; obtain credit facilities from banks/other financial institutions that increase risk; pay off the shareholder's debt in part/in full.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Treasury Line (lanjutan)

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/SPPK.361/2022 tanggal 28 Juni 2022, Mandiri menyetujui jika Perusahaan melakukan pembagian dividen, penambahan modal dasar dan modal disetor, perubahan pemegang saham perusahaan (Masuknya PT Kingland Investindo Nusantara), perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan pelaksanaan IPO.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022, Mandiri menyetujui antara lain perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan, perubahan pemegang saham tanpa merubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga, dan perubahan pengurus Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan wajib menjaga dan mempertahankan rasio keuangan diantaranya di bawah ini:

- a) *Current Ratio* di atas 100%;
- b) *Debt Equity Ratio* maksimum 233%;
- c) *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%;
- d) *Net Profit Margin* terjaga positif.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam pinjaman.

PT United Kingland (Entitas Anak)

Fasilitas Modal Kerja 1

Berdasarkan Perjanjian kredit modal kerja No. 10/VII/81Produksi/Industri tanggal 28 Juli 1981, telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain perubahan sekaligus penetapan seluruh ketentuannya dengan Addendum XV Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81/Produksi/Industri tanggal 6 Oktober 2014 tentang penyesuaian keterkaitan Agunan secara *cross collateral* dan *cross default*, dengan limit tetap sebesar Rp 15.000.000.000 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

The Company (continued)

Treasury Line Facility (continued)

Based on the letter No. CM2.JKO/SPPK.361/2022 dated June 28, 2022, Mandiri agreed if the Company distributes dividends, increases authorized and paid-up capital, changes the Company's shareholders (Entrance of PT Kingland Investindo Nusantara), changes the Company's Articles of Association, and implementation of the IPO.

Based on the letter No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 dated December 8, 2022, Mandiri approved among others, changes in capital and nominal amount of shares without causing a decrease in capital structure, changes in shareholders without changing the controlling shareholder in the name of Harris Muliawan and/or family, and changes in the Company's management.

In addition, the Company must protect and maintain financial ratios including the following:

- a) *Current Ratio* above 100%;
- b) *Debt Equity Ratio* maximum of 233%;
- c) *Debt Service Coverage Ratio* above 100%;
- d) *Net Profit Margin* must be positive.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has complied with the financial ratios required under the loan.

PT United Kingland (Subsidiary)

Working Capital Facility 1

Based on Working Capital Credit Agreement No. 10/VII/81Produksi/Industri dated July 28, 1981, which has been amended several times, among others, the stipulation of all its provisions with Addendum XV Working Capital Credit Agreement No. 10/VII/81Produksi/Industri dated October 6, 2014 concerning adjustments to collateral linkages on a cross collateral and cross default basis, with a fixed limit of Rp 15,000,000,000 and a period up to October 26, 2014.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

PT United Kingland (Entitas Anak) (lanjutan)

Fasilitas Modal Kerja 1 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.JKO.T.3/514/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah disetujui sebagai berikut:

- Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 dan tingkat suku bunga menjadi 11,5% per tahun
- Memberikan tambahan batas maksimum pinjaman Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* sebesar Rp 10.000.000.000, sehingga limit Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* menjadi Rp 25.000.000.000
- Perubahan lainnya antara lain: Pasal 3 ayat 1 tentang Sifat dan Tujuan, Pasal 6 Perjanjian, tentang Provisi, Pasal 7 ayat 1 huruf f Perjanjian, tentang Biaya-Biaya, Pasal 8 ayat 2 tentang Ketentuan dan Syarat-Syarat Penarikan Kredit, Pasal 9 tentang Syarat Efektif Perjanjian, Pasal 14 tentang "Agunan Kredit".

Berdasarkan Addendum XXVI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81/Produksi/Industri tanggal 12 November 2020, berikut ini telah disetujui:

- Perpanjangan jangka waktu pinjaman yang akan jatuh tempo pada 16 November 2021.
- Bunga pinjaman menjadi 9,75% per tahun.
- Perubahan Pasal 9 tentang syarat efektif perjanjian.
- Perubahan pasal 14 tentang jaminan kredit.
- Perubahan ketentuan Pasal 16 tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh debitur serta menambahkan keadaan kahar (*force majeure*).

Addendum XXVII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10/VII/81/Produksi/Industri tanggal 5 April 2021 tentang:

- Perubahan batas maksimum pinjaman menjadi Fasilitas kredit modal kerja *Revolving* Rp 25.000.000.000 dan sublimit fasilitas Letter of credit sebesar \$AS 600.000 yang akan jatuh tempo pada 16 November 2021.
- Bunga pinjaman menjadi 9,25% per tahun.

Berdasarkan Addendum XXVIII Perjanjian Kredit Modal Kerja Sublimit *Letter Of Credit* tertanggal 12 November 2021, pinjaman tersebut telah diperpanjang hingga 16 November 2022.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

PT United Kingland (Subsidiary) (continued)

Working Capital Facility 1 (continued)

Based on the Offer Letter to Grant Credit (SPPK) No. CBC.JKO.T.3/514/2014 dated October 23, 2014, the following has been approved:

- Extension of Credit Facility period until October 26, 2015 and interest rate of 11.5% per annum.
- Providing additional maximum loan limit of Revolving Working Capital Credit Facility amounted to Rp 10,000,000,000, resulting to limit of Revolving Working Capital Credit Facility amounted to Rp 25,000,000,000.
- Other changes include: Article 3 paragraph 1 regarding Nature and Purpose, Article 6 of the Agreement, regarding Provisions, Article 7 paragraph 1 letter f of the Agreement, regarding Fees, Article 8 paragraph 2 regarding Terms and Conditions of Credit Withdrawal, Article 9 regarding Effective Terms of the Agreement, Article 14 regarding "Credit Collateral".

Based on Addendum XXVI of Working Capital Credit Agreement No. 10/VII/81/Production/Industry dated November 12, 2020, the following has been approved:

- Extension of the loan term which will mature on November 16, 2021.
- Loan interest of 9.75% per annum.
- Amendment to Article 9 regarding the effective terms of the agreement.
- Amendment to Article 14 regarding credit guarantees.
- Amendment to the provisions of Article 16 regarding matters that must be carried out by the debtor and add a state of force majeure.

Addendum XXVII of Working Capital Credit Agreement No. 10/VII/81/Production/Industry dated April 5, 2021 concerning:

- Change the maximum loan limit to Revolving working capital credit facility of Rp 25,000,000,000 and Letter of credit facility sublimit of US\$ 600,000 which will mature on November 16, 2021.
- Loan interest of 9.25% per annum.

Based on Addendum XXVIII of Working Capital Credit Agreement Sublimit *Letter Of Credit* dated November 12, 2021, the loan has been extended until November 16, 2022.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

PT United Kingland (Entitas Anak) (lanjutan)

Fasilitas Modal Kerja 2

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 Akta No. 04 tanggal 29 Mei 2009 dibuat oleh Alya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Addendum XVIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 tanggal 12 November 2020 tentang perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit sampai dengan 16 November 2022.

Berdasarkan Addendum VII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 tanggal 6 Oktober 2014, penetapan seluruh ketentuannya dalam tentang penyesuaian keterkaitan Agunan secara *cross collateral* dan *cross default*, dengan batas maksimum pinjaman tetap sebesar Rp 5.000.000.000 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014.

Fasilitas Treasury Line

Berdasarkan Perjanjian Jasa Pelayanan *Treasury Line* No. CRO.JKO/0281/TL/2014 No. 2 tanggal 6 Oktober 2014 oleh Notaris Adrian Djuaini, SH, Notaris di Jakarta. Perusahaan mendapatkan fasilitas tersebut dengan batas maksimum pinjaman sebesar \$AS 1.000.000. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Addendum XI Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.JKO/0281/TL/2014 tanggal 12 November 2021 tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 16 November 2022.

Seluruh fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Seluruh persediaan telah diikat dengan nilai penjaminan sebesar Rp 45.000.000.000 (lihat Catatan 7);
- 8 bidang tanah seluas 15.415 m² yang berlokasi di Desa tambak, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham, dengan nilai tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000;
- 17 bidang tanah seluas 25.825 m² yang berlokasi di Desa Tambak, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 6.750.000.000;

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

PT United Kingland (Subsidiary) (continued)

Working Capital Facility 2

Based on Working Capital Credit Agreement No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 Deed No. 04, dated May 29, 2009 of Alya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., notary in Jakarta, which has been amended several times, most recently by Addendum XVIII of Working Capital Credit Agreement No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 dated November 12, 2020 regarding the extension of the Credit Facility period until November 16, 2022.

Based on Addendum VII Working Capital Credit Agreement No. RCO.JKO/112/PK-KMK/2009 dated October 6, 2014, stipulated all provisions with concerning adjustments to the linkage of Collateral on a cross collateral and cross default basis, with a fixed maximum loan limit of Rp 5,000,000,000 and a period of up to October 26, 2014.

Treasury Line Facility

Based on Treasury Line Service Agreement No. CRO.JKO/0281/TL/2014 No. 2 dated October 6, 2014, the Company obtained the facility with a maximum loan limit of US\$ 1,000,000. The agreement has been amended several times, most recently by Addendum XI of Treasury Line Agreement of No. CRO.JKO/0281/TL/2014 dated November 12, 2021 regarding the extension of credit facility period until November 16, 2022.

All of these loan facilities are secured by:

- All stocks have been tied up with a guaranteed value of Rp 45,000,000,000 (see Note 7);
- 8 plots of land with an area of 15,415 m² located in Tambak village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder, with a mortgage value of Rp 2,000,000,000;
- 17 plots of land with an area of 25,825 m² located in Tambak Village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in full for a total amount of Rp 6,750,000,000;

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

PT United Kingland (Entitas Anak) (lanjutan)

Fasilitas Treasury Line (lanjutan)

- d. 14 bidang tanah seluas 27.150 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 8.250.000.000;
- e. 3 bidang tanah seluas 1.480 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 250.000.000;
- f. 11 bidang tanah seluas 15.055 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 6.850.000.000;
- g. 3 bidang tanah seluas 7.340 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indriana Angdrial, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 900.000.000;
- h. 19 bidang tanah seluas 28.245 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000;
- i. 4 bidang tanah seluas 83.965 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama PT Lingga Djaja pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000;
- j. 1 bidang tanah seluas 1.795 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Harris Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat sebesar Rp 200.000.000;
- k. 28 bidang tanah seluas 39.790 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indra Muliawan, pemegang saham. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp 31.500.000.000;
- l. 23 bidang tanah seluas 28.090 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang atas nama Indriana Angdrial atau Ang Mooy Ing, pihak berelasi. Jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan seluruhnya dengan total sebesar Rp 1.300.000.000;
- m. Bangunan Pabrik Ban luar milik Perusahaan. Boiler dan sarana pelengkap lainnya berlokasi di Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang telah diikat dengan fidusia sebesar Rp 15.000.000.000;

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

PT United Kingland (Subsidiary) (continued)

Treasury Line Facility (continued)

- d. 14 plots of land with an area of 27,150 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with a Mortgage in full for a total amount of Rp 8,250,000,000;
- e. 3 plots of land with an area of 1,480 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied up with Mortgage in full for a total amount of Rp 250,000,000;
- f. 11 plots of land with an area of 15,055 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with Mortgage in full for a total amount of Rp 6,850,000,000;
- g. 3 plots of land with an area of 7,340 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Indriana Angdrial, a related party. The guarantee has been tied to a Mortgage for a total amount of Rp 900,000,000;
- h. 19 plots of land with an area of 28,245 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang on behalf of Harris Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with a Mortgage for a total of Rp 1,000,000,000;
- i. 4 plots of land with an area of 83,965 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of PT Lingga Djaja, a related party. The guarantee has been tied with a Mortgage for a total amount of Rp 2,000,000,000;
- j. 1 plot of land with an area of 1,795 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Harris Muliawan, a shareholder. The collateral has been secured by Mortgage for a total amount of Rp 200,000,000;
- k. 28 plots of land with an area of 39,790 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Indra Muliawan, a shareholder. The guarantee has been tied with a Mortgage for a total amount of Rp 31,500,000,000;
- l. 23 plots of land with an area of 28,090 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang under the name of Indriana Angdrial or Ang Mooy Ing, a related party. The guarantee has been tied with Mortgage for its entirety for a total of Rp 1,300,000,000;
- m. The Company's tire factory building, boiler and other complementary facilities located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang had been tied with a fiduciary amount of Rp 15,000,000,000;

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

PT United Kingland (Entitas Anak) (lanjutan)

Fasilitas Treasury Line (lanjutan)

- n. Mesin-mesin dan peralatannya (ban luar) milik Perusahaan berlokasi Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang telah diikat dengan fidusia sebesar Rp 5.000.000.000;
- o. Mesin-mesin pabrik (ban luar) milik Perusahaan berlokasi Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang telah diikat dengan fidusia sebesar Rp 30.000.000.000.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain mengubah Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, permodalan dan nilai saham; melakukan pembagian dividen; memindahkan-tanggalkan barang jaminan; mengalihkan aset kepada pihak lain Sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul dari pinjaman; mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain; mengikat diri sebagai penjamain hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain; melakukan merger dan akuisisi serta emisi saham; memperoleh fasilitas kredit dari bank/Lembaga keuangan lain yang menambah risiko; melunasi hutang pemegang saham sebagian/seluruhnya.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/SPPK.360/2022 tanggal 28 Juni 2022, Mandiri menyetujui jika entitas anak melakukan pembagian dividen, penambahan modal dasar dan modal disetor dan perubahan pemegang saham (Masuknya PT King Tire Indonesia) dan perubahan anggaran dasar menjadi Perusahaan Terbuka.

Entitas anak wajib menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a) *Current Ratio* di atas 100%;
- b) *Debt Equity Ratio* maksimum 233%;
- c) *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%;
- d) *Net Profit Margin* terjaga positif.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas Anak telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam pinjaman.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

PT United Kingland (Subsidiary) (continued)

Treasury Line facility (continued)

- n. The Company's machinery and equipment (tires) located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang had been tied with a fiduciary amount of Rp 5,000,000,000;
- o. Machinery Factory (tires) owned by the Company located at Jl. Raya Serang Km 68, Cikande, Serang had been tied with a fiduciary fee of Rp 30,000,000,000.

The loan agreement includes certain requirements not to do the following without prior written approval from the bank, among others: amending the Articles of Association including shareholders, capital and share value; distribute dividends; transfer collateral goods; transfer assets to other parties in part or in whole of the rights and obligations arising from the loan; get a loan of money or credit from another party; bind themselves as guarantor of debt or pledge assets to other parties; perform mergers and acquisitions as well as share issuance; obtain credit facilities from banks/other financial institutions that increase risk; pay off the shareholder's debt in part or in full.

Based on the letter No. CM2.JKO/SPPK.360/2022 dated June 28, 2022, Mandiri agreed if the subsidiary pays dividends, increases authorized and paid-up capital and changes in shareholders (Entry of PT King Tire Indonesia) and change in the articles of association to become a public company.

The subsidiary is required to protect and maintain the following financial ratios:

- a) *Current Ratio* above 100%;
- b) *Debt Equity Ratio* maximum 233%;
- c) *Debt Service Coverage Ratio* above 100%;
- d) *Net Profit Margin* must be positive.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Subsidiary has complied with the financial ratios required under the loan.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Citibank N.A., Indonesia (Citibank)

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. MCFA/00533/KTI/10022020 tanggal 23 Maret 2020 dengan Citibank, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman kredit berulang (*revolving*) berupa fasilitas modal kerja dan fasilitas pinjaman *trade*, fasilitas cerukan dengan batas maksimum kredit seluruhnya sebesar \$AS 5.000.000 dan dikenakan bunga 2% per tahun. Jatuh tempo selama satu tahun dan secara otomatis akan diperpanjang kecuali Citibank tidak melanjutkan/membatalkan fasilitas dalam jangka waktu 1 bulan setelah pemberitahuan oleh Citibank.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain

- Meminjamkan/mengkontribusikan sejumlah dana kepada anak perusahaan, pihak afiliasi, para direktur dan pengurus Perusahaan atau karyawan;
- Memfasilitasi/mendana kegiatan usaha yang dikenakan sanksi;
- Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pelepasan;
- Menjual, menyewakan, mentransfer seluruh atau suatu bagian yang substantial dari asetnya;
- Perubahan usaha;
- Perubahan pemegang saham.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Persediaan milik Perusahaan dengan nilai jaminan yang dapat ditentukan oleh Citibank.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. CCBSME/JKT/20210128/OL/0000550913/0001 tanggal 28 Januari 2021 dengan Citibank bahwa Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman kredit berupa fasilitas *short term loan* (LX) dengan mata uang RP ataupun \$AS dengan batas maksimum \$AS 2.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2.25% untuk pinjaman dalam mata uang \$AS dan 6% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 28 November 2022, berdasarkan surat No. CCBSME/JKT/20221128/KTI/0000550913/0001, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan perubahan pemegang saham dan pengambil-alihan PT United Kingland menjadi entitas anak. Akan tetapi jika perubahan kepemilikan yang terjadi diluar saham publik, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Citibank.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Citibank N.A., Indonesia (Citibank)

The Company

Based on Credit Agreement No. MCFA/00533/KTI/10022020 dated March 23, 2020 with Citibank, the Company obtained a revolving credit facility in the form of working capital and trade loan facilities, overdraft facilities with a maximum credit limit of US\$ 5,000,000 and bears interest of 2% per annum. Maturity term is one year and will automatically be extended unless Citibank does not continue/cancel the facility within 1 month after notification by Citibank.

The loan agreement includes certain requirements not to do the following things without prior written approval from the bank, among others:

- Lend/contribute a number of funds to subsidiary, affiliates, directors and management of the Company or employees;
- Facilitate/fund business activities that are subject to sanctions;
- Merger, fusion, takeover, divestiture;
- Sell, lease, transfer all or a substantial part of its assets;
- Business changes;
- Change of shareholders.

This loan facility is secured by the Company's inventory with a collateral value that can be determined by Citibank.

Based on Credit Letter Agreement No. CCBSME/JKT/20210128/OL/0000550913/0001 dated January 28, 2021 with Citibank, the Company obtained a credit facility in the form of a short-term loan (LX) in Rp or US\$ currency with a maximum limit of US\$ 2,000,000 which is used for working capital. This loan bears an interest rate of 2.25% for loans denominated in US\$ and 6% for loans denominated in Rupiah.

On November 28, 2022, based on letter No. CCBSME/JKT/20221128/KTI/0000550913/0001, the Company has obtained approval for the change of shareholders and the takeover of PT United Kingland as a subsidiary of the Company. However, if the change in ownership occurs outside of public shares, written approval must be obtained from Citibank.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Citibank N.A., Indonesia (Citibank) (lanjutan)

Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. MCFA/000895/UK/27052021 tanggal 7 Juni 2021 dengan Citibank, entitas anak mendapatkan fasilitas pinjaman kredit berulang (revolving) berupa fasilitas modal kerja dan fasilitas pinjaman trade, fasilitas cerukan dengan batas maksimum kredit seluruhnya sebesar \$AS 2.000.000. Jatuh tempo selama satu tahun dan secara otomatis akan diperpanjang kecuali Citibank tidak melanjutkan/membatalkan fasilitas dalam jangka waktu 1 bulan setelah pemberitahuan oleh Citibank. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 2% per tahun.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain

- Meminjamkan/mengkontribusikan sejumlah dana kepada anak perusahaan, pihak afiliasi, para direktur dan pengurus perusahaan atau karyawan;
- Memfasilitasi/mendanai kegiatan usaha yang dikenakan sanksi;
- Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pelepasan;
- Menjual, menyewakan, mentransfer seluruh atau suatu bagian yang substantial dari asetnya;
- Perubahan usaha;
- Perubahan pemegang saham.

Berdasarkan surat No. CCBSME/JKT/20221128/UK/0000108382/0001 tanggal 28 November 2022, entitas anak telah mendapatkan persetujuan perubahan pemegang saham dengan mayoritas saham tetap dimiliki oleh Keluarga Muliawan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan persediaan dengan nilai jaminan yang dapat ditentukan oleh Citibank.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Citibank N.A., Indonesia (Citibank) (continued)

Subsidiary

Based on Credit Agreement No. MCFA/000895/UK/27052021 dated June 7, 2021 with Citibank. The subsidiary obtained a revolving credit facility in the form of working capital and trade loan facilities, overdraft facilities with a maximum total credit limit of US\$ 2,000,000. Maturity term is one year and will automatically be extended unless Citibank does not continue/cancel the facility within 1 month after notification by Citibank. The loan bears interest of 2% per annum.

The loan agreement includes certain requirements not to do the following things without prior written approval from the bank, among others:

- Lend/contribute a number of funds to subsidiary, affiliates, directors and management of the Company or employees;
- Facilitate/fund business activities that are subject to sanctions;
- Merger, fusion, takeover, divestiture;
- Sell, lease, transfer all or a substantial part of its assets;
- Business changes;
- Change of shareholders.

Based on letter No. CCBSME/JKT/20221128/UK/0000108382/0001 dated November 28, 2022, the subsidiary has obtained approval for changes in shareholders with the majority of shares still owned by the Muliawan Family.

This loan facility is secured by inventories with a collateral value that can be determined by Citibank.

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok

	31 September 2022 / September 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
Pihak berelasi: (Catatan 32)				
PT Lingga Djaja	-	-	8.840.462.400	-
Pihak Ketiga:				
PT Luhai Industrial	8.541.034.582	2.855.725.400	5.265.194.000	4.216.558.500
PT Sari Sarana Kimiatama	3.016.755.796	1.262.208.200	1.608.214.314	949.049.200
Saldo terbawa	11.557.790.378	4.117.933.600	6.873.408.314	5.165.607.700

Related party:
(Note 32)

PT Lingga Djaja

Third parties:

PT Luhai Industrial
PT Sari Sarana Kimiatama
Balance carried forward

15. UTANG USAHA (lanjutan)

a. Berdasarkan pemasok (lanjutan)

	31 September 2022 / September 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo bawaan	11.557.790.378	4.117.933.600	6.873.408.314	5.165.607.700	Balance brought forward
PT Pilar Bersama Maju	1.550.170.999	-	13.486.000	-	PT Pilar Bersama Maju
PT Pemindo	1.097.039.473	899.193.432	750.486.000	531.950.595	PT Pemindo
PT Primajaya					PT Primajaya
Eratama	871.559.844	186.832.910	2.182.027.540	506.796.840	Eratama
PT Murni Kusuma Jaya	66.885.825	121.649.550	1.504.502.587	-	PT Murni Kusuma Jaya
PT Harta Perindo Sejahtera	-	1.262.912.000	-	-	PT Harta Perindo Sejahtera
CV Gracia Rubber Industri	-	-	1.174.800.000	343.970.000	CV Gracia Rubber Industri
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	11.616.687.962	7.948.927.347	8.612.581.463	6.059.441.053	Others (each below Rp 1,000,000,000)
Sub-jumlah	26.760.134.481	14.537.448.839	21.111.291.904	12.607.766.188	Sub-total
Jumlah	26.760.134.481	14.537.448.839	29.951.754.304	12.607.766.188	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 September 2022 / September 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Rupiah	25.650.854.243	13.884.927.240	29.661.050.151	11.753.160.679	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.109.280.238	652.521.599	290.704.153	-	United States Dollar
Yuan Cina	-	-	-	854.605.509	Chinese Yuan
Jumlah	26.760.134.481	14.537.448.839	29.951.754.304	12.607.766.188	Total

c. Berdasarkan umur

	31 September 2022 / September 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	9.846.825.886	5.902.666.087	6.792.960.185	3.745.213.029	Not yet due
Telah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	7.657.428.695	3.916.344.808	12.176.314.044	3.813.256.879	1 - 30 days
31 - 60 hari	4.756.326.199	3.153.779.397	8.187.247.640	2.229.720.244	31 - 60 days
61 - 90 hari	2.571.392.528	674.969.600	2.273.866.550	2.236.915.725	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	1.928.161.173	889.688.947	521.365.885	582.660.311	More than 90 days
Jumlah	26.760.134.481	14.537.448.839	29.951.754.304	12.607.766.188	Total

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

15. TRADE PAYABLES (continued)

a. Based on suppliers (continued)

b. Based on currency

c. Based on aging

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there is no collateral regarding trade payables.

16. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
<u>Dolar</u>		
<u>Amerika Serikat</u>		
Freder Trading Co. Ltd	12.543.005.538	12.737.279.926
<u>Yuan China</u>		
Xiamen Sheng Jeng Maqchinery Co. Ltd	526.725.576	-
<u>Rupiah</u>		
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 300.000.000)	15.540.000	1.287.042.442
Jumlah	13.085.271.114	14.024.322.368

Pada tanggal 21 Juli 2022, Perusahaan dan Freder Trading Co. Ltd., sepakat untuk menandatangani *Term Sheet Loan Agreement* mengenai pembelian mesin dengan kontrak pesanan dari tahun 2011 hingga 2012 yang memiliki saldo sebesar \$AS 892.654 (setara dengan Rp 13.375.527.536) pada bulan Juli 2022. Kedua belah pihak menyetujui bahwa pembayaran akan jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

16. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
<u>United States Dollar</u>			
Freder Trading Co. Ltd	16.074.825.368	15.842.335.952	
<u>Chinese Yuan</u>			
Xiamen Sheng Jeng Maqchinery Co. Ltd	282.701.277	245.457.053	
<u>Rupiah</u>			
Others (each below Rp 300,000,000)	192.100.815	279.714.963	
Total	16.549.627.460	16.367.507.968	

On July 21, 2022, the Company and Freder Trading Co. Ltd., agreed to sign a *Term Sheet Loan Agreement* regarding the purchase of machinery with contract orders from 2011 to 2012 which has an outstanding balance of US\$ 892,654 (equivalent to Rp 13,375,527,536) in July 2022. Both parties agreed that the payment will be due on June 2023.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan masing-masing sebesar Rp 2.487.865.981, nihil, Rp 332.081.282 dan nihil.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pajak</u>		
penghasilan:		
Pasal 4(2)	37.203.207	37.098.000
Pasal 15	1.006.500	478.800
Pasal 21	28.248.385	17.832.021
Pasal 22	15.651.600	12.684.015
Pasal 23	14.577.428	844.935.185
Pasal 25	42.061.112	62.135.577
Pasal 29		
Tahun berjalan	14.999.997	21.090.920
Tahun 2019	50.364.250	50.364.250
<u>Pajak</u>		
<u>Pertambahan</u>		
Nilai	-	930.064.588
Sub-jumlah	204.112.479	1.976.683.356

17. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, this account represents prepaid tax on Value-Added Tax of the Company amounted to Rp 2,487,865,981, nil, Rp 332,081,282 and nil, respectively.

b. Taxes Payable

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
<u>The Company</u>			
<u>Income</u>			
<u>taxes:</u>			
Article 4(2)	37.098.000	18.549.000	
Article 15	361.500	224.390	
Article 21	24.718.055	4.023.357	
Article 22	3.979.113	12.611.336	
Article 23	549.326.509	8.544.077	
Article 25	5.854.059	11.488.313	
Article 29			
Current year	651.450.578	267.934.433	
Year 2019	50.364.250	-	
<u>Value- Added Tax</u>	-	718.315.883	
Sub-total	1.323.152.064	1.041.690.789	

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak (lanjutan)

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Entitas Anak					Subsidiary
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 4(2)	30.161.058	29.805.600	29.805.600	14.902.800	Article 4(2)
Pasal 15	275.880	264.120	142.500	92.402	Article 15
Pasal 21	16.077.601	32.575.315	55.701.391	6.433.017	Article 21
Pasal 22	14.193.150	8.663.955	4.179.970	5.684.865	Article 22
Pasal 23	5.566.521	15.445.069	86.172.451	1.599.302	Article 23
Pasal 25	41.797.570	58.018.195	16.541.257	48.245.521	Article 25
Pasal 29					Article 29
Tahun berjalan	12.557.955	16.744.137	382.760.957	18.811.999	Current year
Tahun 2018	36.109.000	36.109.000	36.109.000	36.109.000	Tahun 2018
Pajak Pertambahan Nilai	384.662.353	848.877.083	377.556.394	481.204.093	Value-Added Tax
Sub-jumlah	541.401.088	1.046.502.474	988.969.520	613.082.999	Sub-total
Jumlah	745.513.567	3.023.185.830	2.312.121.584	1.654.773.788	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	16.983.294.391	16.084.605.962	19.814.946.561	10.302.843.547	11.350.442.736	Income before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	2.905.437.404	3.661.223.071	6.742.475.699	3.618.987.582	4.403.362.825	Income before income tax of the Subsidiary
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	14.077.856.987	12.423.382.891	13.072.470.862	6.683.855.965	6.947.079.911	Income before income tax of the Company

17. TAXATION (continued)

b. Taxes Payable (continued)

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)
Saldo bawaan	14.077.856.987	12.423.382.891	13.072.470.862	6.683.855.965	6.947.079.911
Beda					
temporer:					
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	418.216.612	-	91.436.002	-	-
Penyusutan aset hak-guna	189.488.623	189.488.623	252.651.498	252.651.498	252.651.498
Beban bunga liabilitas sewa	109.894.607	114.392.529	152.523.372	150.573.926	151.590.899
Penyusutan aset tetap	(797.847.538)	(797.847.538)	(1.063.796.717)	(1.063.796.717)	(1.063.796.717)
Beban sewa	(208.676.250)	(208.676.250)	(278.235.000)	(185.490.000)	(185.490.000)
Imbalan kerja karyawan	(20.902.106)	(700.814.402)	(664.485.932)	205.092.580	412.167.699
Beda					
permanen:					
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.086.297.892	30.407.071	622.761.063	758.086.128	108.242.882
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(31.958.375)	(42.659.782)	(50.377.685)	(67.886.706)	(19.277.619)
Taksiran penghasilan kena pajak untuk periode/tahun berjalan	14.822.370.452	11.007.673.142	12.134.947.463	6.733.086.674	6.603.168.553
Taksiran penghasilan kena pajak untuk periode/tahun berjalan - (pembulatan)	14.822.370.000	11.007.673.000	12.134.947.000	6.733.086.000	6.603.168.000
Beban pajak penghasilan kini:					
Perusahaan	3.260.921.400	2.421.688.060	2.669.688.340	1.481.278.920	1.650.792.000
Entitas anak	1.536.164.960	1.003.019.600	1.297.806.840	955.063.339	1.352.019.500
Jumlah beban pajak penghasilan kini	4.797.086.360	3.424.707.660	3.967.495.180	2.436.342.259	3.002.811.500
Dikurangi pajak dibayar di muka:					
Perusahaan	3.245.921.403	1.834.651.304	2.648.597.420	829.828.342	1.382.857.567
Entitas anak	1.523.607.005	990.461.558	1.281.062.703	572.302.382	1.333.207.501
Jumlah pajak dibayar di muka	4.769.528.408	2.825.112.862	3.929.660.123	1.402.130.724	2.716.065.068
Utang pajak penghasilan					
Perusahaan	14.999.997	587.036.756	21.090.920	651.450.578	267.934.433
Entitas anak	12.557.955	12.558.042	16.744.137	382.760.957	18.811.999
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	27.557.952	599.594.798	37.835.057	1.034.211.535	286.746.432

Balance brought forward

Temporary differences:

Allowance for impairment of trade receivables

Depreciation of right-of-use assets

Interest expense on lease liabilities

Depreciation of fixed assets

Rent expenses

Employee benefits

Permanent differences:

Non-deductible expenses

Income subject to final tax

Estimated taxable income for the period/year

Estimated taxable income for the period/year - (rounded off)

Current income tax expense:

The Company

Subsidiary

Total current income tax expense

Less prepaid taxes:

The Company

Subsidiary

Total prepaid taxes

Income tax payable

The Company

Subsidiary

Estimated income tax payable Article 29

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

d. Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

c. Corporate Income Tax (continued)

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

d. Deferred Tax

The details of deferred tax assets (liabilities) as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja karyawan	679.338.794	(4.598.463)	(70.933.224)	603.807.107	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(936.141.111)	(175.526.458)	-	(1.111.667.569)	Depreciation of fixed assets
Sewa	135.940.046	19.813.478	-	155.753.524	Leases
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	20.115.920	92.007.655	-	112.123.575	Allowance for impairment of trade receivables
Liabilitas pajak tangguhan	(100.746.351)	(68.303.788)	(70.933.224)	(239.983.363)	Deferred tax liabilities
Entitas Anak					Subsidiary
Imbalan kerja karyawan	1.261.535.968	8.336.713	(71.991.562)	1.197.881.119	Employee benefits
Sewa	97.348.802	15.478.637	-	112.827.439	Leases
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	9.517.952	-	9.517.952	Allowance for impairment of trade receivables
Aset pajak tangguhan	1.358.884.770	33.333.302	(71.991.562)	1.320.226.510	Deferred tax assets
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan				The Company	
Imbalan kerja karyawan	782.461.146	(146.186.905)	43.064.553	679.338.794	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(702.105.833)	(234.035.278)	-	(936.141.111)	Depreciation of fixed assets
Sewa	96.027.320	39.912.726	-	135.940.046	Leases
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	20.115.920	-	20.115.920	Allowance for impairment of trade receivables
Liabilitas pajak tangguhan	176.382.633	(320.193.537)	43.064.553	(100.746.351)	Deferred tax liabilities

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax (continued)

31 Desember 2021 (lanjutan) / December 31, 2021 (continued)					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Entitas Anak					Subsidiary
Imbalan kerja karyawan	1.726.626.563	(272.408.829)	(192.681.766)	1.261.535.968	Employee benefits
Sewa	76.027.369	21.321.433	-	97.348.802	Leases
Aset pajak tangguhan	1.802.653.932	(251.087.396)	(192.681.766)	1.358.884.770	Deferred tax assets
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja karyawan	569.743.894	45.120.368	167.596.884	782.461.146	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(468.070.555)	(234.035.278)	-	(702.105.833)	Depreciation of fixed assets
Sewa	48.125.527	47.901.793	-	96.027.320	Leases
Entitas Anak					Subsidiary
Imbalan kerja karyawan	1.564.138.027	73.717.816	88.770.720	1.726.626.563	Employee benefits
Sewa	38.111.514	37.915.855	-	76.027.369	Leases
Aset pajak tangguhan	1.752.048.407	(29.379.446)	256.367.604	1.979.036.565	Deferred tax assets
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Imbalan kerja karyawan	440.413.517	90.676.894	38.653.483	569.743.894	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(234.035.278)	(234.035.278)	-	(468.070.555)	Depreciation of fixed assets
Sewa	-	48.125.527	-	48.125.527	Leases
Entitas Anak					Subsidiary
Imbalan kerja karyawan	601.198.083	128.979.494	833.960.450	1.564.138.027	Employee benefits
Sewa	-	38.111.515	-	38.111.514	Leases
Aset pajak tangguhan	807.576.322	71.858.152	872.613.933	1.752.048.407	Deferred tax assets

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur, antara lain, penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

17. TAXATION (continued)

e. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal year 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Biaya gaji	4.437.488.339	3.635.939.834
Jasa profesional	1.640.000.000	-
Bunga	998.574.940	807.206.451
Jumlah	7.076.063.279	4.440.146.215

18. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	2.919.035.091	2.468.545.227	Salaries
	-	-	Professional fees
	538.081.526	269.993.930	Interest
Total	3.457.116.617	2.738.539.157	Total

19. UANG JAMINAN

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pelanggan atas pesanan produk dari Grup sebesar Rp 38.000.000.000.

19. SECURITY DEPOSITS

As of September 30, 2022, this account represents security deposits from customers for the order of the Group's products amounted to Rp 38,000,000,000.

20. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Liabilitas sewa	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	Lease liabilities
Dikurangi:					Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	821.426.392	609.225.564	366.606.549	130.954.474	Current portion
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.308.786.034	8.520.986.862	8.763.605.877	8.999.257.952	Lease liabilities, net of current portion

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	-	Beginning balance
Dampak penerapan awal PSAK 73	-	-	-	9.130.212.426	Effect of early adoption of PSAK 73
Saldo akhir	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	Ending balance

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kurang dari satu tahun	2.174.367.000	1.672.590.000	1.170.813.000	669.036.000	Less than one year
Satu tahun sampai lima tahun	2.986.575.000	2.639.802.000	2.547.057.000	2.508.885.000	One year up to five years
Lebih dari lima tahun	7.588.914.000	8.437.464.000	9.031.986.000	9.571.935.000	More than five years
Jumlah	12.749.856.000	12.749.856.000	12.749.856.000	12.749.856.000	Total
Biaya keuangan mendatang	3.619.643.574	3.619.643.574	3.619.643.574	3.619.643.574	Future finance charges
Sebagaimana Dilaporkan	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	As Reported

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

The following are the amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income relating to lease with recognized right-of-use assets and lease liabilities:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months / Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 13 dan 29)	342.382.965	342.382.965	456.510.621	456.510.621	456.510.621	Depreciation of right-of-use assets (Notes 13 and 29)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	194.368.489	242.702.597	266.124.925	268.087.595	153.319.106	Accretion of interest on lease liabilities
Jumlah	536.751.454	585.085.562	722.635.546	724.598.216	609.829.727	Total

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	734.031.228	4.041.360.228	8.451.132.228	12.860.504.228	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dikurangi:					Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	734.031.228	734.031.228	4.409.772.000	4.409.772.000	Current portion
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	3.307.329.000	4.041.360.228	8.450.732.228	Long-term bank loan, net of current portion

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Perusahaan

Berdasarkan "Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.TNG/135/KI/2017", No. 07 tanggal 10 November 2017 dengan Mandiri. Perusahaan mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi (*Non Revolving*) dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 21.000.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 11% per tahun dan dengan tanggal jatuh tempo pada 16 November 2022. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin.

Atas fasilitas di atas dijamin dengan aset tetap berupa mesin senilai Rp 30.000.000.000 dan jaminan yang sama dengan fasilitas yang diperoleh dari utang bank jangka pendek (lihat Catatan 11 dan 14).

Berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.TNG/135/KI/2017 tanggal 14 November 2018, terdapat perubahan ketentuan fasilitas kredit investasi antara lain batas maksimum pinjaman berubah menjadi Rp 25.000.000.000.

Berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.TNG/135/KI/2017 tanggal 14 November 2019 tentang perubahan ketentuan fasilitas kredit antara lain:

- Perubahan Limit Pinjaman untuk Fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum sebesar Rp 20.194.598.229 dan perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 16 November 2020.

21. LONG-TERM BANK LOAN

This account consists of:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

The Company

Based on "Investment Credit Agreement No. CRO.TNG/135/KI/2017", No. 07 dated November 10, 2017 with Mandiri, the Company obtained an Investment Credit Facility (*Non Revolving*) with a maximum loan limit of Rp 21,000,000,000 which bears interest of 11% per annum and with maturity date of November 16, 2022. The loan is used for the purchase of fixed assets in the form of machinery.

The above facility is secured by fixed assets in the form of machinery amounted to Rp 30,000,000,000 and the same collateral as the facility obtained from short-term bank loans (see Notes 11 and 14).

Based on the First Addendum to Investment Credit Agreement No. CRO.TNG/135/KI/2017 dated November 14, 2018, there were changes in the provisions of the investment credit facility, among others, the maximum loan limit changed to Rp 25,000,000,000.

Based on the Second Addendum to the Investment Credit Agreement No. CRO.TNG/135/KI/2017 dated November 14, 2019 regarding changes to credit facility provisions. including:

- Change of Loan Limit for Investment Credit Facility with a maximum limit of Rp 20,194,598,229 and an extension of the loan period until November 16, 2020.

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- b) Beserta perubahan lainnya dalam ketentuan pasal 9 tentang syarat efektif perjanjian dan pasal 16 tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh debitur.

Berdasarkan Surat Addendum Ketiga Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.TNG/135/KI/2017 tanggal 12 Oktober 2022 tentang perubahan ketentuan fasilitas kredit antara lain pasal 17 ayat 2 tentang kredit belum lunas tanpa persetujuan tertulis dari mandiri Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengambil dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi kecuali dalam hal *Initial Public Offering* (IPO) dan menyampaikan pembagian dividen setelah pelaksanaan menyerahkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/SPPK.361/2022 tanggal 28 Juni 2022, Mandiri menyetujui jika Perusahaan melakukan pembagian dividen, penambahan modal dasar dan modal disetor, perubahan pemegang saham perusahaan (Masuknya PT Kingland Investindo Nusantara), perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan pelaksanaan IPO.

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 tanggal 8 Desember 2022, Mandiri menyetujui antara lain perubahan permodalan dan nominal saham tidak menyebabkan penurunan struktur permodalan, perubahan pemegang saham tanpa merubah pemegang saham pengendali atas nama Harris Muliawan dan/atau keluarga, dan perubahan pengurus Perusahaan.

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 2019, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Muh Imam Basuki dan Rekan dengan laporannya bertanggal 17 November 2022 dan 20 Juni 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

21. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (continued)

The Company (continued)

- b) Along with other changes in the provisions of Article 9 concerning the effective terms of the agreement and Article 16 concerning matters that must be carried out by the debtor.

Based on the Second Addendum to the Investment Credit Agreement No. CRO.TNG/135/KI/2017 dated October 12, 2022 regarding changes to the provisions of the credit facility, among others, Article 17 paragraph 2 concerning credit that has not been paid off without written approval from Mandiri, the Company is not allowed to take dividends or capital for interests outside the business and personal interests except in the case of Initial Public Offering (IPO) and submit dividend distribution after the submission of the General Meeting of Shareholders.

Based on the letter No. CM2.JKO/SPPK.361/2022 dated June 28, 2022, Mandiri agreed if the Company distributes dividends, increases authorized and paid-up capital, changes the Company's shareholders (Entrance of PT Kingland Investindo Nusantara), changes the Company's Articles of Association, and implementation of the IPO.

Based on the letter No. CM2.JKO/SPPK.658/2022 dated December 8, 2022, Mandiri approved among others, changes in capital and nominal amount of shares without causing a decrease in capital structure, changes in shareholders without changing the controlling shareholder in the name of Harris Muliawan and/or family, and changes in the Company's management.

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of September 30, 2022 December 31, 2021, 2020 and 2019, the recorded estimated liabilities for employee benefits are based on the actuarial reports of KKA Muh Imam Basuki and Rekan dated November 17, 2022 and June 20, 2022 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Usia pensiun	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum	8% per tahun / per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,53% per tahun / per annum	7,54% per tahun / per annum	6,87% per tahun / per annum	7,95% per tahun / per annum	Discount rate
Tingkat mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	100% TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% at 20 up to 40 years then decreased linearly to 0% at 55 years	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% at 20 up to 40 years then decreased linearly to 0% at 55 years	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% at 20 up to 40 years then decreased linearly to 0% at 55 years	5% pada usia 20 sampai usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% at 20 up to 40 years then decreased linearly to 0% at 55 years	Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban jasa kini	460.490.871	536.886.778	719.278.356	749.251.711	731.366.614	Current service cost
Beban bunga	492.011.930	587.639.746	783.519.662	853.330.945	408.071.514	Interest cost
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-	(2.345.910.612)	(2.494.330.281)	-	-	Decrease in liabilities due to program changes
Jumlah	952.502.801	(1.221.384.088)	(991.532.263)	1.602.582.656	1.139.438.128	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(649.658.118)	(1.071.050.426)	(680.078.241)	1.165.307.293	3.966.426.966	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274	4.734.598.180	Beginning balance
Beban periode/tahun berjalan (Catatan 29 dan 30)	952.502.801	(991.532.263)	1.602.582.656	1.139.438.128	Expense in current period/year (Notes 29 and 30)
Pembayaran imbalan kerja	(935.510.759)	(911.175.621)	(1.062.409.092)	(141.000.000)	Benefits paid
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(649.658.118)	(680.078.241)	1.165.307.293	3.966.426.966	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Saldo akhir	8.189.491.930	8.822.158.006	11.404.944.131	9.699.463.274	Ending balance

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(673.269.485)	775.780.808		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	729.304.406	(647.304.386)		Salary growth rate
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(613.533.794)	700.509.890		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	614.596.755	(549.352.547)		Salary growth rate
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(771.505.341)	888.000.753		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	405.836.943	(317.903.386)		Salary growth rate

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

22. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

31 Desember 2019 / December 31, 2019			
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(298.890.641)	387.937.106
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	592.204.138	(525.103.658)
			Discount rate Salary growth rate

23. MODAL SAHAM

23. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan masing-masing pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Harris Muliawan	56.059	40,36%	56.059.000.000	Harris Muliawan
PT Kingland Investindo				PT Kingland Investindo
Nusantara	55.000	39,60%	55.000.000.000	Nusantara
Indra Muliawan	27.717	19,95%	27.717.000.000	Indra Muliawan
Hardi Muliawan	125	0,09%	125.000.000	Hardi Muliawan
Jumlah	138.901	100,00%	138.901.000.000	Total
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 / December 31, 2021, 2020 and 2019				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Harris Muliawan	56.059	66,82%	56.059.000.000	Harris Muliawan
Indra Muliawan	27.717	33,03%	27.717.000.000	Indra Muliawan
Hardi Muliawan	125	0,15%	125.000.000	Hardi Muliawan
Jumlah	83.901	100,00%	83.901.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 75 dari Dewi Octaria, S.H., M.Kn., tanggal 28 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui:

- a. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 83.901.000.000 menjadi Rp 250.000.000.000.

Based on Notarial Deed No. 75 of Dewi Octaria, S.H., M.Kn., dated June 28, 2022, the shareholders agreed to:

- a. Increase the Company's authorized capital from Rp 83,901,000,000 to Rp 250,000,000,000.

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 83.901.000.000 menjadi Rp 138.901.000.000 yang seluruhnya melalui setoran tunai.
- c. Persetujuan masuknya PT Kingland Investindo Nusantara sebagai pemegang saham baru dengan jumlah saham sebanyak 55.000 saham dengan nilai nominal Rp 55.000.000.000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 39,6%.

Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045063.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022.

Berdasarkan Resolusi Sirkuler tanggal 24 Juni 2022, Perusahaan melakukan pembagian dividen sebesar Rp 25.000.000.000 atau setara Rp 297.970 per saham. Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Harris Muliawan sebesar Rp 16.703.912.945;
- b) Indra Muliawan sebesar Rp 8.258.840.777;
- c) Hardi Muliawan sebesar Rp 37.246.278.

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 dari Adrian Djuani, S.H., tanggal 11 Desember 2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 16.000.000.000, dari Rp 67.901.000.000 menjadi Rp 83.901.000.000.

Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0239642.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

23. SHARE CAPITAL (continued)

- b. Increase the issued and paid-up capital from Rp 83,901,000,000 to Rp 138,901,000,000 through cash deposit.
- c. Approve the entry of PT Kingland Investindo Nusantara as a new shareholder consisting of 55,000 shares with a nominal value of Rp 55,000,000,000 or equivalent to 39.6% ownership.

The Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0045063.01.02.Tahun 2022 dated June 30, 2022.

Based on the Circular Resolution dated June 24, 2022, the Company distributed dividends amounted to Rp 25,000,000,000 or equivalent to Rp 297,970 per share. The details are as follows:

- a) Harris Muliawan amounted to Rp 16,703,912,945;
- b) Indra Muliawan amounted to Rp 8,258,840,777;
- c) Hardi Muliawan amounted to Rp 37,246,278.

Based on Notarial Deed No. 14 of Adrian Djuani, S.H., dated December 11, 2019, the shareholders agreed to increase the authorized, issued and paid-up capital by Rp 16,000,000,000, from Rp 67,901,000,000 to Rp 83,901,000,000,000.

The Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0239642.AH.01.11.Tahun 2019 dated December 11, 2019.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return of capital to shareholders or issue new shares.

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai pinjaman (utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang), utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, uang jaminan dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Jumlah liabilitas	204.411.042.841	153.665.073.807
Dikurangi kas dan bank	8.916.386.726	18.524.154.422
Utang bersih	195.494.656.115	135.140.919.385
Jumlah ekuitas	181.152.321.168	168.494.350.291
Rasio pengungkit	1,08	0,80

23. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management (continued)

The Group monitors its capital using gearing ratio by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as borrowings (short-term bank loans and long-term bank loan), trade payables, other payables, accrued expenses, security deposits and lease liabilities less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Jumlah liabilitas	111.997.336.655	105.539.616.028	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	13.170.582.661	6.975.284.735	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	98.826.753.994	98.564.331.293	Net debt
Jumlah ekuitas	152.687.718.815	145.759.536.662	Total equity
Rasio pengungkit	0,65	0,68	Gearing ratio

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih antara nilai buku aset bersih dan imbalan yang dialihkan, yang diakui sebagai akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp 13.572.345.057.

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents the difference between the book value of net assets acquired and the consideration transferred, which is recognized as the "Difference in Value Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control" amounted to Rp 13,572,345,057.

25. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 24 Juni 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 10.229.716.984 dari saldo laba tahun 2021.

25. RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Based on the Circular Resolution of the Company's Shareholders dated June 24, 2022, the shareholders approved the appropriation of the general reserve amounted to Rp 10,229,716,984 from the retained earnings for the year 2021.

26. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Ban luar	245.897.805.923	171.573.457.744	248.328.073.118	165.260.801.915	138.109.472.601	Tire
Ban dalam	114.769.133.556	99.017.608.689	136.011.423.369	130.972.795.682	135.234.836.953	Tube
Jumlah	360.666.939.479	270.591.066.433	384.339.496.487	296.233.597.597	273.344.309.554	Total

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh penjualan bersih Grup merupakan penjualan dari pihak ketiga.

Terdapat penjualan dari pihak tertentu dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PT Wahana	-	27.335.868.216	38.939.754.391	-	-	PT Wahana
Kreasindo Utama	-	-	-	-	-	Kreasindo Utama
Persentase dari penjualan bersih	-	10%	10%	-	-	Percentage from net sales
PT Mitra Putera Abadi	-	34.166.376.369	48.434.829.243	40.472.050.753	46.142.736.830	PT Mitra Putera Abadi
Persentase dari penjualan bersih	-	13%	13%	14%	17%	Percentage from net sales

The details of net sales are as follows:

For the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group's net sales represent all sales from third parties.

There were sales from certain parties with cumulative value value exceeding 10% of the net sales, with details as follows:

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Bahan baku						Raw materials
Awal	58.979.034.432	25.740.230.777	25.740.230.777	25.608.562.571	24.766.508.866	Beginning
Pembelian	270.232.150.050	209.348.387.761	278.709.334.395	174.374.656.900	170.027.679.633	Purchases
Retur pembelian	(7.920.000)	(106.432.662)	(102.043.800)	(1.899.500)	(25.196.500)	Purchase returns
Jumlah bahan baku	329.203.264.482	234.982.185.876	304.347.521.372	199.981.319.971	194.768.991.999	Total raw materials
Akhir (Catatan 7)	(93.997.134.040)	(60.691.372.544)	(58.979.034.432)	(25.740.230.777)	(25.608.562.571)	Ending (Note 7)
Bahan baku terpakai	235.206.130.442	174.290.813.332	245.368.486.940	174.241.089.194	169.160.429.428	Raw materials used
Biaya tidak langsung						Indirect costs
Gaji dan tunjangan	45.705.367.468	35.636.532.499	47.819.252.029	36.387.658.009	34.218.947.358	Salaries and allowances
Listrik	14.961.041.397	13.690.609.581	18.856.157.141	15.415.786.039	14.193.705.441	Electricity
Perbaikan dan pemeliharaan	9.970.716.584	7.284.946.604	12.516.685.025	8.576.098.791	3.877.666.650	Repairs and maintenance
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	8.966.228.798	8.809.270.929	11.765.154.284	11.234.868.272	10.477.510.167	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Perlengkapan	3.393.032.030	2.655.684.659	3.695.403.202	2.030.898.982	1.655.724.836	Supplies
Impor	2.612.602.449	2.361.594.910	2.863.638.176	2.627.095.723	3.536.120.577	Import
Lain-lain	5.225.410.828	2.644.618.507	3.446.315.116	1.494.002.389	920.071.384	Others
Jumlah biaya tidak langsung	90.834.399.554	73.083.257.689	100.962.604.973	77.766.408.205	68.879.746.413	Total indirect costs
Jumlah Biaya produksi	326.040.529.996	247.374.071.021	346.331.091.913	252.007.497.399	238.040.175.841	Total production cost

27. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follows:

27. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

27. COST OF GOODS SOLD (continued)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Saldo bawaan	326.040.529.996	247.374.071.021	346.331.091.913	252.007.497.399	238.040.175.841	Balance brought forward
Barang dalam proses						Work in progress
Awal	1.878.527.437	16.177.225.969	16.177.225.969	2.315.556.099	2.438.056.770	Beginning
Akhir (Catatan 7)	(3.229.918.327)	(1.688.281.528)	(1.878.527.437)	(16.177.225.969)	(2.315.556.099)	Ending (Note 7)
	<u>(1.351.390.890)</u>	<u>14.488.944.441</u>	<u>14.298.698.532</u>	<u>(13.861.669.870)</u>	<u>122.500.671</u>	
Persediaan barang jadi						Finished goods
Awal	42.407.621.909	8.557.383.461	8.557.383.461	19.831.260.347	16.027.113.635	Beginning
Akhir (Catatan 7)	(61.382.359.107)	(41.244.118.850)	(42.407.621.909)	(8.557.383.461)	(19.831.260.347)	Ending (Note 7)
	<u>(18.974.737.198)</u>	<u>(32.686.735.389)</u>	<u>(33.850.238.448)</u>	<u>11.273.876.886</u>	<u>(3.804.146.712)</u>	
Jumlah	<u>305.714.401.908</u>	<u>229.176.280.073</u>	<u>326.779.551.997</u>	<u>249.419.704.415</u>	<u>234.358.529.800</u>	Total

Terdapat pembelian dari pihak tertentu dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari penjualan bersih, dengan rincian sebagai berikut:

There were purchases from certain parties with cumulative purchase value exceeding 10% of the net sales, with details as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Haiyang Technology Co. Ltd	37.541.564.535	-	-	-	-	Haiyang Technology Co. Ltd
Persentase dari penjualan bersih	10%	-	-	-	-	Percentage from net sales
PT Perkebunan Nusantara VIII	-	-	-	-	30.626.255.034	PT Perkebunan Nusantara VIII
Persentase dari penjualan bersih	-	-	-	-	11%	Percentage from net sales

28. BEBAN PENJUALAN

28. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pengangkutan	7.268.136.875	4.419.040.981	6.482.597.362	5.332.273.563	4.839.211.838	Freight
Gaji dan tunjangan	5.191.108.008	6.583.682.179	9.060.971.564	6.969.301.100	-	Salaries and allowances
Hadiah dan promosi	2.661.710.000	1.468.728.980	2.816.240.980	2.972.112.558	3.100.819.000	Reward and promotion
Iklan	2.382.271.472	768.479.880	1.194.883.206	1.498.294.082	1.118.611.607	Advertising
Lain-lain	27.590.000	95.350.620	139.669.500	190.477.760	206.725.925	Others
Jumlah	<u>17.530.816.355</u>	<u>13.335.282.640</u>	<u>19.694.362.612</u>	<u>16.962.459.063</u>	<u>9.265.368.370</u>	Total

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji dan tunjangan	8.438.453.764	7.910.714.048	10.857.338.206	9.326.249.415	8.335.403.650	Salaries and allowances
Jasa manajemen	1.987.000.000	480.000.000	1.710.000.000	-	-	Management fee
Imbalan kerja (Catatan 22)	952.502.801	-	-	1.602.582.656	1.139.438.128	Employee benefits expenses (Note 22)
Keperluan kantor	541.295.501	137.422.800	132.188.300	842.269.014	119.166.686	Office supplies
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	461.480.041	91.436.002	91.436.002	-	-	Allowance for impairment of trade receivables (Note 6)
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 13)	342.382.965	342.382.965	456.510.621	456.510.621	456.510.621	Depreciation of right-of-use assets (Note 13)
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	322.057.207	309.333.444	417.557.484	406.179.289	447.796.666	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Asuransi	144.803.564	126.715.196	169.221.553	167.648.443	140.227.517	Insurance
Pemeliharaan	102.563.868	85.154.390	104.667.208	119.081.243	131.297.703	Maintenance
Perizinan	102.358.050	105.258.404	152.874.404	60.224.158	125.122.077	License
Jasa profesional	81.126.931	507.532.310	713.527.129	584.971.364	413.070.466	Professional fees
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	173.444.473	148.212.541	184.434.782	426.249.427	164.926.588	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	13.649.469.165	10.244.162.100	14.989.755.689	13.991.965.630	11.472.960.102	Total

30. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) selisih kurs	(3.514.040.154)	485.257.169	631.359.284	(596.665.167)	551.278.278	Gain (loss) on foreign exchange
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap (Catatan 11)	(62.500.000)	59.090.910	129.090.910	180.000.000	-	Gain (loss) on sale of fixed assets (Note 11)
Pendapatan imbalan kerja (Catatan 22)	-	1.221.384.088	991.532.263	-	-	Employee benefits income (Note 22)
Lain-lain - bersih	82.131.128	68.997.266	(461.997.425)	(424.470.561)	(314.762.615)	Others - net
Bersih	(3.494.409.026)	1.834.729.433	1.289.985.032	(841.135.728)	236.515.663	Net

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

30. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other income (expenses) are as follows:

31. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.050.111.129	9.036.078.052	9.517.695.566	5.321.816.866	7.646.012.772
Jumlah rata-rata tertimbang saham	2.050.078.824	1.678.020.000	1.678.020.000	1.678.020.000	1.678.020.000
Laba per saham dasar	5,39	5,38	5,67	3,17	4,56

Net income attributable to owners of the parent entity
Weighted average number of shares
Basic earnings per share

31. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

32. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan, saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

32. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The nature of relationship, balances and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions
Harris Muliawan	Personil manajemen kunci / Key management personnel	Piutang lain-lain dan liabilitas sewa / Other receivables and lease liabilities
PT Lingga Djaja	Kesamaan manajemen kunci / Has similar key management	Utang usaha / Trade payables
Indra Muliawan	Family dari pemegang saham / Family of shareholders	Liabilitas sewa / Lease liabilities
Indriana Angdrial	Family dari pemegang saham/ Family of shareholders	Liabilitas sewa / Lease liabilities
Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors	Personil manajemen kunci / Key management personnel	Gaji dan tunjangan / Salaries and allowances

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, sebagai berikut:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, as follows:

- PT United Kingland, entitas anak, memberikan pinjaman kepada Harris Muliawan, selaku Direktur Utama Perusahaan. Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ada skedul pembayaran serta jaminan.
- Perusahaan memiliki pinjaman kepada PT Lingga Djaja atas pembelian bahan baku yang digunakan untuk produksi.
- Perusahaan menyewa lahan yang digunakan untuk Gedung pabrik dan kantor di Serang, Cikande (lihat Catatan 36).

- PT United Kingland, a subsidiary, provided a loan to Harris Muliawan, as President Director of the Company. The loan is non-interest bearing and has no payment schedule and no collateral.
- The Company has a loan to PT Lingga Djaja for the purchase of raw materials used for production.
- The Company leased land used for factory and office buildings in Serang, Cikande (see Note 36).

32. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
Aset				
<u>Piutang lain-lain</u>				
Harris Muliawan	-	7.000.000.000	-	-
Persentase terhadap Jumlah Aset	-	2,51%	-	-
Liabilitas				
<u>Utang usaha</u>				
(Catatan 15)				
PT Lingga Djaja	-	-	8.840.462.400	-
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	-	-	7,03%	-
<u>Liabilitas sewa</u>				
(Catatan 20)				
Harris Muliawan	4.738.319.066	4.738.319.066	4.738.319.066	4.738.319.066
Indra Muliawan	4.250.865.566	4.250.865.566	4.250.865.566	4.250.865.566
Indriani Angdrial	141.027.794	141.027.794	141.027.794	141.027.794
Jumlah	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426	9.130.212.426
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	4,27%	5,51%	7,26%	7,81%

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi wajar dilakukan hanya jika persyaratan tersebut dapat dibuktikan.

32. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of balances arising from transactions with related parties are as follows:

Asset	
<u>Other receivable</u>	
Harris Muliawan	-
Percentage to Total Assets	-
Liabilities	
<u>Trade payable</u>	
(Note 15)	
PT Lingga Djaja	-
Percentage to Total Liabilities	-
<u>Lease liabilities</u>	
(Note 20)	
Harris Muliawan	4.738.319.066
Indra Muliawan	4.250.865.566
Indriani Angdrial	141.027.794
Total	9.130.212.426
Percentage to Total Liabilities	7,81%

Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

33. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

	30 September 2022 / September 30, 2022	
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	8.916.386.726	8.916.386.726
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	598.864.551
Piutang usaha	89.262.548.183	89.262.548.183
Piutang lain-lain	300.000.000	300.000.000
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Keuangan	99.527.799.460	99.527.799.460

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Restricted fund
Trade receivables
Other receivables
Other asset
Total Financial Assets

33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

30 September 2022 / September 30, 2022 (lanjutan / continued)		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value
Liabilitas Keuangan		
Utang bank jangka pendek	109.625.330.313	109.625.330.313
Utang usaha	26.760.134.481	26.760.134.481
Utang lain-lain	13.085.271.114	13.085.271.114
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	7.076.063.279
Uang jaminan	38.000.000.000	38.000.000.000
Liabilitas sewa	9.130.212.426	9.130.212.426
Utang bank jangka panjang	734.031.228	734.031.228
Jumlah Liabilitas Keuangan	204.411.042.841	204.411.042.841
		Financial Liabilities
		Short-term bank loans
		Trade payables
		Other payables
		Accrued expenses
		Security deposits
		Lease liabilities
		Long-term bank loan
		Total Financial Liabilities
31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	18.524.154.422	18.524.154.422
Dana yang dibatasi penggunaannya	590.565.113	590.565.113
Piutang usaha	77.027.474.113	77.027.474.113
Piutang lain-lain	7.032.500.000	7.032.500.000
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Keuangan	103.624.693.648	103.624.693.648
		Financial Assets
		Cash on hand and in banks
		Restricted fund
		Trade receivables
		Other receivables
		Other asset
		Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan		
Utang bank jangka pendek	107.491.583.731	107.491.583.731
Utang usaha	14.537.448.839	14.537.448.839
Utang lain-lain	14.024.322.368	14.024.322.368
Beban masih harus dibayar	4.440.146.215	4.440.146.215
Liabilitas sewa	9.130.212.426	9.130.212.426
Utang bank jangka panjang	4.041.360.228	4.041.360.228
Jumlah Liabilitas Keuangan	153.665.073.807	153.665.073.807
		Financial Liabilities
		Short-term bank loans
		Trade payables
		Other payables
		Accrued expenses
		Lease liabilities
		Long-term bank loan
		Total Financial Liabilities
31 Desember 2020 / December 31, 2020		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	13.170.582.661	13.170.582.661
Dana yang dibatasi penggunaannya	576.463.053	576.463.053
Piutang usaha	73.834.832.351	73.834.832.351
Piutang lain-lain	35.000.000	35.000.000
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000
Jumlah Aset Keuangan	88.066.878.065	88.066.878.065
		Financial Assets
		Cash on hand and in banks
		Restricted fund
		Trade receivables
		Other receivables
		Other asset
		Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan		
Utang bank jangka pendek	44.457.493.620	44.457.493.620
Utang usaha	29.951.754.304	29.951.754.304
Utang lain-lain	16.549.627.460	16.549.627.460
Beban masih harus dibayar	3.457.116.617	3.457.116.617
Liabilitas sewa	9.130.212.426	9.130.212.426
Utang bank jangka panjang	8.451.132.228	8.451.132.228
Jumlah Liabilitas Keuangan	111.997.336.655	111.997.336.655
		Financial Liabilities
		Short-term bank loans
		Trade payables
		Other payables
		Accrued expenses
		Lease liabilities
		Long-term bank loan
		Total Financial Liabilities

33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	6.975.284.735	6.975.284.735	Cash on hand and in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	553.817.101	553.817.101	Restricted fund
Piutang usaha	72.346.892.117	72.346.892.117	Trade receivables
Piutang lain-lain	163.897.500	163.897.500	Other receivables
Aset lain-lain	450.000.000	450.000.000	Other asset
Jumlah Aset Keuangan	80.489.891.453	80.489.891.453	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	51.835.086.061	51.835.086.061	Short-term bank loans
Utang usaha	12.607.766.188	12.607.766.188	Trade payables
Utang lain-lain	16.367.507.968	16.367.507.968	Other payables
Beban masih harus dibayar	2.738.539.157	2.738.539.157	Accrued expenses
Liabilitas sewa	9.130.212.426	9.130.212.426	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	12.860.504.228	12.860.504.228	Long-term bank loan
Jumlah Liabilitas Keuangan	105.539.616.028	105.539.616.028	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain dan aset lain-lain sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada 31 Desember 2019, aset keuangan Grup tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".
- Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan uang jaminan mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar liabilitas sewa dan utang bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.
- As of September 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group's financial assets comprising of cash on hand and in banks, restricted fund, trade receivables, other receivables and other asset are classified as "financial assets at amortized cost", while as of December 31, 2019, those Group's financial assets are classified as "loans and receivables".
- The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and security deposits are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and security deposits approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The fair values of lease liabilities and long-term bank loan are classified as "financial liabilities at amortized cost", which are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko bunga, kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Grup mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang asing neto Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam tabel di bawah ini:

30 September 2022 / September 30, 2022		
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent
Aset		
Kas di bank		
Dolar Amerika Serikat	93.062	1.418.914.180
Piutang usaha		
Dolar Amerika Serikat	77.910	1.187.898.344
Aset Moneter		2.606.812.524
Liabilitas		
Utang bank jangka pendek		
Dolar Amerika Serikat	3.510.124	58.700.950.000
Utang usaha		
Dolar Amerika Serikat	72.754	1.109.280.238
Utang lain-lain		
Dolar Amerika Serikat	822.654	12.543.005.538
Yuan Cina	248.925	526.725.576
Liabilitas Moneter Bersih		72.879.961.352 (70.273.148.828)
31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent
Aset		
Kas di bank		
Dolar Amerika Serikat	409.645	5.845.230.999
Liabilitas		
Utang bank jangka pendek		
Dolar Amerika Serikat	3.850.003	54.935.688.500
Utang usaha		
Dolar Amerika Serikat	45.730	652.521.599
Utang lain-lain		
Dolar Amerika Serikat	892.654	12.737.279.926
Liabilitas Moneter Bersih		68.325.490.025 (62.480.259.026)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign currency risk, interest risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Foreign Currency Risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value of cash flows of a financial instrument in the future will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

The Group manages its foreign currency exposure by matching, as much as possible, receipts and payments of each individual currency. The amount of the Group's net foreign currency exposure at the reporting date is disclosed in the table below:

Assets
Cash in banks
United States Dollar
Trade receivables
United States Dollar
Monetary Assets
Liabilities
Short-term bank loans
United States Dollar
Trade payables
United States Dollar
Other payables
United States Dollar
Chinese Yuan
Monetary Liabilities
Net

Assets
Cash in banks
United States Dollar
Liabilities
Short-term bank loans
United States Dollar
Trade payables
United States Dollar
Other payables
United States Dollar
Monetary Liabilities
Net

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

a. Foreign Currency Risk (continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent	
Aset			Assets
Kas di bank			Cash in banks
Dolar Amerika Serikat	595.777	8.403.437.470	United States Dollar
Piutang usaha			Trade receivables
Dolar Amerika Serikat	63.425	894.605.146	United States Dollar
Aset Moneter		9.298.042.616	Monetary Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
Dolar Amerika Serikat	180.000	2.538.902.780	United States Dollar
Utang usaha			Trade payables
Dolar Amerika Serikat	20.610	290.704.153	United States Dollar
Utang lain-lain			Other payables
Dolar Amerika Serikat	1.139.654	16.074.825.368	United States Dollar
Yuan Cina	130.790	282.701.277	Chinese Yuan
Liabilitas Moneter Bersih		19.187.133.578	Monetary Liabilities
		(9.889.090.962)	Net
31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent	
Aset			Assets
Kas di bank			Cash in banks
Dolar Amerika Serikat	154.927	2.153.636.553	United States Dollar
Piutang usaha			Trade receivables
Dolar Amerika Serikat	30.128	418.809.479	United States Dollar
Aset Moneter		2.572.446.032	Monetary Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang bank jangka pendek			Short-term bank loans
Dolar Amerika Serikat	3.850.000	53.518.869.250	United States Dollar
Utang usaha			Trade payables
Yuan Cina	429.234	854.605.509	Chinese Yuan
Utang lain-lain			Other payables
Dolar Amerika Serikat	1.139.654	15.842.335.952	United States Dollar
Yuan Cina	123.294	245.457.053	Chinese Yuan
Liabilitas Moneter Bersih		70.461.267.764	Monetary Liabilities
		(67.888.821.732)	Net

Grup melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan Yuan Cina dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Grup tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

The Group has business transactions in United States Dollar and Chinese Yuan, therefore, are exposed to foreign exchange risk. The Group does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas Grup atas perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas di bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup akun-akun moneter dalam mata uang asing.

Tabel di bawah juga menggambarkan dampak terhadap laba atau rugi setelah pajak dan ekuitas Grup ketika mata uang di atas mengalami penguatan dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, di mana semua variabel lain dianggap konstan. Perubahan dalam persentase yang sama dari melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, akan memberikan dampak yang sama namun dalam arah yang berlawanan terhadap laba atau rugi dan ekuitas.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Foreign Currency Risk (continued)

The following tables detail the Group's sensitivity to changes in Rupiah against the foreign currencies. The sensitivity rate below represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items.

The following tables also indicate the effect after tax in profit or loss and equity of the Group wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currencies against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit or loss and equity.

30 September 2022 / September 30, 2022

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba atau rugi / Profit or loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	(941.819.382)	(941.819.382)	Strengthened
Melemah	1%	941.819.382	941.819.382	Weakened

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba atau rugi / Profit or loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	(551.383.793)	(551.383.793)	Strengthened
Melemah	1%	551.383.793	551.383.793	Weakened

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba atau rugi / Profit or loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	(352.229.591)	(352.229.591)	Strengthened
Melemah	1%	352.229.591	352.229.591	Weakened

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba atau rugi / Profit or loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	487.412.756	487.412.756	Strengthened
Melemah	1%	(487.412.756)	(487.412.756)	Weakened
Yuan China				Chinese Yuan
Menguat	1%	15.110.382	15.110.382	Strengthened
Melemah	1%	(15.110.382)	(15.110.382)	Weakened

b. Risiko Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Grup memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo utang bank yang dikenakan suku bunga mengambang pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

30 September 2022 / September 30, 2022				
	Kenaikan dalam basis poin / Increase in basis points	Dampak pada Laba Rugi / Effect on Profit or Loss		
Rupiah	100	(509.243.803)		Rupiah
Dolar Amerika Serikat	100	(587.009.500)		United States Dollar

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Foreign Currency Risk (continued)

b. Interest Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the market interest rates.

The Group's exposure to interest rate risk mainly arises from loans for working capital. Loans at variable interest rates exposed the Group to fair value interest rate risk.

To minimize the interest rate risk, the management reviews all interest rate offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable change in interest rates on the floating interest bank loans as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 with all other variables held constant, to the profit before income tax for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019:

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Bunga (lanjutan)

31 Desember 2021 / December 31, 2021		
Kenaikan dalam basis poin /	Dampak pada Laba Rugi /	
Increase in basis points	Effect on Profit or Loss	
Rupiah	100	(525.559.144)
Dolar Amerika Serikat	100	(549.356.692)
		Rupiah
		United States Dollar
31 Desember 2020 / December 31, 2020		
Kenaikan dalam basis poin /	Dampak pada Laba Rugi /	
Increase in basis points	Effect on Profit or Loss	
Rupiah	100	(419.185.917)
Dolar Amerika Serikat	100	(25.389.018)
		Rupiah
		United States Dollar
31 Desember 2019 / December 31, 2019		
Kenaikan dalam basis poin /	Dampak pada Laba Rugi /	
Increase in basis points	Effect on Profit or Loss	
Rupiah	100	(518.350.860)
		Rupiah

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Interest Risk (continued)

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the credit quality of each class of financial assets based on the Group's assessment is as follows:

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

c. Credit Risk (continued)

30 September 2022 / September 30, 2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	5.509.821.699	-	-	-	5.509.821.699	Cash in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	598.864.551	-	-	-	598.864.551	Restricted fund
Piutang usaha	76.137.719.212	13.124.828.971	552.916.043	(552.916.043)	89.262.548.183	Trade receivables
Piutang lain-lain	300.000.000	-	-	-	300.000.000	Other receivables
Aset lain-lain	450.000.000	-	-	-	450.000.000	Other asset
Jumlah	82.996.405.462	13.124.828.971	552.916.043	(552.916.043)	96.121.234.433	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	17.950.176.602	-	-	-	17.950.176.602	Cash in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	590.565.113	-	-	-	590.565.113	Restricted fund
Piutang usaha	68.697.220.923	8.330.253.190	91.436.002	(91.436.002)	77.027.474.113	Trade receivables
Piutang lain-lain	7.032.500.000	-	-	-	7.032.500.000	Other receivables
Aset lain-lain	450.000.000	-	-	-	450.000.000	Other asset
Jumlah	94.720.462.638	8.330.253.190	91.436.002	(91.436.002)	103.050.715.828	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	10.881.204.468	-	-	-	10.881.204.468	Cash in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	576.463.053	-	-	-	576.463.053	Restricted fund
Piutang usaha	39.259.134.775	34.575.697.576	-	-	73.834.832.351	Trade receivables
Piutang lain-lain	35.000.000	-	-	-	35.000.000	Other receivables
Aset lain-lain	450.000.000	-	-	-	450.000.000	Other asset
Jumlah	51.201.802.296	34.575.697.576	-	-	85.777.499.872	Total

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

c. Credit Risk (continued)

31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	5.365.409.480	-	-	-	5.365.409.480	Cash in banks
Dana yang dibatasi penggunaannya	553.817.101	-	-	-	553.817.101	Restricted fund
Piutang usaha	32.949.932.920	39.396.959.197	-	-	72.346.892.117	Trade receivables
Piutang lain-lain	163.897.500	-	-	-	163.897.500	Other receivables
Aset lain-lain	450.000.000	-	-	-	450.000.000	Other asset
Jumlah	39.483.057.001	39.396.959.197	-	-	78.880.016.198	Total

d. Risiko Likuiditas

d. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2022, December 31, 2021 and 2020.

30 September 2022 / September 30, 2022						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 years	1 sampai 5 tahun / 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	109.625.330.313	-	-	-	109.625.330.313	Short-term bank loans
Utang usaha	26.760.134.481	-	-	-	26.760.134.481	Trade payables
Utang lain-lain	13.085.271.114	-	-	-	13.085.271.114	Other payables
Beban masih harus dibayar	7.076.063.279	-	-	-	7.076.063.279	Accrued expenses
Uang jaminan	38.000.000.000	-	-	-	38.000.000.000	Security deposits
Liabilitas sewa	2.174.367.000	2.986.575.000	7.588.914.000	(3.619.643.574)	9.130.212.426	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	744.294.087	-	-	(10.262.859)	734.031.228	Long-term bank loan
Jumlah	197.465.460.274	2.986.575.000	7.588.914.000	(3.629.906.433)	204.411.042.841	Total

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 years	1 sampai 5 tahun / 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	107.491.583.731	-	-	-	107.491.583.731	Short-term bank loans
Utang usaha	14.537.448.839	-	-	-	14.537.448.839	Trade payables
Utang lain-lai	14.024.322.368	-	-	-	14.024.322.368	Other payables
Beban masih harus dibayar	4.440.146.215	-	-	-	4.440.146.215	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1.672.590.000	2.639.802.000	8.437.464.000	(3.619.643.574)	9.130.212.426	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	3.522.849.048	744.294.087	-	(225.782.907)	4.041.360.228	Long-term bank loan
Jumlah	145.688.940.201	3.384.096.087	8.437.464.000	(3.845.426.481)	153.665.073.807	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 years	1 sampai 5 tahun / 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	44.457.493.620	-	-	-	44.457.493.620	Short-term bank loans
Utang usaha	29.951.754.304	-	-	-	29.951.754.304	Trade payables
Utang lain-lain	16.549.627.460	-	-	-	16.549.627.460	Other payables
Beban masih harus dibayar	3.457.116.617	-	-	-	3.457.116.617	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1.170.813.000	2.547.057.000	9.031.986.000	(3.619.643.574)	9.130.212.426	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	5.128.172.159	4.268.073.907	-	(945.113.838)	8.451.132.228	Long-term bank loan
Jumlah	100.714.977.160	6.815.130.907	9.031.986.000	(4.564.757.412)	111.997.336.655	Total
31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 years	1 sampai 5 tahun / 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	51.835.086.061	-	-	-	51.835.086.061	Short-term bank loans
Utang usah	12.607.766.188	-	-	-	12.607.766.188	Trade payables
Utang lain-lain	16.367.507.968	-	-	-	16.367.507.968	Other payables
Beban masih harus dibayar	2.738.539.157	-	-	-	2.738.539.157	Accrued expenses
Liabilitas sewa	669.036.000	2.508.885.000	9.571.935.000	(3.619.643.574)	9.130.212.426	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	5.620.789.411	9.396.246.067	-	(2.156.531.250)	12.860.504.228	Long-term bank loan
Jumlah	89.838.724.785	11.905.131.067	9.571.935.000	(5.776.174.824)	105.539.616.028	Total

35. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan tipe produk sebagai berikut:

1. Ban Luar
2. Ban Dalam

35. SEGMENT INFORMATION

The Group reported segments under PSAK 5 based on the type of product as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022			
Ban Luar / Tire	Ban Dalam / Tube	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	245.897.805.923	114.769.133.556	Net sales
Beban pokok penjualan	(207.269.364.140)	(98.445.037.768)	Cost of goods sold
Laba Kotor	38.628.441.783	16.324.095.788	Gross Profit
Beban penjualan	(14.156.689.456)	(3.374.126.899)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(6.814.827.112)	(6.834.642.053)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	(1.907.886.286)	(1.586.522.740)	Other expenses - net
Laba Usaha	15.749.038.929	4.528.804.096	Income From Operations
Penghasilan keuangan	31.958.375	20.188.658	Finance income
Beban keuangan	(1.571.449.537)	(1.775.246.131)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan	14.209.547.767	2.773.746.623	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset			Assets
Aset segmen	245.754.478.541	148.983.874.329	Segment assets
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas segmen	131.915.478.394	81.670.553.307	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA			OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	143.544.354.374	45.310.342.077	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	50.504.948.808	30.697.700.703	Accumulated depreciation
30 September 2021 / September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)			
Ban Luar / Tire	Ban Dalam / Tube	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	171.573.457.743	99.017.608.690	Net sales
Beban pokok penjualan	(140.897.898.017)	(88.278.382.056)	Cost of goods sold
Laba Kotor	30.675.559.726	10.739.226.634	Gross Profit
Beban penjualan	(10.771.713.057)	(2.563.569.583)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(4.405.581.573)	(5.838.580.527)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain - bersih	256.527.280	1.578.202.153	Other income - net
Laba Usaha	15.754.792.376	3.915.278.677	Income From Operations
Penghasilan keuangan	42.659.782	19.147.148	Finance income
Beban keuangan	(2.155.947.041)	(1.491.324.980)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan	13.641.505.117	2.443.100.845	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset			Assets
Aset segmen	193.487.985.608	113.392.609.748	Segment assets
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas segmen	77.990.756.186	63.276.650.695	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA			OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	135.907.713.987	43.107.859.119	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	42.096.879.156	27.173.695.128	Accumulated depreciation

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Ban Luar / Tire	Ban Dalam / Tube	Jumlah / Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan bersih	248.328.073.119	136.011.423.368	384.339.496.487
Beban pokok penjualan	(207.652.721.994)	(119.126.830.003)	(326.779.551.997)
Laba Kotor	40.675.351.125	16.884.593.365	57.559.944.490
Beban penjualan	(18.065.732.148)	(1.628.630.464)	(19.694.362.612)
Beban umum dan administrasi	(5.259.554.808)	(9.730.200.881)	(14.989.755.689)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(33.989.152)	1.323.974.184	1.289.985.032
Laba Usaha	17.316.075.017	6.849.736.204	24.165.811.221
Penghasilan keuangan	50.377.685	25.982.010	76.359.695
Beban keuangan	(2.534.026.169)	(1.893.198.186)	(4.427.224.355)
Laba sebelum pajak penghasilan	14.832.426.533	4.982.520.028	19.814.946.561
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset			
Aset segmen	207.270.521.398	126.834.992.887	334.105.514.285
Liabilitas			
Liabilitas segmen	90.991.289.159	74.619.874.835	165.611.163.994
INFORMASI LAINNYA			
Biaya perolehan aset tetap	136.019.465.337	42.980.928.565	179.000.393.902
Akumulasi penyusutan	44.196.894.452	28.009.969.054	72.206.863.506
31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Ban Luar / Tire	Ban Dalam / Tube	Jumlah / Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan bersih	165.260.801.916	130.972.795.681	296.233.597.597
Beban pokok penjualan	(136.104.436.495)	(113.315.267.920)	(249.419.704.415)
Laba Kotor	29.156.365.421	17.657.527.761	46.813.893.182
Beban penjualan	(12.837.449.905)	(4.125.009.158)	(16.962.459.063)
Beban umum dan administrasi	(5.254.410.237)	(8.737.555.393)	(13.991.965.630)
Beban lain-lain - bersih	(793.282.578)	(47.853.150)	(841.135.728)
Laba Usaha	10.271.222.701	4.747.110.060	15.018.332.761
Penghasilan keuangan	67.886.706	43.528.989	111.415.695
Beban keuangan	(3.046.141.297)	(1.780.763.612)	(4.826.904.909)
Laba sebelum pajak penghasilan	7.292.968.110	3.009.875.437	10.302.843.547
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset			
Aset segmen	188.264.122.524	90.137.998.661	278.402.121.185
Liabilitas			
Liabilitas segmen	81.355.150.269	44.359.252.101	125.714.402.370
INFORMASI LAINNYA			
Biaya perolehan aset tetap	129.776.761.054	41.716.774.656	171.493.535.710
Akumulasi penyusutan	35.997.630.199	24.254.339.721	60.251.969.920

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Net sales			
Cost of goods sold			
Gross Profit			
Selling expenses			
General and administrative expenses			
Other income (expenses) - net			
Income From Operations			
Finance income			
Finance costs			
Income before income tax			
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Assets			
Segment assets			
Liabilities			
Segment liabilities			
OTHER INFORMATION			
Acquisition cost of fixed assets			
Accumulated depreciation			

31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Ban Luar / Tire	Ban Dalam / Tube	Jumlah / Total
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Penjualan bersih	165.260.801.916	130.972.795.681	296.233.597.597
Beban pokok penjualan	(136.104.436.495)	(113.315.267.920)	(249.419.704.415)
Laba Kotor	29.156.365.421	17.657.527.761	46.813.893.182
Beban penjualan	(12.837.449.905)	(4.125.009.158)	(16.962.459.063)
Beban umum dan administrasi	(5.254.410.237)	(8.737.555.393)	(13.991.965.630)
Beban lain-lain - bersih	(793.282.578)	(47.853.150)	(841.135.728)
Laba Usaha	10.271.222.701	4.747.110.060	15.018.332.761
Penghasilan keuangan	67.886.706	43.528.989	111.415.695
Beban keuangan	(3.046.141.297)	(1.780.763.612)	(4.826.904.909)
Laba sebelum pajak penghasilan	7.292.968.110	3.009.875.437	10.302.843.547
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Aset			
Aset segmen	188.264.122.524	90.137.998.661	278.402.121.185
Liabilitas			
Liabilitas segmen	81.355.150.269	44.359.252.101	125.714.402.370
INFORMASI LAINNYA			
Biaya perolehan aset tetap	129.776.761.054	41.716.774.656	171.493.535.710
Akumulasi penyusutan	35.997.630.199	24.254.339.721	60.251.969.920

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Net sales			
Cost of goods sold			
Gross Profit			
Selling expenses			
General and administrative expenses			
Other expenses - net			
Income From Operations			
Finance income			
Finance costs			
Income before income tax			
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Assets			
Segment assets			
Liabilities			
Segment liabilities			
OTHER INFORMATION			
Acquisition cost of fixed assets			
Accumulated depreciation			

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Ban Luar / Tire	Ban dalam / Tube	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	138.109.472.601	135.234.836.953	273.344.309.554	Net sales
Beban pokok penjualan	(118.541.025.888)	(115.817.503.912)	(234.358.529.800)	Cost of goods sold
Laba Kotor	19.568.446.713	19.417.333.041	38.985.779.754	Gross Profit
Beban penjualan	(4.967.408.352)	(4.297.960.018)	(9.265.368.370)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(3.667.774.490)	(7.805.185.612)	(11.472.960.102)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain - bersih	156.970.634	79.545.029	236.515.663	Other income - net
Laba Usaha	11.090.234.505	7.393.732.440	18.483.966.945	Income From Operations
Penghasilan keuangan	19.277.619	41.616.438	60.894.057	Finance income
Beban keuangan	(4.162.432.213)	(3.031.986.053)	(7.194.418.266)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan	6.947.079.911	4.403.362.825	11.350.442.736	Income before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset				Assets
Aset segmen	168.163.734.606	94.489.655.146	262.653.389.752	Segment assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	65.722.119.226	51.171.733.864	116.893.853.090	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	125.301.310.284	41.433.166.566	166.734.476.850	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	28.240.767.925	20.732.516.433	48.973.284.358	Accumulated depreciation

36. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Grup mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga, sebagai berikut:

The Group has significant agreements and commitments with third parties, as follows:

Perusahaan

The Company

Perjanjian Sewa Tanah

Land Lease Agreement

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 12.724 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Based on land lease agreement No. 001/PRJ-KTI/XII/2018 dated December 28, 2018, Harris Muliawan, the President Director, as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 12,724 m² located in Tambak and Nambo Ilir Villages, Cikande, Serang. The lease period is January 1, 2019 to December 31, 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 17.323 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Based on land lease agreement No. 002/PRJ-KTI/XII/2018 dated December 28, 2018, Indra Muliawan, Commissioner, as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 17,323 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang. The lease period is from January 1, 2019 to December 31, 2038.

36. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian Sewa Tanah (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 868 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Entitas Anak

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 16.088 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada UK, Entitas anak dengan seluruhnya seluas 8.750 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ/UKL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Indriana Angdrial selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 1.669 m² yang berlokasi di Desa Nambo Ilir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2038.

Asuransi Aset Tetap

Berdasarkan polis asuransi No. 0125012200142, 0125012200143, 0125012200144, 0125012200145, 0125012200146 dan 0125012200147, dengan obyek yang diasuransikan masing-masing berupa Persediaan, Bangunan, Mesin dan instalasinya, Mesin dan instalasi serta Pabrik Pembuatan Ban Luar untuk Sepeda Motor telah diasuransikan oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan seluruhnya sebesar Rp 129.189.300.000 jangka waktu pertanggungan mulai tanggal April 2022 sampai April 2023.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The Company (continued)

Land Lease Agreement (continued)

Based on land lease agreement No. 003/PRJ-KTI/XII/2018 dated December 28, 2018, Indriana Angdrial, as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 868 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang. The lease period is from January 1, 2019 to December 31, 2038.

Subsidiary

Land Lease Agreement

Based on land lease agreement No. 001/PRJ/UKL/XII/2018 dated December 28, 2018, Harris Muliawan, President Director, as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 16,088 m² located in Tambak and Nambo Ilir Village, Cikande, Serang. The lease period is from January 1, 2019 to December 31, 2038.

Based on land lease agreement No. 002/PRJ/UKL/XII/2018 dated December 28, 2018, Indra Muliawan, Commissioner, as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 8,750 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang. The lease period is from January 1, 2019 to December 31, 2038.

Based on land lease agreement No. 003/PRJ/UKL/XII/2018 dated December 28, 2018, Indriana Angdrial as the landowner agreed to lease to the Company with a total area of 1,699 m² located in Nambo Ilir Village, Cikande, Serang. The lease period is January 1, 2019 to December 31, 2038.

Insurance of Fixed Assets

Based on insurance policies No. 0125012200142, 0125012200143, 0125012200144, 0125012200145, 0125012200146 and 0125012200147, with the insured objects in the form of Inventory, Buildings, Machinery and its installations, Machinery and its installations and Outer Tire Manufacturing Plant for Motorcycles have been insured by PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, a third party, with a total sum insured of Rp 129,189,300,000 with coverage period starting from April 2022 to April 2023.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Penetapan dan Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 102 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk Penetapan dan Pengangkatan kembali Komisaris dan Dewan Direksi, sebagai berikut

Komisaris	:	Indra Muliawan	:	Commissioner
Direktur Utama	:	Harris Muliawan	:	President Director
Direktur	:	Hardi Muliawan	:	Director

Akta ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0085780 tanggal 12 Desember 2022.

Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha, Perubahan Nilai Nominal Saham, Ratifikasi Penggunaan Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Akta Notaris No. 103 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas tata cara penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan serta persetujuan ratifikasi atas tanggal penyetoran modal oleh pemegang saham.
- Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perusahaan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 2020.
- Menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 50. Sehingga, susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Harris Muliawan	1.121.180.000	40.36%	56.059.000.000	Harris Muliawan
PT Kingland Investindo Nusantara	1.100.000.000	39.60%	55.000.000.000	PT Kingland Investindo Nusantara
Indra Muliawan	554.340.000	19.95%	27.717.000.000	Indra Muliawan
Hardi Muliawan	2.500.000	0.09%	125.000.000	Hardi Muliawan
Jumlah	2.778.020.000	100.00%	138.901.000.000	Total

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Determination and Reappointment of the Company's Management

Based on the Shareholders' Decision Statement dated December 12, 2022 with Notarial Deed No. 102 of Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., the shareholders agreed to appoint new members of Commissioner and the Board of Directors, as follows

Commissioner	:	Indra Muliawan	:	Commissioner
President Director	:	Harris Muliawan	:	President Director
Director	:	Hardi Muliawan	:	Director

This Deed has been accepted and recorded in the legal entity administration system of the Republic of Indonesia on Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0085780 dated December 12, 2022.

Approval of Changes in Business Activities, Changes in Par Value of Shares, Ratification of Profit Utilization

Based on the Shareholders' Decision Statement (Circular Resolution) dated December 12, 2022 with the Notarial Deed No. 103 of Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- Approve and express no objection to the procedures for capital injection by the shareholders as stated in the Company's Deed of Establishment as well as approval of the ratification of the date of capital injection by the shareholders.
- Approve to amend the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Indonesian Standard Business Field Classification/KBLI 2020.
- Approve to change the nominal value per share from Rp 1,000,000 to Rp 50. As such, the shareholder composition is as follows:

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha,
Perubahan Nilai Nominal Saham, Ratifikasi
Penggunaan Laba (lanjutan)**

- Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 250.000.000.000 yang terbagi atas 5.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50 per lembar saham.
 - Modal ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau setara dengan 2.778.020.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 138.901.000.000.
- d) Meratifikasi persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 24 Juni 2022.
- e) Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan Keputusan ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0090012.AH.01.03-0324823 tanggal 12 Desember 2022.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 14 Desember 2022 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 143 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a) Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- b) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT King Tire Indonesia Tbk.
- c) Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 saham baru dan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
- d) Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.
- e) Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**Approval of Changes in Business Activities,
Changes in Par Value of Shares, Ratification of
Profit Utilization (continued)**

- The authorized capital of the Company amounted to Rp 250,000,000,000 divided into 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp 50 per share.
 - Issued and paid-up capital of 25% or equivalent to 2,778,020,000 shares with an aggregate nominal value of Rp 138,901,000,000.
- d) Ratify the approval of the use of the Company's net profit until 2021 as stated in the Circular Resolution of the Company's Shareholders dated June 24, 2022.
- e) To authorize the Board of Directors to transfer this power to another person to be authorized to state this Resolution in a deed made before a notary.

This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0090012.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0324823 dated December 12, 2022.

Based on the Shareholders' Decision Statement (Circular Resolution) dated December 14, 2022 with Notarial Deed No. 143 of Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- a) Approve the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public (Public Offering) and list the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange.
- b) Approve the change of the Company's status from a Private Company to a Public Company and approve the change of the Company's name to PT King Tire Indonesia Tbk.
- c) Conduct an initial public offering of the Company's shares consisting of 700,000,000 new shares and issue up to 350,000,000 series I warrants with a nominal value of Rp 50 per share.
- d) List all of the Company's shares after the Public Offering in the Capital Market, including shares owned by the old shareholders in the Indonesia Stock Exchange.
- e) Approve to amend the entire Articles of Association of the Company to conform to the Provisions of the Financial Services Authority Regulations.

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha,
Perubahan Nilai Nominal Saham, Ratifikasi
Penggunaan Laba (lanjutan)**

- f) Menetapkan Harris Muliawan sebagai pengendali Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
- g) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) sepenuhnya kepada mereka serta mengangkat dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Muliawan	:
Komisaris	:	Hardi Muliawan	:
Komisaris Independen	:	Danny Setiawan	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Harris Muliawan	:
Direktur	:	Ferry Chandra Kusuma	:
Direktur	:	Aneka Warna	:
Direktur	:	Habibullah	:

- h) Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- i) Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0087022 dan AHU-AH.01.03-030326491 tanggal 15 Desember 2022.

**Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal,
Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan
Remunerasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

**Komite Nominasi dan
Remunerasi**

Ketua	:	Danny Setiawan	:
Anggota	:	Hardi Muliawan	:
Anggota	:	Indra Muliawan	:

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**Approval of Changes in Business Activities,
Changes in Par Value of Shares, Ratification of
Profit Utilization (continued)**

- f) Determine Harris Muliawan as the controller of the Company based on the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
- g) Honorably discharge all former members of the Boards of Commissioners and by granting full release and discharge (*acquit de charge*) to them and appointed the new members of the Boards of Commissioners and Directors, with the following composition:

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Board of Directors

	:	President Director	:
	:	Director	:
	:	Director	:
	:	Director	:

- h) Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
- i) Authorize the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid-up for the execution of the Public Offering.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0090920.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0087022 dan AHU-AH.01.03-030326491 dated December 15, 2022.

**Appointment of Audit Committee, Internal
Audit, Corporate Secretary and Nomination and
Remuneration Committee**

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SKDK/XII/2022 dated December 16, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Nomination and Remuneration Committee with the following composition:

**Nomination and
Remuneration Committee**

	:	Chairman	:
	:	Member	:
	:	Member	:

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal,
Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan
Remunerasi (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SKDK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Danny Setiawan	:
Anggota	:	Lindah	:
Anggota	:	Christina Wati	:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 001/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Internal Audit dengan susunan sebagai berikut:

Audit Internal

Ketua	:	Widikdo	:
Anggota	:	Rikawati	:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/SKD/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Diego Armando sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai No. 001/SP-DSL/XI/2022 tanggal 1 November 2022, PT United Kingland, Anak Perusahaan setuju untuk meminjamkan motor diesel kepada Perusahaan dengan masa pakai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025. Atas pemakaian tersebut tidak dikenakan biaya.

Perjanjian Sewa Tanah

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 001/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, Harris Muliawan, Direktur Utama, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 51.675 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo illir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**Appointment of Audit Committee, Internal
Audit, Corporate Secretary and Nomination and
Remuneration Committee (continued)**

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002/SKDK/XII/2022 dated December 16, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Audit Committee with the following composition:

Audit Committee

Head
Member
Member

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 001/SKD/XII/2022 dated December 16, 2022, the Company's Board of Directors appointed Internal Audit with the following composition:

Internal Audit

Chairman
Members

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 002/SKD/XII/2022 dated December 16, 2022 the Company's Board of Directors appointed Diego Armando as the Corporate Secretary.

Lease Agreement

Based on lease agreement No. 001/SP-DSL/XI/2022 dated November 1, 2022, PT United Kingland, a Subsidiary agreed to lend a diesel motor to the Company with a usage period of November 1, 2022 until October 31, 2025. The loan is free of charge.

Land Lease Agreement

Based on land lease agreement No. 001/PRJ-KTI/X/2022 dated October 18, 2022 Harris Muliawan, President Director, as the land owner agreed to lease of land to the Company with a total area of 51,675 m² located in Tambak and Nambo Illir Villages, Cikande, Serang. The lease period is October 18, 2022 to October 17, 2042.

**37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Perjanjian Sewa Tanah (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa tanah No. 002/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indra Muliawan, Komisaris, selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 28.120 m². Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 003/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Indriana Angdrial selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 33.791 m². Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Berdasarkan Perjanjian sewa tanah No. 004/PRJ-KTI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, PT Lingga Djaja selaku pemilik tanah menyetujui menyewakan tanah kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 83.965 m² yang berlokasi di Desa Tambak dan Nambo Illir, Cikande, Serang. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2042.

Perjanjian Kredit Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.610/2022 tanggal 14 November 2022, Perusahaan mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas KMK *Revolving* sublimit fasilitas L/C dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 30.000.000.000 sebelumnya Rp 25.000.000.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun yang akan jatuh tempo pada 16 November 2023.
- Sublimit fasilitas L/C dengan batas maksimum kredit sebesar AS\$ 1.000.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan akan jatuh tempo pada 16 November 2023.
- Fasilitas *Treasury Line* dengan batas maksimum kredit sebesar AS\$ 1.000.000.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Land Lease Agreement (continued)

Based on land lease agreement No. 002/PRJ-KTI/X/2022 dated October 18, 2022, Indra Muliawan, Commissioner, as the landowner agreed to lease of land to the Company with a total area of 28,120 m². The lease period is from October 18, 2022 to October 17, 2042.

Based on the land lease agreement No. 003/PRJ-KTI/X/2022 dated October 18, 2022, Indriana Angdrial, a related party, as the landowner agreed to lease of land to the Company with a total area of 33,791 m². The lease period is from October 18, 2022 to October 17, 2042.

Based on Land Lease Agreement No. 004/PRJ-KTI/X/2022 dated October 18, 2022, PT Lingga Djaja, as the landowner agreed to lease of land to the Company with a total area of 83,965 m² located in Tambak and Nambo Illir Villages, Cikande, Serang. The lease period is from October 18, 2022 to October 17, 2042.

Bank Loan Agreement

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company

Based on SPPK credit offer letter No. CM2.JKO/SPPK.610/2022 dated November 14, 2022, the Company received an amendment to the credit offer that has been granted with the following details:

- KMK *Revolving* facility sublimit L/C facility with maximum credit limit of Rp 30,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with interest rate of 9% per annum which will mature on November 16, 2023.
- Sublimit L/C facility with a maximum credit limit of US\$ 1,000,000 used for the purchase of raw materials and will mature on November 16, 2023.
- Treasury Line* Facility with a maximum credit limit of US\$ 1,000,000.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Kredit Bank (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan surat No. CM2.JKO/1482/2022 tanggal 24 November 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat keterangan lunas atas pinjaman kredit investasi.

Entitas Anak

Berdasarkan surat penawaran kredit SPPK No. CM2.JKO/SPPK.611/2022 tanggal 14 November 2022. PT United Kingland, Entitas Anak, mendapatkan perubahan penawaran kredit yang telah diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Fasilitas KMK *Revolving* sublimit fasilitas L/C dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 30.000.000.000 sebelumnya Rp 25.000.000.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun yang akan jatuh tempo pada 16 November 2023.
- b) Sublimit fasilitas L/C dengan batas maksimum kredit sebesar AS\$ 600.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan akan jatuh tempo pada 17 November 2023.
- c) Fasilitas *Treasury Line* dengan batas maksimum kredit sebesar AS\$ 1.000.000.

38. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus Covid-19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Bank Loan Agreement (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

The Company (continued)

Based on letter No. CM2.JKO/1482/2022 dated November 24, 2022, the Company has obtained a certificate of repayment of the investment credit loan.

Subsidiary

Based on SPPK credit offer letter No. CM2.JKO/SPPK.611/2022 dated November 14, 2022, PT United Kingland, a subsidiary, received an amendment to the credit offer that has been granted with the following details:

- a) KMK *Revolving Facility* sublimit L/C facility with a maximum credit limit of Rp 30,000,000,000 previously Rp 25,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum which will mature on November 16, 2023.
- b) Sublimit L/C facility with a maximum credit limit of US\$ 600,000 used for the purchase of raw materials and will mature on November 17, 2023.
- c) *Treasury Line Facility* with a maximum credit limit of US\$ 1,000,000.

38. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Group. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future.

39. INFORMASI ARUS KAS TAMBAHAN

Rekonsiliasi utang bersih

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)
Utang bank jangka pendek					
Saldo awal	107.491.583.731	44.457.493.620	44.457.493.620	51.835.086.061	54.519.215.688
Arus kas:					
Penerimaan	90.315.863.775	76.738.990.300	106.655.993.979	72.555.679.585	28.303.876.438
Pembayaran	(91.947.397.943)	(36.092.894.850)	(44.253.304.090)	(79.482.789.292)	(30.988.006.065)
Non-kas:					
Dampak selisih kurs	3.765.280.750	387.369.391	631.400.222	(450.482.734)	-
Saldo akhir	<u>109.625.330.313</u>	<u>85.490.958.461</u>	<u>107.491.583.731</u>	<u>44.457.493.620</u>	<u>51.835.086.061</u>

*Short-term
bank loans
Beginning
balance
Cash flows
Proceeds
Repayments
Non-cash:
Effect of foreign
exchange
Ending balance*

39. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Net debt reconciliation

40. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMENDEMENT

DSAK IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Grup masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

40. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";
- Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets – Proceeds before Intended Use";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Definition of Accounting Estimates";
- Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statement of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 28 Februari 2023, sehubungan dengan rencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

- Perubahan judul menjadi laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019;
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, "Penyesuaian pada akun pendapatan (beban) lain-lain - bersih dan beban keuangan";
- Laporan arus kas konsolidasian, "Penyesuaian pada aktivitas operasi dan pendanaan";
- Catatan 8, "Penambahan catatan pengungkapan pada akun biaya dibayar di muka";
- Catatan 9, "Perubahan penyajian pada akun uang muka";
- Catatan 11, "Penyesuaian akun aset tetap terkait penjualan aset tetap";
- Catatan 12, "Penambahan catatan pengungkapan pada akun aset takberwujud";
- Catatan 14, "Penambahan pengungkapan pada akun utang bank jangka pendek";
- Catatan 17c, "Penambahan pengungkapan pada perpajakan";
- Catatan 18, "Perubahan penyajian pada akun beban masih harus dibayar";
- Catatan 23, "Penambahan pengungkapan pada akun modal saham";
- Catatan 24, "Penambahan catatan pengungkapan pada akun tambahan modal disetor";
- Catatan 30, "Penyesuaian pada akun pendapatan (beban) lain-lain - bersih"; dan
- Catatan 39, "Perubahan penyajian pada rekonsiliasi utang bersih".

41. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On February 28, 2023, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares, management reissued the consolidated financial statements as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures and changes in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows, and notes to the consolidated financial statements with details below:

- Change in the title to consolidated financial statements as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019;
- Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, "Adjustments in other income (expenses) - net and finance costs accounts";
- Consolidated statements of cash flows, "Adjustments in operating and financing activities";
- Note 8, "Additional note disclosure on prepaid expense account";
- Note 9, "Change in presentation of advances account";
- Note 11, "Adjustment in fixed assets account related to sale of fixed assets";
- Note 12, "Additional note disclosure on intangible assets account";
- Note 14, "Additional disclosure on short-term bank loan account";
- Note 17c, "Additional disclosure on taxation";
- Note 18, "Change in presentation of accrued expenses account";
- Note 23, "Additional disclosure on share capital account";
- Note 24, "Additional note disclosure on additional paid-in capital account";
- Note 30, "Adjustment in other income (expenses) - net account"; and
- Note 39, "Change in presentation of net debt reconciliation".